



Katalog: 9199007

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA

2023



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA

2023



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2023

Indonesian Economic Report, 2023

ISSN : 1858-0963

No. Publikasi/*Publication Number* : 07300.2311

Katalog/*Catalog* : 9199007

Ukuran Buku/*Book Size* : 17,6x25 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages* : xxiv+184 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penyunting/*Editor*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penerbit/*Published by* :

©Badan Pusat Statistik/*BPS-Statistics Indonesia*

Pencetak/*Printed by*:

-

Sumber Ilustrasi/*Graphics by* : www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah :
Muchammad Romzi

Editor :
Adam Sofian
Sofaria Ayuni

Penulis :
Adam Sofian
Sofaria Ayuni
Muhammad Ihsan
Tika Meilaningsih
Erna Yulianingsih
Valent Gigih Saputri
Nia Setiyawati

Desain/layout :
Tika Meilaningsih
Muhammad Ihsan
Erna Yulianingsih
Valent Gigih Saputri
Nia Setiyawati

Kontributor Data :
- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
- Direktorat Statistik Harga
- Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2023 merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia. Publikasi ini mengulas kondisi perekonomian pasca terjadi Pandemi Covid-19 dan perkembangan perekonomian di tahun berjalan atau selama tahun 2023, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari data yang dihimpun oleh BPS maupun institusi lain dan Kementerian/Lembaga lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara, pertumbuhan ekonomi, moneter dan perbankan, inflasi, perdagangan luar negeri, investasi, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini. Saran membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi sejenis di masa mendatang, dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, September 2023

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Penjelasan Umum	xvii
Penjelasan Teknis	xix
Singkatan	xxiii
BAB 1. TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA	1
Ancaman Resesi	5
Indonesia Tumbuh Solid di Tengah Perlambatan Global	6
Prospek Menghadapi Risiko Ekonomi 2023	9
Ketahanan Pangan Guna Mendukung Ekonomi Nasional	10
BAB 2. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL	15
Pembatasan Aktivitas Sosial Melonggar, Seluruh Sektor Ekonomi Bangkit	17
Konsumsi Lancar, Ekonomi Berputar	23
Tidak Mengalami Kontraksi Selama Pandemi, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara Justru Semakin Kuat	34
Pendapatan Per Kapita	32
BAB 3. PERAN APBN DALAM Mendukung Arah dan Kebijakan STRATEGIS PEMERINTAH	39
APBN 2023 untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	42
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 Tertinggi Selama Lima Tahun Terakhir	45
Realisasi Belanja Negara Tahun 2022 Bergerak Ekspansif dari Tahun Sebelumnya	48
Sumber Pembiayaan untuk Menutup Defisit Anggaran Diupayakan Inovatif dan Berkelanjutan	52
Utang Negara masih Menjadi Komponen Utama Pembiayaan Tantangan dalam Pengelolaan Fiskal Demi Terwujudnya APBN yang Berkelanjutan	47
BAB 4. KEBIJAKAN MONETER, STABILITAS PERBANKAN DAN PERKEMBANGAN DIGITALISASI SEKTOR KEUANGAN	55
Perkembangan Uang Beredar	57
Perkembangan Uang Primer dan Komponennya	60
Nilai Tukar Rupiah Menguat	62
Suku Bunga Acuan Tetap Terjaga	64
Digitalisasi Sektor Keuangan	66

BAB 5. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT	75
Inflasi Indonesia 2022 Dibandingkan Inflasi Global.....	77
Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah Penyumbang Inflasi Tertinggi	79
Inflasi Kelompok Pengeluaran Transportasi Tertinggi di Tahun 2022	82
Laju Inflasi di 90 Kota Inflasi Indonesia	86
Inflasi, Daya Beli, dan Pertumbuhan Ekonomi	90
BAB 6. PERDAGANGAN INDONESIA DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	93
Surplus Neraca Perdagangan Setiap Bulan Berturut-turut.....	96
Ekspor Indonesia Masih Mampu Tumbuh Positif.....	98
Ekspor Hasil Industri Sebagai Andalan Ekspor Indonesia	100
Keragaman Pasar Negara Tujuan Ekspor Indonesia.....	103
Impor Indonesia Tumbuh Positif Untuk Reindustrialisasi.....	105
Mengurangi Ketergantungan Terhadap Negara Pemasok Barang Impor	108
BAB 7. KEBANGKITAN INVESTASI INDONESIA DI MASA PANDEMI DAN PERDAGANGAN SAHAM	111
Dukungan Pemerintah Menjadi Kekuatan Investasi di Dalam Negeri	113
Sektor yang Menjanjikan Bagi Pemodal Dalam Negeri (PMDN) Payung Hukum Investasi di Indonesia Untuk Menarik Penanaman Modal Asing	115
Sektor-Sektor Incaran Investor Asing	120
Wilayah Incaran Para Investor Asing	122
Perdagangan Saham Di Bursa Efek Indonesia	125
Investasi Asing yang masuk ke Indonesia	131
BAB 8. PARIWISATA	135
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Meningkat Selama Tahun 2022	139
Penumpang Transportasi Udara Meningkat di Akhir Tahun 2022	143
Tren Okupansi Hotel Meningkat.....	148
BAB 9. KETENAGAKERJAAN	149
Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Membaik Pasca Pandemi	155
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi	157
Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja	161
Tenaga Kerja Sektor Pertanian Masih Mendominasi.....	164
Upah Minimum	165
Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia.....	166
Sektor Informal Masih Mendominasi Struktur Tenaga Kerja ...	170
Daftar Pustaka	173

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara di Kawasan Asia, 2021-2023 ¹ 4
Tabel 1.2	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia, 2023-2024 9
Tabel 1.3	Perkembangan IDR dan SSR Beberapa Komoditas Pangan, 2018-2022 12
Tabel 1.4	Perkembangan Beberapa Indikator Terkait Pangan, 2019-2022 13
Tabel 2.1	PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022 19
Tabel 2.2	PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022..... 21
Tabel 2.3	PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2019-2022 23
Tabel 2.4	PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2019-2022..... 26
Tabel 2.5	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen), 2020-2022..... 37
Tabel 3.1	Postur APBN 2022 dan 2023 (triliun rupiah) 42
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Negara (triliun rupiah), 2018-2022... 45
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah), 2018-2022 47
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Negara (triliun rupiah), 2018-2022 48
Tabel 3.5	Realisasi Defisit Anggaran dan Rincian Pembiayaan (triliun rupiah), 2022..... 53
Tabel 4.1	Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah), 2021-2023 .. 59
Tabel 4.2	Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah), 2021-2023 61
Tabel 4.3	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, 2022-2023..... 63
Tabel 4.4	Perkembangan Suku Bunga PUAB dan 7-Day RR Rate, 2021-2023 65
Tabel 5.1	Inflasi dan Andil Inflasi (persen), 2021-2023 (2018=100) ... 80
Tabel 5.2	Laju dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021-2022 (2018=100)..... 82
Tabel 5.3	Laju dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021-2022 (2018=100)..... 84
Tabel 5.4	Laju Inflasi 90 Kota di Indonesia, 2021-2023 (2018=100) ... 87

Tabel 6.1	Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), 2020-Triwulan II 2023	96
Tabel 6.2	Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia (juta US\$), 2020-Triwulan II 2023	99
Tabel 6.3	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023	101
Tabel 6.4	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2020 - Triwulan II 2023	102
Tabel 6.5	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023	103
Tabel 6.6	Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023	106
Tabel 6.7	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023	107
Tabel 6.8	Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023	109
Tabel 7.1	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), 2020-2022	116
Tabel 7.2	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah), 2020-2022	119
Tabel 7.3	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US\$), 2020-2022	123
Tabel 7.4	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Pulau (juta US\$), 2020-2022	126
Tabel 7.5	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (juta US\$), 2020-2022 .	129
Tabel 7.6	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, 2017-2023	135
Tabel 7.7	Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, 2018-2023	137
Tabel 8.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama (kunjungan), 2020-2023	145
Tabel 8.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan (kunjungan), 2020-2022	146
Tabel 8.3	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Provinsi, 2021-2022	150
Tabel 8.4	Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (persen), 2018-2022	151
Tabel 9.1	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023	158

Tabel 9.2	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023	159
Tabel 9.3	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019-2023	160
Tabel 9.4	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2019-2023 ..	162
Tabel 9.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2019-2023	164
Tabel 9.6	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2019-2023	166
Tabel 9.7	Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen), 2014-2023	167
Tabel 9.8	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2019-2023	168
Tabel 9.9	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2019-2023	169
Tabel 9.10	Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2020-2022	170
Tabel 9.11	Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2020-2022	172
Tabel 9.12	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2019-2023	173

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2015-2024 ¹	3
Gambar 1.2	PMI Manufaktur Indonesia, 2021-2023	7
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2012-2022 .	8
Gambar 1.4	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Indonesia, 2018-2022.....	11
Gambar 2.1	Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2022.....	28
Gambar 2.2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2019-2022.....	29
Gambar 2.3	Kontribusi Sub komponen Leisure dan Non Leisure pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2019-2022.....	30
Gambar 2.4	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2019-2022	30
Gambar 2.5	Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2019-2022	31
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen), 2019-2022	32
Gambar 2.7	Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2019-2022	33
Gambar 2.8	Kontribusi Subkomponen Konsumsi Kolektif dan Konsumsi Individu pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2019-2022	34
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2019-2022.....	35
Gambar 2.10	Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2022	35
Gambar 3.1	Kontribusi Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Pada Realisasi Pendapatan Negara, 2018-2022	46
Gambar 3.2	Lima Kementerian Lembaga (K/L) dengan Porsi Realisasi Belanja Terbesar Terhadap Total Belanja Pemerintah Pusat, 2022	49
Gambar 3.3	Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah) Menurut Jenis Belanja, 2021-2022	49
Gambar 3.4	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2022 (triliun rupiah)	51
Gambar 3.5	Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun rupiah), 2018-2022	52
Gambar 3.6	Realisasi Komponen Pembiayaan Utang (triliun rupiah), 2021-2022	53

Gambar 3.7	Realisasi Komponen Pembiayaan Utang (triliun rupiah), 2021-2022	54
Gambar 4.1	Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), 2018-2023	58
Gambar 4.2	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, 2022-2023	62
Gambar 4.3	Jumlah Mesin EDC, 2020 - 2023 (unit)	67
Gambar 4.4	Volume dan Nilai Transaksi pada Mesin EDC, 2020 - 2023	68
Gambar 4.5	Volume dan Nilai Transaksi Internet Banking, 2020 - 2023	68
Gambar 4.6	Sebaran Merchant QRIS Regional per Mei 2023	69
Gambar 4.7	Perkembangan Transaksi QRIS, 2020 - 2023.....	69
Gambar 4.8	Jumlah Kartu Kredit, Kartu ATM dan Kartu ATM + Debit, 2020 - 2023 (unit).....	70
Gambar 4.9	Volume dan Nilai Transaksi Kartu ATM dan ATM + Debit, 2020 - 2023.....	71
Gambar 4.10	Volume dan Nilai Transaksi Kartu Kredit, 2020 - 2023	71
Gambar 4.11	Jumlah Kartu / Instrumen Uang Elektronik Berdasarkan Media Penyimpanan, 2020 - 2023 (juta unit).....	72
Gambar 4.12	Jumlah Kartu / Instrumen Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Data, 2020 - 2023 (juta unit)	72
Gambar 4.13	Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik, 2020 - 2023	73
Gambar 5.1	Perbandingan Inflasi Beberapa Negara year-on-year (persen), 2015-2022.....	78
Gambar 5.2	Perkembangan Inflasi Umum, Inti, Harga yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak di Indonesia (m-to-m, 2018=100), 2022-2023	79
Gambar 6.1	Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2023	97
Gambar 6.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (persen), 2019-2022	98
Gambar 6.3	Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia (persen), 2019-2022	105
Gambar 6.4	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas (juta US\$), 2022-2023	106
Gambar 6.5	Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang (juta US\$), 2022	107
Gambar 7.1	Realisasi PMDN Menurut Sektor Triwulan I - II 2023	117
Gambar 7.2	Realisasi PMDN Menurut Pulau Triwulan I - II 2023.....	120
Gambar 7.3	Realisasi PMA Menurut Sektor Triwulan I - II 2023	125
Gambar 7.4	Realisasi PMA Menurut Pulau Triwulan I - II 2023.....	127
Gambar 7.5	Realisasi PMA Menurut Negara Asal Triwulan I - II 2023...	130
Gambar 8.1	Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP) dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional, 2017-2021	141
Gambar 8.2	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (miliar US\$), 2015-2021	142

Gambar 8.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-o-y), 2020-2023.....	143
Gambar 8.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (ribu kunjungan), 2020-2023.....	144
Gambar 8.5	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Beberapa Kebangsaan (ribu kunjungan), 2022-2023	147
Gambar 8.6	Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Internasional (ribu orang), 2021-2023	148
Gambar 8.7	Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik (ribu orang), 2021-2023	149
Gambar 8.8	Rata-Rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), 2022	153
Gambar 9.1	Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023	174

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	-
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda desimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka estimasi	:	e
Angka diperbaiki	:	r
Angka sementara	:	x
Angka sangat sementara	:	xx
Angka sangat sangat sementara	:	xxx

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
2. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
3. Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) sejak bulan Januari 2020 mencakup sekitar 248-473 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 90 kota tahun 2018. Dalam penyajian IHK metode baru, jenis barang/jasa dikelompokkan menjadi 11 kelompok yang sebelumnya 9 kelompok pada metode lama.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti membatasi aktivitas di tempat kerja/perkantoran, kegiatan mengajar di sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah.
5. Covid-19 atau *Coronavirus Disease-2019* adalah penyakit yang disebabkan *Coronavirus* jenis baru (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/ SARS-COV2*) yang ditemukan pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 2019. *Coronavirus* pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.
6. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.
7. Sistem pengolahan adalah *Carry over* yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya, dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai transaksi bulan berikutnya.
8. Beberapa Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. *Harmonized System (HS)*, untuk keperluan pengenaan tariff.
 - b. *Standard International Trade Classification (SITC)*, penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. *International Standard Industrial Classification (ISIC)*, untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.

- d. *Broad Economic Category* (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
9. Sejak September 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung (*merger*) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
 10. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.
 11. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100 persen.
 12. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
 13. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
 14. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
 15. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
 17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
 18. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
 19. Produktivitas pekerja menurut provinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap provinsi.
 20. Produktivitas pekerja menurut kategori lapangan usaha diukur dengan membagi PDB pada masing-masing kategori lapangan usaha dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kategori lapangan usaha.

21. Penduduk yang bekerja menurut sektor formal/informal, ditentukan berdasarkan status dalam pekerjaan utama, yaitu;
- a. Sektor Formal: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
 - b. Sektor informal : Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

<https://www.bps.go.id>

SINGKATAN

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association South East Asia Nation</i>
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	: Badan Layanan Umum
BPUM	: Bantuan Produktif Usaha Mikro
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CBR	: <i>Cultivated Biological Resources</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
GWM	: Giro Wajib Minimum
HBU	: <i>Highest and Best Use</i>
HET	: Harga Eceran Tertinggi
IDR	: <i>Import Dependency Ratio</i>
IHK	: Indeks Harga Konsumen
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LNPRT	: Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PC-PEN	: Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	: Produk Domestik Bruto
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	: <i>Purchasing Managers Index</i>
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
SBH	: Survei Biaya Hidup
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SITC	: <i>Standard International Trade Classification</i>
SSR	: <i>Self Sufficiency Ratio</i>

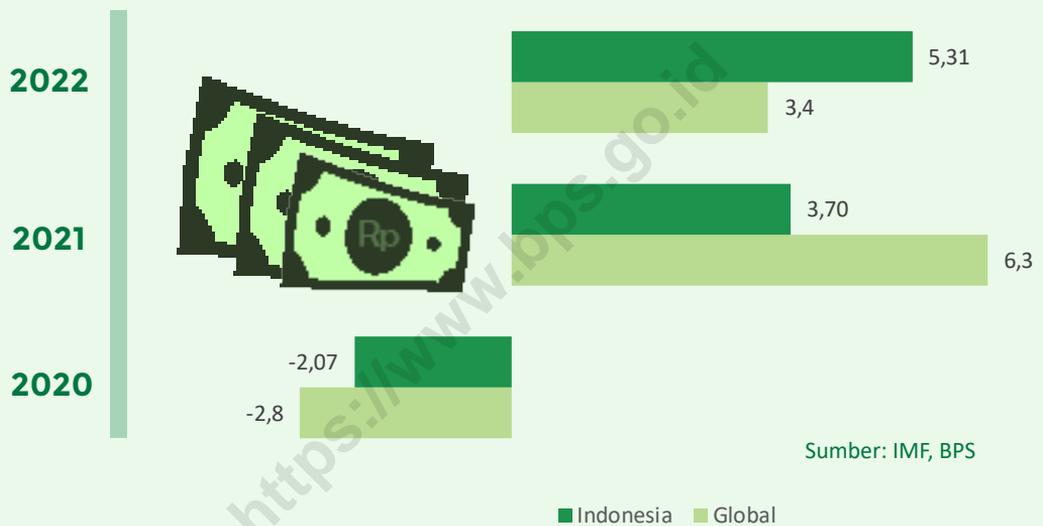
TDGDP	: <i>Tourism Direct Gross Domestic Product</i>
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKK	: Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	: Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	: Tim Pengendali Inflasi Pusat
TPK	: Tingkat Penghunian Kamar
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TTDI	: <i>Travel and Tourism Development Index</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UNWTO	: <i>United Nations World Tourism Organization</i>
UU	: Undang-Undang
Valas	: Valuta Asing (<i>Foreign Currency</i>)
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WFH	: <i>Work From Home</i>
WEO	: <i>World Economic Outlook</i>
WFO	: <i>Work From Office</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WNA	: Warga Negara Asing
Wisman	: Wisatawan Mancanegara

<https://www.bps.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

1

Perekonomian Indonesia tumbuh solid di tengah perlambatan ekonomi global pada 2022



Ekonomi tumbuh, kemiskinan dan pengangguran berkurang



Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Sumber: Susenas Maret, Sakernas Agustus (BPS)

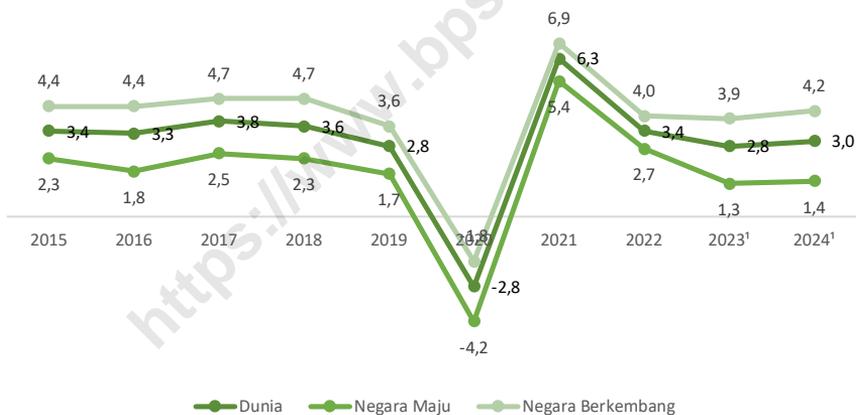


“Indonesia tumbuh solid di tengah perlambatan ekonomi global pada 2022 dengan ditopang surplus neraca perdagangan luar negeri yang melonjak signifikan”

<https://www.kemendag.go.id>

Ekonomi global pada 2022 mengalami perlambatan dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2023 ini. Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis *The International Monetary Fund* (IMF) pada April 2023, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 tercatat sebesar 3,4 persen atau turun 2,9 poin persen dibandingkan pada 2021 sebesar 6,3 persen. Harga pangan dan energi yang meningkat, gejolak sektor finansial, inflasi yang meningkat, dan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum kunjung usai menjadi faktor pemicunya. IMF memprediksi 2023 ini pertumbuhan dunia jauh lebih rendah yaitu 2,8 persen atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022. Hal ini disebabkan sektor finansial yang masih bergejolak dan kinerja negara maju yang masih lemah. Ekonomi di negara maju diperkirakan hanya tumbuh 1,3 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar 2,7 persen. Sejalan dengan negara maju, proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada 2023 juga melambat menjadi 3,9 persen dari tahun 2022 sebesar 4,0 persen (IMF, 2023).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2015-2024¹



Catatan: ¹ Angka proyeksi

Sumber: IMF

Di kawasan Asia, *The Asian Development Bank* (ADB) mencatat ekonomi negara berkembang pada 2022 melambat di level 4,2 persen setelah pada 2021 berhasil mencapai pertumbuhan 7,2 persen. Salah satu faktor utama selain tekanan global yaitu munculnya varian baru Covid-19 yang melanda Tiongkok pada April-Mei 2022. Pemerintah Tiongkok mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penguncian wilayah (*lockdown*) di beberapa area, termasuk kota-kota metropolitan. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, hal ini turut memengaruhi anjloknya perekonomian regional dan global pada 2022 secara keseluruhan. Pemulihan ekonomi di Tiongkok yang ditandai dengan pembukaan aktivitas ekonomi pasca *lockdown* diharapkan mendorong kenaikan ekonomi regional dan global pada 2023 ini. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia pada

2023 diproyeksikan meningkat menjadi 4,8 persen dengan ditopang kenaikan konsumsi, investasi, layanan swasta, dan bangkitnya sektor pariwisata (ADB, 2023).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara di Kawasan Asia (persen), 2021-2023¹

Pertumbuhan Ekonomi	2021	2022	2023 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)
Developing Asia	7,2	4,2	4,8
Asia Tenggara	3,5	5,6	4,7
- Brunei Darussalam	-1,6	-0,5	2,5
- Kamboja	3,0	5,2	5,5
- Indonesia	3,7	5,3	4,8
- Laos	2,3	2,5	4,0
- Malaysia	3,1	8,7	4,7
- Myanmar	-5,9	2,0	2,8
- Filipina	5,7	7,6	6,0
- Singapura	8,9	3,6	2,0
- Thailand	1,5	2,6	3,3
- Timor Leste	2,9	3,2	3,1
- Vietnam	2,6	8,0	6,5

Catatan: ¹angka proyeksi
Sumber: ADB, 2023

Di tengah anjloknya ekonomi global dan Asia pada 2022, ADB mencatat ekonomi di kawasan Asia Tenggara justru mengalami peningkatan. Dari sebelas negara Asia Tenggara, hanya Brunei Darussalam yang mengalami kontraksi ekonomi dan Singapura yang melambat pertumbuhannya, sementara yang lainnya mengalami pertumbuhan. Permintaan domestik yang kuat berhasil menopang pertumbuhan di Asia Tenggara (ADB, 2023).

Saat ekonomi dunia melambat, Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara menunjukkan performa ekonomi yang solid dengan tumbuh 5,31 persen pada 2022, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Indonesia pada 2022 utamanya ditopang dari Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi penopang utama dengan tumbuh 16,28 persen (BPS, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diproyeksikan semakin baik seiring kenaikan permintaan domestik yang meliputi konsumsi rumah tangga

dan investasi. Akses mobilitas yang semakin longgar akibat penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), prospek bisnis yang membaik, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang semakin lancar, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) berhasil mendorong ekonomi tumbuh positif (www.bi.go.id, 2023).

Ancaman Resesi

Isu terkini yang ramai dibahas terkait perekonomian yaitu resesi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan resesi adalah kondisi perekonomian negara yang memburuk, ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bernilai negatif dan pengangguran meningkat. Sementara itu dari laman web Kementerian Keuangan, resesi merupakan kondisi dimana terjadi penurunan aktivitas ekonomi akibat kontraksi PDB dalam dua kuartal atau lebih secara beruntun. Beberapa faktor yang menyebabkan resesi antara lain guncangan ekonomi yang mendadak, perubahan teknologi, inflasi tinggi, pengelolaan utang yang tidak sehat, peningkatan harga aset yang ekstrem, dan deflasi yang signifikan. Resesi yang terjadi dapat menimbulkan dampak seperti pengangguran tinggi akibat lapangan pekerjaan berkurang, investasi menurun, inflasi atau deflasi tidak terkendali, pendapatan menurun, dan konflik sosial. Guna mengatasi dampak resesi, diperlukan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dapat berupa pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif bagi sektor usaha yang terdampak. Sementara itu, kebijakan moneter diterapkan guna menjaga inflasi, kestabilan nilai tukar, dan memberikan stimulus berupa kredit perbankan bagi dunia usaha (kemenkeu.go.id).

IMF memproyeksikan 2023 ini ekonomi global masih melambat dan inflasi menurun. Ada risiko ekonomi akibat ketidakpastian sektor finansial seiring kebijakan bank sentral sejumlah negara yang menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Inflasi global berada di level 8,7 persen pada 2022 dan diproyeksikan melandai pada 2023 menjadi 7,0 persen seiring harga komoditas yang lebih rendah. Namun demikian, inflasi diperkirakan belum akan mencapai target semula sebelum tahun 2025 mendatang. Untuk menjaga agar ekonomi dunia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan dan risiko ke depan diperlukan kerjasama multilateral, termasuk memperkuat jaring pengaman keuangan global, mitigasi biaya perubahan iklim, dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi geoekonomi (IMF, 2023).

Ancaman resesi pada 2023 ini bukan tanpa alasan. Hal ini diindikasikan dari kenaikan harga energi dan suku bunga acuan yang tinggi dalam upaya meredam inflasi yang terus melambung. Ketegangan geopolitik berdampak pada disrupsi rantai pasokan global dan perekonomian domestik. Tantangan perubahan iklim juga menjadi ancaman yang dapat memengaruhi ekonomi, keuangan, dan ketahanan nasional. Terdapat beberapa faktor yang diprediksi dapat menyebabkan resesi pada 2023 ini antara lain pandemi Covid-19,

ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga acuan (kpbu.kemenkeu.go.id).

Dalam Laporan Perekonomian yang dirilis Bank Indonesia, disebutkan bahwa ekonomi global 2022 memburuk dipicu ketegangan geopolitik dunia yang menyebabkan risiko terjadi resesi meningkat dan inflasi menjadi tinggi. Terdapat beberapa masalah dan risiko yang jika terjadi terus-menerus dapat memberi tekanan pada ekonomi nasional dan memicu terjadinya resesi, yaitu ekonomi dunia yang melambat seiring invasi Rusia ke Ukraina dan risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa, inflasi tinggi di negara-negara maju, suku bunga acuan meningkat, mata uang US\$ menguat, dan penarikan dana investor global dari negara berkembang (Bank Indonesia, 2023).

Indonesia pernah mengalami resesi pada 2020-2021 saat pandemi Covid-19 pertama kali menghantam. Secara *q to q*, pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi dalam dua kuartal secara beruntun pada 2020 dan 2021 menjadikan Indonesia masuk pada fase resesi teknikal (www.dpr.go.id, 2020). Pada 2022 hingga triwulan II 2023 ini, pertumbuhan ekonomi kuartalan tercatat masih menunjukkan performa positif. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah potensial untuk menjaga pergerakan ekonomi dengan meningkatkan akses masyarakat pada layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan daya saing. Dengan demikian, roda perekonomian diharapkan semakin melejit karena mobilitas dan jalur perdagangan semakin lancar (kpbu.kemenkeu.go.id).

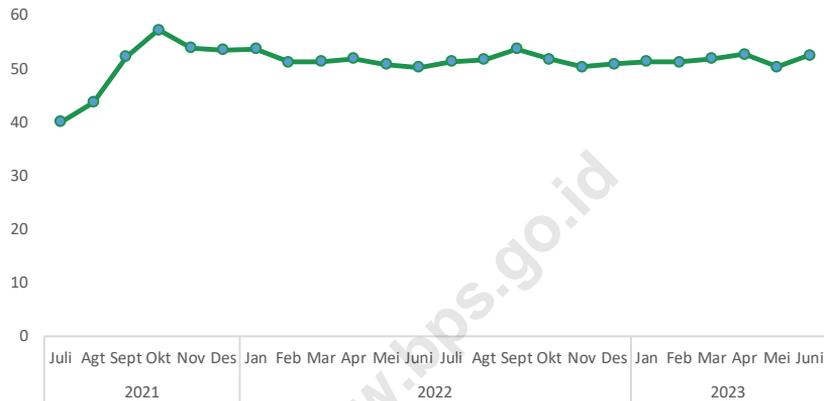
Indonesia Tumbuh Solid di Tengah Perlambatan Global

Di tengah ekonomi dunia yang melambat pada 2022, Indonesia berhasil mencatatkan konsistensi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,31 persen merupakan yang tertinggi sejak 2014. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu kategori Transportasi dan Pergudangan (19,87 persen), Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (11,97 persen), dan Industri Pengolahan (4,89 persen). Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDB berhasil tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah. Ekonomi menguat salah satunya ditopang dari surplus neraca perdagangan luar negeri. Pada 2022, surplus neraca perdagangan mencapai US\$ 54,46 miliar atau meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar US\$ 35,42 miliar. Surplus yang dicapai tahun 2022 ini juga merupakan yang tertinggi dibanding periode-periode sebelumnya. Kinerja ekspor mencatatkan pertumbuhan tertinggi diantara komponen PDB lainnya dengan tumbuh 16,28 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 5,64 persen dan aktivitas ekonomi yang meningkat ditunjukkan dari pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen (BPS, 2023).

Kontribusi permintaan domestik yang besar masih menjadi penggerak perekonomian utama dari sisi pengeluaran. Pengendalian inflasi agar

tetap berada di level moderat juga menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi. Ketersediaan pasokan dan harga pangan yang berhasil ditekan mendorong inflasi turun di penghujung 2022. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicabut pada 2022 juga turut mendorong mobilitas dan permintaan masyarakat semakin tinggi sehingga aktivitas ekonomi ikut terangkat (IMF, 2023).

Gambar 1.2 PMI Manufaktur Indonesia, 2021-2023



Sumber: IHS Markit

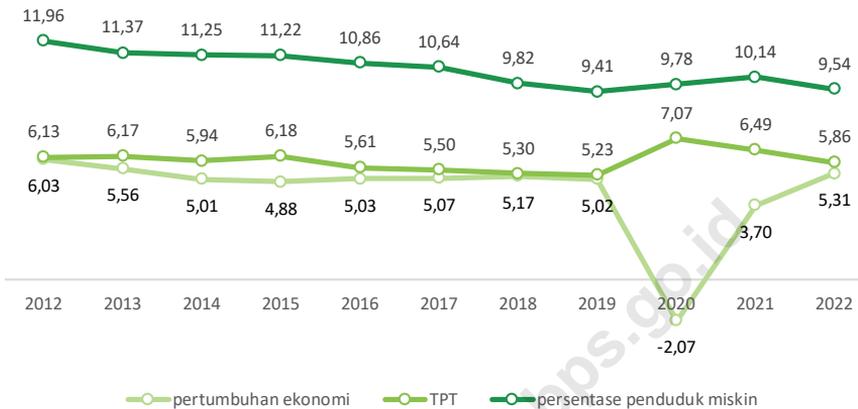
Akselerasi ekonomi domestik yang terjadi pada 2022 tercermin dari nilai *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur Indonesia di atas 50 atau berada di level ekspansif sejak September 2021. PMI Manufaktur yang berada di level ekspansif menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi ekonomi domestik dalam jangka pendek di tengah proyeksi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Permintaan domestik yang semakin solid mendorong dunia usaha untuk meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan (ekon.go.id, 2022).

Mobilitas yang semakin terbuka mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan berwisata sehingga meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Menguatnya sektor pariwisata ditunjukkan dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2022 sebesar 5,89 juta kunjungan atau tumbuh hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,56 juta kunjungan. Tingkat Penghunian Kamar pada hotel bintang juga mengalami peningkatan dari 36,26 pada 2021 menjadi 47,35 pada 2022 (bps.go.id).

Dari sisi spasial, seluruh provinsi berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada 2022. Ekonomi di Bali dan Papua Barat berhasil bangkit pasca terkontraksi pada tahun sebelumnya. Menurut pulau, kontribusi ekonomi dari luar Pulau Jawa semakin menunjukkan peningkatan. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi antara wilayah Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa

semakin menurun. Pada 2022 tercatat kontribusi ekonomi dari luar Pulau Jawa sebesar 43,52 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2021 sebesar 42,14 persen (BPS, 2023).

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2012-2022



Catatan: laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah angka sementara dan tahun 2022 adalah angka sangat sementara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah hasil Sakernas Agustus

Persentase Penduduk Miskin adalah hasil Susenas Maret

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 menunjukkan tren beberapa indikator ekonomi dan sosial dalam kurun waktu 2012-2022, seperti pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan pengangguran. Ekonomi Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 yang melanda pada 2020 silam. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik sejak 2021. Indikator sosial juga menunjukkan tren yang kembali membaik pada 2022 dibanding tahun sebelumnya, seperti persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang menurun.

Indikator makroekonomi lain seperti realisasi investasi juga menunjukkan peningkatan pada 2022. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp 552,77 triliun atau meningkat 23,64 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 45,61 miliar atau meningkat 46,67 persen dibandingkan 2021. Investasi yang meningkat menjadi cermin kepercayaan investor pada kondisi perekonomian Indonesia. Indikator lain yang juga menunjukkan performa positif yaitu pertumbuhan kredit perbankan dan perbankan syariah, termasuk kredit UMKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari sisi ekonomi digital, sistem pembayaran digital yang semakin mudah dengan ditopang ekonomi yang sedang berkembang mendorong perbankan digital naik pesat, salah satunya ditunjukkan dari nilai transaksi uang elektronik yang semakin tumbuh (www.bi.go.id, 2023).

Prospek Menghadapi Risiko Ekonomi 2023

IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,8 persen pada 2023 ini, melemah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang belum usai, disrupsi rantai pasokan global, kenaikan harga komoditas, lonjakan inflasi, dan kerentanan sektor perbankan yang ditandai dengan kenaikan suku bunga menjadi tantangan perekonomian global yang harus dihadapi pada 2023 ini. Pada 2024 mendatang, ekonomi global diperkirakan sedikit keluar dari tekanan dengan tumbuh 3,0 persen. Inflasi global diproyeksikan masih tinggi di kisaran 7,0 persen pada 2023 dan 4,9 persen pada 2024 akibat gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa.

Di tengah perlambatan ekonomi global, IMF memperkirakan Indonesia tetap solid dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di level 5,0 persen pada 2023 dan naik menjadi 5,1 persen pada 2024 mendatang. Proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2023 dan 2024 ditopang dari kenaikan kinerja perdagangan internasional yang menunjukkan surplus sejak Mei 2020. Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia kembali membuka ekonominya setelah lepas dari tekanan pandemi Covid-19 di kuartal keempat 2022. Indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen juga tinggi yang mencerminkan konsumsi rumah tangga terjaga. Sementara itu, inflasi diperkirakan berada di level 4,4 persen pada 2023 dan 3,0 persen pada 2024 (www.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia, 2023-2024

Indikator	Hasil Proyeksi	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi	BI ¹	4,5-5,3	4,7-5,5
	IMF ²	5,0	5,1
	ADB ³	4,8	5,0
Inflasi	BI ¹	3,0±1	2,5±1
	IMF ²	4,4	3,0
	ADB ³	4,2	3,0

Sumber: 1. Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2022, Bank Indonesia
 2. Publikasi *World Economic Outlook April 2023*, International Monetary Fund (IMF)
 3. Publikasi *Asian Development Outlook (ADO) 2023*, Asian Development Bank (ADB)

Indonesia masih cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi negara-negara lainnya, namun tetap perlu waspada dengan gejolak yang terjadi karena dapat memengaruhi permintaan negara-negara mitra dagang. ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia melambat di angka 4,8 persen pada 2023

karena ekspor barang yang tertahan akibat melemahnya ekonomi negara maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih sangat bergantung pada kondisi global. Ekonomi dapat tumbuh semakin baik saat pemulihan ekonomi di Tiongkok makin kuat, invasi Rusia ke Ukraina mereda, inflasi terjaga di level moderat, dan gejolak pasar keuangan terkendali. Hal yang tak kalah penting yaitu pandemi Covid segera berakhir dan tidak muncul varian baru lagi yang dapat mengganggu laju ekonomi global. Harga komoditas global semakin menurun dan kenaikan suku bunga kebijakan pada 2022 diproyeksikan menjadikan inflasi berada pada level moderat di angka 4,2 persen pada 2023 ini (ADB, 2023).

Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia mampu bertahan cukup baik dengan didukung hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing, dan pariwisata (Bank Indonesia, 2023). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,5-5,3 persen pada 2023 dan semakin menguat pada 2024 dikisaran 4,7-5,5 persen dengan ditopang konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga makin kuat seiring mobilitas yang diperlonggar. Investasi semakin solid dengan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi pariwisata, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara diperkirakan meningkat. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Transportasi diprediksi semakin menguat (www.bi.go.id, 2023).

Inflasi diproyeksikan menurun di level $3,0\pm 1$ persen pada 2023 dan $2,5\pm 1$ persen pada 2024. Bank Indonesia dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah bersinergi guna mengendalikan inflasi tetap berada di level yang terjaga. Terdapat 5 kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas yaitu: 1) kebijakan moneter dengan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi; 2) kebijakan makroprudensial dengan mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan UMKM; 3) kebijakan sistem pembayaran dengan perluasan digitalisasi sistem pembayaran; 4) kebijakan pendalaman pasar uang; 5) kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau dengan digitalisasi dan memperluas akses pasar domestik dan ekspor pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah (www.bi.go.id, 2023).

Ketahanan Pangan Guna Mendukung Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 perlu didukung dengan kebijakan strategis yang komprehensif di seluruh bidang, salah satunya bidang pangan. Undang-Undang Ketahanan Pangan No.18 tahun 2012 menyebutkan ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”. *Global*

Food Security Index menetapkan Indeks Ketahanan Pangan yang mencakup tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Dari sisi ketersediaan, indikator yang dapat digunakan antara lain produksi, stok, dan keseimbangan ekspor impor bahan pangan. Padi merupakan salah satu makanan pokok utama penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, data produksi padi dan ketersediaan stok beras menjadi hal yang penting. BPS mencatat luas panen padi di Indonesia menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2018-2021. Namun pada 2022, luas panen padi berhasil meningkat 0,39 persen menjadi 10,45 juta ha. Di sisi lain, produktivitas padi menunjukkan peningkatan yang cukup baik dengan tren yang terus naik sejak 2019. Sementara itu, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) yang merupakan hasil perkalian antara produktivitas dengan luas panen cenderung berfluktuatif selama 2018-2022. Guna meningkatkan produktivitas dan produksi padi dan pangan strategis lainnya, upaya yang dapat ditempuh antara lain penyediaan benih bermutu dan sertifikasi perbenihan, pengembangan kawasan *food estate*, dan manajemen kebijakan pangan (Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2022).

Gambar 1.4 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Indonesia, 2018-2022



Sumber: www.bps.go.id

Stok beras tercatat menunjukkan tren yang cenderung menurun selama 2019-2022, dari 2.021,97 ribu ton pada akhir 2019 menjadi 726,62 ribu ton pada akhir 2022. Stok yang menurun menggambarkan komoditas beras sudah beredar di masyarakat dan tidak lagi tersimpan dalam gudang yang berdampak pada penambahan ketersediaan beras per kapita (Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2022). Distribusi dan stok beras yang merata merupakan komponen penting dalam menjaga pasokan pangan. Hal ini dapat diupayakan dengan menjaga alur distribusi dari wilayah sentra produksi pangan ke wilayah lain yang defisit.

Hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) 2020-2022 mencatat beberapa komoditas pangan yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri antara lain beras, jagung, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam

ras, dan minyak goreng. Sementara itu, kebutuhan akan kedelai, gula pasir, cabai besar, bawang putih, dan daging sapi/kerbau masih didukung oleh impor. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan negara terhadap impor komoditas digunakan *Import Dependency Ratio* (IDR). Sementara itu, untuk mengetahui tingkat swasembada atau kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri digunakan *Self Sufficiency Ratio* (SSR). Tabel 1.2 menunjukkan SSR komoditas beras berada pada kisaran 93,78-98,88 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai SSR yang mendekati 100 berarti sebagian besar kebutuhan beras sudah mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara itu, nilai IDR yang berada di kisaran 1,13-6,23 persen menunjukkan besaran impor komoditas beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Untuk komoditas gandum, nilai IDR sebesar 100 persen dan SSR sebesar 0 persen berarti seluruh kebutuhan gandum nasional bergantung sepenuhnya pada impor. Begitu pula untuk komoditas kedelai dan gula yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Sebaliknya, untuk komoditas minyak goreng sawit dengan nilai SSR lebih dari 100 persen menunjukkan kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi sendiri, bahkan Indonesia mampu melakukan ekspor (Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1.3 Perkembangan IDR dan SSR Beberapa Komoditas Pangan, 2018-2022

Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beras					
- IDR	6,23	1,42	1,13	1,21	1,29
- SSR	93,78	98,59	98,88	98,81	98,72
Gandum					
- IDR	100	100	100	100	100
- SSR	0	0	0	0	0
Kedelai					
- IDR	80,01	86,43	89,57	92,25	88,68
- SSR	20,05	13,69	10,54	7,83	11,32
Gula					
- IDR	69,89	64,72	72,54	72,57	82,16
- SSR	30,17	35,33	28,01	31,52	19,72
Minyak goreng sawit					
- IDR	0	0	0	0	0
- SSR	190,16	155,97	181,37	330,62	157,57

Sumber: Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam aspek keterjangkauan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan seperti persentase pengeluaran makanan per kapita, pola konsumsi makanan, dan kemiskinan. Berdasarkan hasil Susenas Maret, persentase pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan menunjukkan tren yang meningkat sejak 2019 hingga 2022. Pada 2022, persentase pengeluaran untuk makanan mencapai 50,14 persen, lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rata-rata per kapita untuk bukan makanan. Jika ditinjau menurut kelompok makanan, tiga kelompok makanan dengan persentase pengeluaran tertinggi yaitu makanan jadi, tembakau dan sirih, baru kemudian padi-padian. Ketahanan pangan suatu wilayah salah satunya tergambar dari konsumsi pangan pokok yang relatif besar. Pangsa pengeluaran untuk makanan pokok berupa padi-padian yang menempati peringkat ketiga dibawah tembakau menjadi indikasi perlunya perbaikan kondisi sosial di masyarakat karena hal ini dapat memberi dampak tidak langsung terhadap ketahanan pangan (Kementerian Pertanian, 2022).

Tabel 1.4 Perkembangan Beberapa Indikator Terkait Pangan, 2019-2022

Komoditas	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stok Beras (Akhir Tahun) dalam ribu ton	2 021,97	1 026,55	981,57	726,62
Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan	49,14	49,22	49,25	50,14
Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari (kkal/kapita/hari)	2 120,52	2 112,06	2 143,21	2 079,09
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari (gram/kapita/hari)	62,13	61,98	62,28	62,21
<i>Prevalence of Undernourishment</i>	7,63	8,34	8,49	10,21
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	5,42	5,12	4,79	4,85

Sumber: BPS, Badan Pangan Nasional

Dalam mencerminkan aspek kualitas dan keamanan pangan, konsumsi energi dan protein dapat menjadi salah satu indikator yang mencerminkan aspek tersebut. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, secara nasional konsumsi energi per kapita per hari sebesar 2.079,09 kkal atau menurun dibanding 2021 sebesar 2.143,21 kkal. Nilai konsumsi energi per kapita per hari pada 2022 berada di bawah standar kecukupan gizi yang dianjurkan pemerintah berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2019 yaitu 2.100 kkal/

kapita/hari. Sementara itu, konsumsi protein penduduk Indonesia secara rata-rata pada 2022 sebesar 62,21 gram, lebih besar dari standar kecukupan gizi yang ditetapkan sebesar 57 gram/kapita/hari. Selain itu, aspek kualitas dan keamanan pangan dapat pula dilihat dari indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. Indikator PoU menggambarkan proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan kenaikan PoU selama 2020-2022. Pada 2022, tercatat 10,21 persen penduduk dengan konsumsi makanan kurang dari standar kecukupan energi. Dengan kata lain, sekitar 10 dari 100 orang tidak mampu mencukupi kebutuhan energi minimum. Sejalan dengan PoU, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat mengalami peningkatan dari 4,79 persen pada 2021 menjadi 4,85 persen pada 2022. Kenaikan ini menggambarkan semakin banyak penduduk yang mengalami kerawanan pangan pada level sedang atau berat.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi salah satu indikator proksi untuk melihat gambaran ketahanan pangan suatu wilayah. Disparitas antarwilayah terkait kerawanan pangan masih terjadi. Wilayah bagian timur Indonesia memiliki IKP dengan nilai yang cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah barat. Hal ini disebabkan kebutuhan pangan yang lebih tinggi dibanding produksi yang mampu dihasilkan di wilayahnya, tingginya prevalensi balita *stunting*, keterbatasan akses air bersih, dan persentase penduduk miskin masih tinggi (Badan Pangan Nasional, 2022).

Sejatinya, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang terkait dengan sektor pertanian. Pertanian adalah sektor vital yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sebab, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang bertahan dari gempuran pandemi pada 2020 lalu saat hampir seluruh lapangan usaha terkontraksi. Sektor pertanian juga menempati peringkat ketiga sebagai kontributor utama penopang perekonomian nasional setelah sektor industri dan perdagangan. Sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar diantara lapangan usaha lainnya. Untuk mendukung perencanaan di bidang pangan, pada 2023 ini BPS menyelenggarakan Sensus Pertanian. Sensus Pertanian 2023 bertujuan memperoleh data pokok pertanian nasional, petani gurem, indikator SDGs pertanian, petani berskala kecil, dan data geospasial. Komitmen dan kerjasama antar seluruh *stakeholder* terkait bersama masyarakat diperlukan untuk menyukseskan Sensus Pertanian 2023 guna mencapai ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

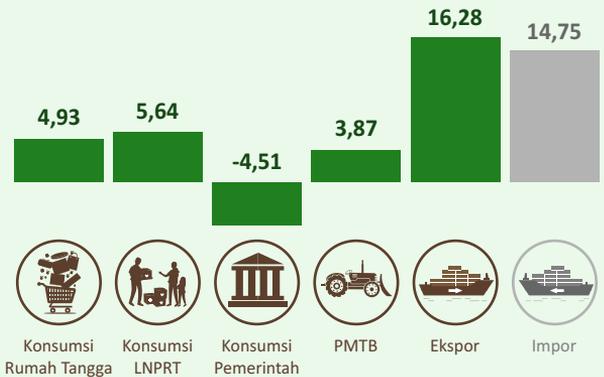
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL



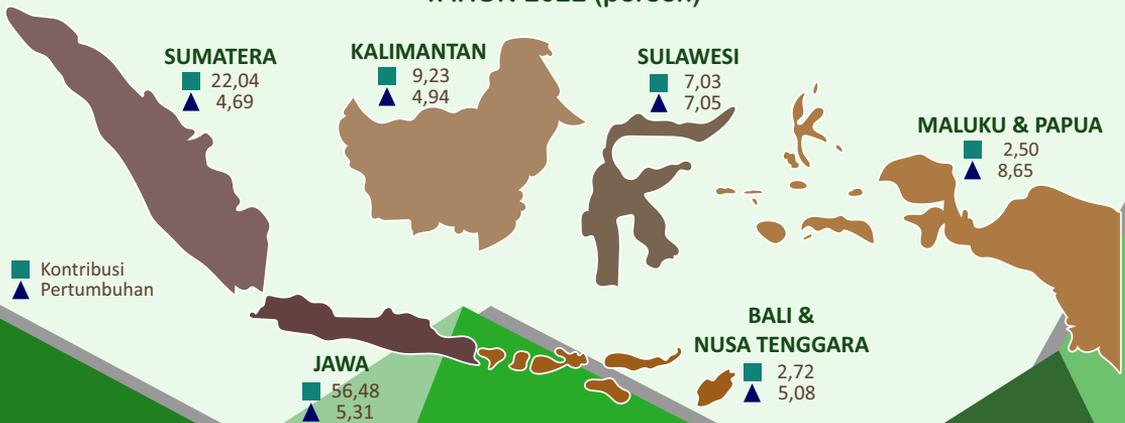
PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA TAHUN 2022 (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2022 (persen)



KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PDB MENURUT PULAU TAHUN 2022 (persen)





“Pemerintah harus mengambil keputusan dengan sangat matang. Memutus mata rantai penyebaran virus dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi adalah hal yang kontradiktif.”



<https://www.kps.go.id>

Sudah lewat tiga tahun sejak pandemi melanda seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan resesi hampir di seluruh negara di dunia. *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi terjadi penurunan PDB global pada tahun 2020 sebesar 3 persen dengan total nilai 9 miliar USD. Angka ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan PDB dari negara Jepang dan Jerman yang keduanya dijumlahkan. Indonesia sendiri tercatat mengalami penurunan PDB mencapai 2,07 persen.

Pandemi yang terjadi saat itu memberikan *multiplier effect* yang sangat luas dalam kehidupan. Krisis kesehatan, krisis keuangan, melonjaknya harga barang yang disebabkan terhambatnya distribusi, serta meningkatnya pengangguran merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pada situasi yang sulit tersebut, pemerintah harus mengambil keputusan dengan sangat matang. Memutus mata rantai penyebaran virus dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi adalah hal yang kontradiktif.

Pada tahun 2020, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kontraksi. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul saat pandemi berlangsung. Hal ini ditandai oleh menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2020. Selain itu, upaya pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus dengan melakukan pembatasan mobilitas juga menyebabkan sektor ini semakin terpukul. Kondisi ini menyebabkan efek domino pada beberapa lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, yaitu transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Perlahan namun pasti, Indonesia mulai mencoba keluar dari jurang resesi. Berbagai paket kebijakan melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dirumuskan sebagai upaya untuk memastikan perekonomian Indonesia segera bangkit. Hasilnya, pada tahun 2021 ekonomi Indonesia berhasil pulih dengan mencatat pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Di tahun berikutnya, pemerintah pun terus mendorong akselerasi program PEN. Untuk memastikan akselerasi program tersebut berjalan lancar sejak awal tahun 2022, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan *front loading* melalui program PEN (Airlangga, 2022). Indonesia akhirnya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen di tahun 2022. Walau demikian, hasil tersebut tidak bisa membuat Indonesia berpuas diri, karena hingga saat ini perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian. Diperlukan strategi dan pengawasan yang baik demi meningkatkan perekonomian yang tangguh dan stabil di masa depan.

Pembatasan Aktivitas Sosial Melonggar, Seluruh Sektor Ekonomi Bangkit

Jika dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2022. Meskipun demikian, tidak semua sektor lapangan usaha mengalami percepatan laju pertumbuhan di tahun 2022. Dari 17 sektor lapangan usaha, terdapat 4 sektor

lapangan usaha yang justru mengalami perlambatan di tahun 2022, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor *real estate*; serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Namun, kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan stabil di tahun 2022.

Sebagai salah satu sektor yang terdampak paling parah selama pandemi, transportasi dan pergudangan mampu bangkit dan pulih dengan sangat impresif. Sektor ini tercatat mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 19,87 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,02 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen. Tingginya laju pertumbuhan pada sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2022 tidak terlepas dari berbagai kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah. Adanya pelanggaran kebijakan syarat perjalanan serta penanganan manajemen rekayasa lalu lintas pada masa mudik lebaran juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan yang positif (Budi Karya Sumadi, 2022). Tingginya laju pertumbuhan pada sektor ini turut meningkatkan optimisme pada sektor logistik dan pergudangan. Penyedia jasa logistik dapat memanfaatkan peluang ini terutama pada sektor lapangan usaha lain yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, penyedia jasa logistik perlu meningkatkan kapabilitas melalui standarisasi proses, teknologi dan sumber daya manusia, serta perlu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar penyedia jasa, pengguna, dan operator fasilitas logistik, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan *value added services*, dan meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan rantai pasok komoditas secara *end-to-end* (Setijadi, 2023).

Sejalan dengan sektor transportasi dan pergudangan, efek domino pemulihan ekonomi juga dirasakan oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,97 persen pada tahun 2022 dan memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 2,41 persen. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh adanya kebijakan pelanggaran aktivitas masyarakat dan mulai dibukanya tempat wisata di Indonesia. Sektor ini juga merupakan salah satu sektor yang paling terdampak saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Terpuruknya sektor akomodasi dan makan minum pada masa pandemi menyebabkan para pelaku usaha harus mencari cara lain untuk bertahan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan aplikasi pemesanan makanan *online*.

Selanjutnya, sektor usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi berikutnya yaitu sektor jasa lainnya. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,47 persen pada tahun 2022 dan berkontribusi sebesar 1,81 persen terhadap PDB. Pertumbuhan pada sektor ini dapat dilihat dari mulai beroperasinya kembali berbagai kegiatan masyarakat di tahun 2022 seperti mulai diselenggarakannya aktivitas konser musik dan pertunjukan bagi masyarakat. Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) mencatat terdapat 100 acara festival musik baik level nasional

maupun level daerah. APMI juga memproyeksikan akan terjadi peningkatan sebesar dua kali lipat di tahun 2023 (Kompas, 2023). PDB sektor jasa lainnya pada tahun 2022 bahkan lebih tinggi jika dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, PDB sektor ini memiliki laju pertumbuhan sebesar 7,20 persen.

Sementara itu, jika melihat pada sektor yang memiliki kontribusi paling dominan (*leading sector*) seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, dan sektor konstruksi juga mengalami laju pertumbuhan yang positif. Sektor industri pengolahan tercatat mengalami pertumbuhan dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 4,89 persen dengan kontribusi sebesar 18,34 persen pada tahun 2022. Laju pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya subsektor industri makanan dan minuman sebesar 4,90 persen yang utamanya didorong oleh peningkatan permintaan beberapa komoditas makanan dan minuman di dalam negeri, untuk memenuhi permintaan ekspor CPO, dan peningkatan subsektor industri logam dasar sebesar 14,8 persen yang didorong peningkatan kapasitas produksi di sentra tambang ditunjang dengan membaiknya harga komoditas di pasar ekspor.

Kemudian pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,52 persen dan memiliki kontribusi 12,85 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor dan peningkatan pasokan barang domestik dan impor serta peningkatan kunjungan ke tempat perbelanjaan seiring dengan pelonggaran PPKM.

Tabel 2.1 PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022

Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 012 742,8	2 115 494,5	2 254 541,3	2 428 900,5
	12,71	13,70	13,28	12,40
B. Pertambangan dan Penggalan	1 149 913,5	993 541,9	1 523 650,1	2 393 390,9
	7,26	6,43	8,97	12,22
C. Industri Pengolahan	3 119 593,8	3 068 041,7	3 266 905,5	3 591 774,7
	19,70	19,87	19,24	18,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	185 115,3	179 741,6	190 047,2	204 673,7
	1,17	1,16	1,12	1,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10 736,1	11 305,4	12 026,1	12 537,1
	0,07	0,07	0,07	0,06
F. Konstruksi	1 701 741,2	1 652 659,6	1 771 726,7	1 912 978,7
	10,75	10,70	10,44	9,77

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 060 268,9	1 993 988,7	2 199 934,9	2 516 591,5
	13,01	12,91	12,96	12,85
H. Transportasi dan Pergudangan	881 505,4	689 552,4	719 610,3	983 530,1
	5,57	4,47	4,24	5,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	440 207,7	394 055,0	412 251,1	472 064,6
	2,78	2,55	2,43	2,41
J. Informasi dan Komunikasi	626 532,6	695 963,3	748 802,9	812 807,5
	3,96	4,51	4,41	4,15
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	671 433,8	696 072,9	736 187,2	809 356,7
	4,24	4,51	4,34	4,13
L. Real Estat	439 455,9	453 780,9	468 221,7	488 311,2
	2,78	2,94	2,76	2,49
M, N. Jasa Perusahaan	304 285,5	294 255,5	301 085,2	341 427,3
	1,92	1,91	1,77	1,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	571 584,1	585 960,1	586 703,0	605 117,3
	3,61	3,79	3,46	3,09
P. Jasa Pendidikan	522 354,2	551 227,1	557 656,1	566 624,5
	3,30	3,57	3,28	2,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174 689,0	201 480,4	227 222,8	236 166,8
	1,10	1,30	1,34	1,21
R, S, T, U. Jasa lainnya	309 002,0	302 588,1	312 188,4	354 181,2
	1,95	1,96	1,84	1,81
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	15 181 161,8	14 879 709,1	16 288 760,5	18 730 434,3
	95,89	96,35	95,95	95,62
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	651 495,4	563 644,1	687 930,3	858 011,3
	4,11	3,65	4,05	4,38
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	15 832 657,2	15 443 353,2	16 976 690,8	19 588 445,6
	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, sektor pertanian tercatat memiliki laju pertumbuhan sebesar 2,25 persen pada tahun 2022 dan berkontribusi sebesar 12,40 persen terhadap PDB. Meskipun memiliki laju pertumbuhan yang relatif kecil, kinerja sektor ini dapat dikatakan cukup baik selama masa pandemi Covid-19 dan menjadi salah satu sektor yang tidak mengalami kontraksi selama masa pandemi Covid-19 (2019-2022). Pertumbuhan sektor pertanian disebabkan karena adanya peningkatan pada beberapa subsektor, yaitu subsektor peternakan (6,24 persen), subsektor tanaman hortikultura (4,22 persen), dan subsektor tanaman pangan (0,08 persen).

Selain itu, pada tahun 2022 terdapat beberapa sektor yang laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021. Pada Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami perlambatan yang cukup besar. Sektor ini tercatat mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 10,45 persen, kemudian pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 2,74 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan, kinerja laju pertumbuhan pada sektor ini dapat dikatakan melambat. Perlambatan ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui penanganan pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2022 jumlah kasus terinfeksi Covid-19 sudah mulai berkurang. Laju pertumbuhan yang cukup besar pada tahun sebelumnya disebabkan karena adanya peningkatan yang cukup besar terhadap obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pasien yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, berbagai kebijakan melalui belanja pemerintah seperti pemberian insentif dan pengadaan alat kesehatan juga turut serta mendorong laju pertumbuhan pada sektor ini.

Tabel 2.2 PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022

Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 354 399,1	1 378 398,9	1 404 190,9	1 435 853,3
	3,61	1,77	1,87	2,25
B. Pertambangan dan Penggalian	806 206,2	790 475,2	822 099,5	858 146,6
	1,22	-1,95	4,00	4,38
C. Industri Pengolahan	2 276 667,8	2 209 920,3	2 284 821,7	2 396 603,0
	3,80	-2,93	3,39	4,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	111 436,7	108 826,4	114 861,1	122 451,9
	4,04	-2,34	5,55	6,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9 004,9	9 449,3	9 919,3	10 240,1
	6,83	4,94	4,97	3,23
F. Konstruksi	1 108 425,0	1 072 334,8	1 102 517,7	1 124 725,2
	5,76	-3,26	2,81	2,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 440 185,7	1 385 651,2	1 449 831,4	1 529 885,6
	4,60	-3,79	4,63	5,52
H. Transportasi dan Pergudangan	463 125,9	393 418,9	406 169,3	486 874,9
	6,38	-15,05	3,24	19,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	333 304,6	299 122,4	310 748,6	347 943,8
	5,79	-10,26	3,89	11,97
J. Informasi dan Komunikasi	589 536,1	652 062,9	696 506,1	750 389,2
	9,42	10,61	6,82	7,74

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	443 093,1	457 486,5	464 637,7	473 615,0
	6,61	3,25	1,56	1,93
L. Real Estat	316 901,1	324 259,4	333 282,9	339 014,9
	5,76	2,32	2,78	1,72
M, N. Jasa Perusahaan	206 936,2	195 671,1	197 106,7	214 399,0
	10,25	-5,44	0,73	8,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365 538,8	365 446,0	364 251,4	373 439,1
	4,66	-0,03	-0,33	2,52
P. Jasa Pendidikan	341 349,9	350 272,8	350 662,6	352 716,2
	6,30	2,61	0,11	0,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127 487,9	142 227,3	157 085,3	161 384,9
	8,66	11,56	10,45	2,74
R, S, T, U. Jasa lainnya	205 011,4	196 608,9	200 773,2	219 777,8
	10,57	-4,10	2,12	9,47
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	10 498 610,4	10 331 632,3	10 669 465,4	11 197 460,5
	4,96	-1,59	3,27	4,95
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	450 545,0	391 367,0	450 612,5	512 937,3
	6,52	-13,13	15,14	13,83
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	10 949 155,4	10 722 999,3	11 120 077,9	11 710 397,8
	5,02	-2,07	3,70	5,31

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor berikutnya yang laju pertumbuhannya mengalami perlambatan pada tahun 2022 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 laju pertumbuhannya hanya sebesar 3,23 persen. Meskipun demikian, sektor ini juga termasuk salah satu sektor yang *resilience* selama masa pandemi Covid-19. Terbukti selama masa pandemi sektor ini tidak mengalami kontraksi, justru menunjukkan laju pertumbuhan yang positif.

Selain itu, terdapat salah satu sektor lapangan usaha yang termasuk dalam *leading sector* namun mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu sektor konstruksi. Pada tahun 2021, sektor konstruksi tercatat memiliki laju pertumbuhan sebesar 2,81 persen, kemudian laju pertumbuhannya menurun menjadi 2,01 persen pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya mengalami perlambatan, sektor ini masih menunjukkan kinerja terbaiknya selama pandemi. Selain itu, sektor lain yang mengalami perlambatan adalah sektor *real estate*. Sektor ini mampu tumbuh sebesar 2,78 persen pada tahun 2021, dan 1,72 persen pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, sektor *real*

estate diwarnai dinamika yang beragam. Adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan pasokan dunia terhambat, akibatnya harga komoditas melonjak tinggi (CNBC Indonesia, 2023). Meskipun demikian, sektor *real estate* tidak mengalami kontraksi dan cukup *resilience* selama masa pandemi Covid-19.

Konsumsi Lancar, Ekonomi Berputar

PDB menurut pengeluaran menunjukkan besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan dalam perekonomian. Berdasarkan Tabel 2.3, dapat dilihat bahwa lima dari enam komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022. Kelima komponen tersebut adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit (LNPR), pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, serta ekspor dan impor barang dan jasa. Sementara komponen yang mengalami pertumbuhan negatif adalah pengeluaran konsumsi pemerintah.

Tabel 2.3 PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2019-2022

PDB Penggunaan	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5 936 399,47	5 780 223,44	5 896 706,85	6 187 190,40
	5,04	-2,63	2,02	4,93
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2 179 119,14	2 190 250,95	2 221 751,49	2 297 792,16
	5,16	0,51	1,44	3,42
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	230 920,53	221 190,80	221 062,12	230 526,59
	4,27	-4,21	-0,06	4,28
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	796 376,16	814 540,29	832 371,64	855 635,10
	4,66	2,28	2,19	2,79
d. Kesehatan dan Pendidikan	417 643,65	430 533,98	437 835,19	448 376,77
	6,60	3,09	1,70	2,41
e. Transportasi dan Komunikasi	1 474 685,11	1 333 608,96	1 368 571,38	1 496 917,92
	4,78	-9,57	2,62	9,38
f. Restoran dan Hotel	561 967,47	516 212,06	536 203,53	571 463,69
	5,96	-8,14	3,87	6,58
g. Lainnya	275 687,39	273 886,40	278 911,50	286 478,17
	3,09	-0,65	1,83	2,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	136 027,41	130 306,47	132 411,92	139 878,83
	10,62	-4,21	1,62	5,64
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	855 962,99	874 145,57	911 198,14	870 093,19
	3,27	2,12	4,24	-4,51

a. Konsumsi Kolektif	531 495,22	527 045,91	522 803,64	520 459,06
	4,62	-0,84	-0,80	-0,45
b. Konsumsi Individu	324 467,77	347 099,65	388 394,50	349 634,14
	1,12	6,98	11,90	-9,98
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3 597 664,13	3 419 181,61	3 549 218,80	3 686 573,75
	4,45	-4,96	3,80	3,87
a. Bangunan	2 687 303,09	2 585 622,97	2 645 502,22	2 669 608,59
	5,37	-3,78	2,32	0,91
b. Mesin dan Perlengkapan	387 001,88	342 342,23	382 273,44	468 068,04
	4,76	-11,54	11,66	22,44
c. Kendaraan	193 520,20	168 223,66	187 893,93	207 182,85
	-4,12	-13,07	11,69	10,27
d. Peralatan Lainnya	58 113,51	51 979,25	56 790,14	56 630,20
	-3,14	-10,56	9,26	-0,28
e. CBR	189 751,10	195 075,90	197 336,28	201 522,65
	5,05	2,81	1,16	2,12
f. Produk Kekayaan Intelektual	81 974,36	75 937,60	79 422,79	83 561,41
	-0,23	-7,36	4,59	5,21
5. Perubahan Inventori	129 953,84	51 334,13	62 709,09	70 749,22
	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 275 488,26	2 083 941,85	2 458 032,27	2 858 316,40
	-0,48	-8,42	17,95	16,28
a. Barang	2 026 847,84	1 956 816,47	2 347 224,78	2 685 386,46
	-0,57	-3,46	19,95	14,41
a.1. Barang Non-migas	1 829 521,44	1 768 806,92	2 127 473,21	2 473 851,81
	1,35	-3,32	20,28	16,28
a.b. Barang migas	197 326,40	188 009,55	219 751,57	211 534,65
	-15,40	-4,72	16,88	-3,74
b. Jasa	248 640,42	127 125,38	110 807,50	172 929,95
	0,29	-48,87	-12,84	56,06
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 046 244,20	1 686 003,79	2 105 237,66	2 415 760,07
	-7,13	-17,60	24,87	14,75
a. Barang	1 756 455,93	1 498 606,17	1 897 577,90	2 133 850,93
	-8,31	-14,68	26,62	12,45
a.1. Barang Non-migas	1 485 562,23	1 271 236,30	1 627 636,87	1 814 458,38
	-6,27	-14,43	28,04	11,48
a.b. Barang migas	270 893,69	227 369,87	269 941,03	319 392,55
	-18,07	-16,07	18,72	18,32
b. Jasa	289 788,27	187 397,62	207 659,76	281 909,14
	0,73	-35,33	10,81	35,76
Diskrepani Statistik	63 903,51	69 870,03	215 038,49	313 356,08
	-	-	-	-

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	10 949 155,40	10 722 999,30	11 120 077,90	11 710 397,80
	5,02	-2,07	3,70	5,31

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Hingga saat ini, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh nilai PDB merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tahun 2022, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat mengalami laju pertumbuhan sebesar 4,93 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 51,87 persen. Pulihnya mobilitas mendorong aktivitas dunia usaha dan berdampak pada meningkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh kenaikan PPh Pasal 21 sebesar 18,36 persen. Membaiknya pendapatan masyarakat mendorong penguatan seluruh kelompok konsumsi, utamanya pada kelompok konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel.

Selanjutnya komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) memiliki kontribusi terbesar kedua. Komponen ini didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Komponen PMTB memiliki laju pertumbuhan sebesar 3,87 persen dengan kontribusi sebesar 29,08 persen pada tahun 2022. Dengan kontribusi yang besar tersebut, komponen ini juga memiliki andil yang cukup besar terhadap struktur perekonomian nasional. Jika dilihat mundur ke belakang, pertumbuhan pada komponen ini belum kembali ke level pra-pandemi. Pertumbuhan pada komponen ini dipengaruhi oleh seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin dan kendaraan. Pertumbuhan modal pemerintah meningkat jika dibandingkan tahun 2021 baik pemerintah pusat maupun daerah, utamanya untuk jenis mesin dan peralatan serta jalan, irigasi dan jaringannya.

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari aktivitas perdagangan internasional. Dalam struktur perekonomian, aktivitas ini dicatat melalui komponen ekspor impor barang dan jasa. Komponen ini juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB. Pada tahun 2022, komponen ekspor berkontribusi sebesar 24,49 persen, sedangkan komponen pengurang impor berkontribusi sebesar 20,90 persen. Berdasarkan laju pertumbuhannya, ekspor dan impor memiliki pertumbuhan masing-masing sebesar 16,28 persen dan 14,75 persen di tahun 2022. Kinerja ekspor tumbuh impresif meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Indonesia masih merasakan *windfall* ekspor yang masih berlanjut meskipun cenderung melemah. Hal ini karena harga beberapa komoditas unggulan mengalami penurunan, terutama minyak kelapa sawit walaupun nilai dan volume ekspor mengalami peningkatan. Selain itu, dilonggarkannya kembali kebijakan keimigrasian untuk wisata turut mendorong jumlah wisatawan

mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Lonjakan jumlah wisatawan mancanegara ini turut mendorong pertumbuhan ekspor jasa.

Komponen berikutnya adalah pengeluaran konsumsi pada lembaga non profit (LNPRT). LNPRT merupakan lembaga yang dibentuk oleh rumah tangga atau kelompok masyarakat, yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Meskipun kontribusi terhadap PDB tidak terlalu besar (1,17 persen), komponen ini memiliki kinerja yang cukup baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,64 persen di tahun 2022.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi di tahun 2022. Komponen ini mencatat penurunan pengeluaran sebesar 4,51 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 7,66 persen. Hal ini diakibatkan oleh penurunan realisasi belanja barang dan jasa serta realisasi bantuan sosial. Meskipun begitu, komponen ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 saat awal pandemi Covid-19 dengan kenaikan pengeluaran sebesar 2,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena kebijakan yang diambil pemerintah saat itu bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 2.4 PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2019-2022

PDB Penggunaan	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	8 965 837,39	8 899 917,58	9 236 019,60	10 160 355,66
	56,63	57,63	54,40	51,87
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3 529 891,68	3 669 993,47	3 803 180,59	4 171 990,17
	22,30	23,76	22,40	21,30
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	321 705,24	316 446,60	319 915,27	338 936,26
	2,03	2,05	1,88	1,73
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	1 144 776,68	1 186 899,96	1 223 129,69	1 296 545,46
	7,23	7,69	7,20	6,62
d. Kesehatan dan Pendidikan	616 504,64	652 831,63	677 159,59	708 915,58
	3,89	4,23	3,99	3,62
e. Transportasi dan Komunikasi	2 042 268,50	1 796 642,85	1 861 951,74	2 166 113,95
	12,90	11,63	10,97	11,06
f. Restoran dan Hotel	903 979,63	853 216,32	909 182,31	1 006 430,51
	5,71	5,52	5,36	5,14
g. Lainnya	406 711,02	423 886,75	441 500,39	471 423,74
	2,57	2,74	2,60	2,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206 094,49	201 451,56	207 916,21	228 958,27
	1,30	1,30	1,22	1,17

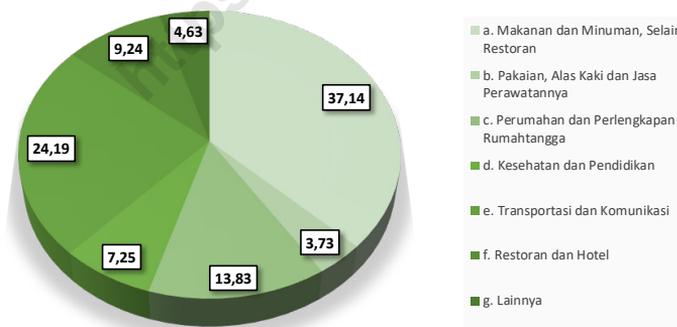
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 394 615,06	1 491 171,66	1 569 495,87	1 500 692,73
	8,81	9,66	9,25	7,66
a. Konsumsi Kolektif	868 092,34	897 223,32	902 498,04	900 684,15
	5,48	5,81	5,32	4,60
b. Konsumsi Individu	526 522,72	593 948,34	666 997,83	600 008,58
	3,33	3,85	3,93	3,06
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5 121 371,35	4 897 049,69	5 227 853,94	5 697 279,18
	32,35	31,71	30,79	29,08
a. Bangunan	3 841 446,57	3 719 738,79	3 933 012,08	4 209 054,53
	24,26	24,09	23,17	21,49
b. Mesin dan Perlengkapan	543 300,59	477 468,14	535 062,48	660 827,07
	3,43	3,09	3,15	3,37
c. Kendaraan	253 821,43	223 484,72	258 006,92	297 345,02
	1,60	1,45	1,52	1,52
d. Peralatan Lainnya	84 941,32	75 728,97	84 536,96	85 676,41
	0,54	0,49	0,50	0,44
e. CBR	278 745,22	282 565,06	292 469,93	307 720,41
	1,76	1,83	1,72	1,57
f. Produk Kekayaan Intelektual	119 116,22	118 064,01	124 765,59	136 655,74
	0,75	0,76	0,73	0,70
5. Perubahan Inventori	226 922,80	97 857,67	111 142,96	129 369,69
	1,43	0,63	0,65	0,66
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 943 532,86	2 676 513,53	3 634 390,87	4 797 690,12
	18,59	17,33	21,41	24,49
a. Barang	2 525 395,98	2 464 004,44	3 440 204,33	4 460 070,38
	15,95	15,96	20,26	22,77
a.1. Barang Non-migas	2 344 034,79	2 335 820,77	3 249 263,02	4 197 494,54
	14,81	15,13	19,14	21,43
a.b. Barang migas	181 361,19	128 183,67	190 941,32	262 575,84
	1,15	0,83	1,12	1,34
b. Jasa	418 136,88	212 509,09	194 186,53	337 619,74
	2,64	1,38	1,14	1,72
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3 013 944,16	2 415 495,97	3 189 857,07	4 094 152,81
	19,04	15,64	18,79	20,90
a. Barang	2 479 523,51	2 056 090,61	2 781 637,45	3 460 659,74
	15,66	13,31	16,39	17,67
a.1. Barang Non-migas	2 162 656,21	1 850 263,66	2 419 448,70	2 871 567,15
	13,66	11,98	14,25	14,66
a.b. Barang migas	316 867,29	205 826,94	362 188,75	589 092,58
	2,00	1,33	2,13	3,01

b. Jasa	534 420,66	359 405,36	408 219,62	633 493,08
	3,38	2,33	2,40	3,23
Diskrepansi Statistik	-11 772,58	-405 112,52	179 728,43	1 168 252,77
	-0,07	-2,62	1,06	5,96
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	15 832 657,20	15 443 353,20	16 976 690,80	19 588 445,60
	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilakukan analisis berdasarkan subkomponennya, Gambar 2.1 menunjukkan kontribusi pengeluaran terbesar di komponen konsumsi rumah tangga adalah subkomponen makanan dan minuman selain restoran. Di tahun 2022 subkomponen ini memiliki kontribusi sebesar 37,14 persen, setelah itu disusul subkomponen transportasi dan komunikasi (24,19 persen), perumahan dan perlengkapan rumah tangga (13,83 persen), restoran dan hotel (9,24 persen), kesehatan dan pendidikan (7,25 persen), lainnya (4,63 persen), dan terakhir adalah subkomponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya (3,73 persen). Subkomponen transportasi dan komunikasi tercatat memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada kelompok konsumsi rumah tangga. Tingginya pertumbuhan pada subkomponen transportasi dan komunikasi merupakan dampak dari kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat. Sebagai buktinya, laju pertumbuhan subkomponen ini mencapai 9,38 persen di tahun 2022.

Gambar 2.1 Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat berdasarkan sifatnya, konsumsi rumah tangga dapat dibedakan menjadi *leisure* dan *non leisure*. Konsumsi yang bersifat *leisure* adalah konsumsi pada komoditas barang maupun jasa yang bersifat mengisi waktu luang. Subkomponen yang tergolong sebagai *leisure* adalah transportasi dan komunikasi; serta restoran dan hotel. Sedangkan subkomponen *non leisure* terdiri dari makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; kesehatan dan pendidikan; serta lainnya.

Jika dilihat dari Gambar 2.2, konsumsi yang bersifat *leisure* selama masa pandemi cenderung tidak stabil. Konsumsi ini sempat mengalami kontraksi yang cukup besar pada tahun 2020 sebesar 9,17 persen dan terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai 8,59 persen pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang mulai menghapus beberapa kebijakan terkait pembatasan aktivitas masyarakat. Hal yang sedikit berbeda terjadi pada konsumsi *non leisure*. Selama masa pandemi, konsumsi yang bersifat *non leisure* cenderung lebih stabil dibandingkan konsumsi *leisure*. Konsumsi *non leisure* hanya mengalami perlambatan dan tidak berkontraksi pada tahun 2020. Namun, di tahun berikutnya laju pertumbuhan konsumsi ini tidak sebesar konsumsi *non leisure*. Hal ini karena konsumsi *non leisure* merupakan konsumsi rumah tangga yang bersifat primer sehingga pertumbuhannya cenderung stabil dari tahun ke tahun.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi di suatu negara bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ekonomi yang tumbuh dan stabil serta distribusi pendapatan yang merata memiliki berbagai implikasi positif yang berdampak secara tidak langsung pada meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Secara teori, Hukum Engel menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan berdampak pada penurunan proporsi pengeluaran untuk makanan. Atau dengan kata lain, semakin sejahtera suatu penduduk maka porsi pengeluaran yang digunakan untuk non makanan akan meningkat.

Pada tahun 2022 perekonomian Indonesia tumbuh impresif dengan laju pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Sejalan dengan teori Hukum Engel sebelumnya, di tahun 2022 proporsi pengeluaran *non leisure* menurun menjadi 66,57 persen dan *leisure* meningkat menjadi 33,43 persen. Pergeseran ini disebabkan karena mulai dilonggarkannya kebijakan pembatasan masyarakat

2 | Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional

dan mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Hal yang sama juga dapat dilihat pada tahun 2020, dimana saat itu perekonomian Indonesia mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -2,07 persen. Pada tahun tersebut, masyarakat cenderung untuk mengutamakan kebutuhan primer dimana proporsi pengeluaran *non leisure* tercatat sebesar 68,00 persen dan pengeluaran *leisure* sebesar 32,00 persen.

Gambar 2.3 Kontribusi Sub komponen Leisure dan Non Leisure pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kinerja investasi di Indonesia diukur oleh komponen PMTB. Komponen ini dapat dibedakan menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen bangunan dan non bangunan. Subkomponen non bangunan terdiri dari mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lainnya, CBR (*Cultivated Biological Resources*), dan produk kekayaan intelektual. Selama empat tahun terakhir terjadi fluktuasi pada komponen PMTB, baik dari subkomponen bangunan, maupun subkomponen non bangunan. Kedua subkomponen ini mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian terjadi *rebound* di tahun berikutnya seiring dengan adanya pemulihan ekonomi nasional.

Gambar 2.4 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, subkomponen non bangunan tercatat mengalami laju pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 12,53 persen. Sedangkan subkomponen bangunan justru mengalami pertumbuhan yang melambat, yaitu sebesar 0,01 persen. Meskipun terjadi kenaikan pada dua subkomponen, pertumbuhan PMTB sepanjang tahun 2022 masih belum pulih dibandingkan kinerja pada saat sebelum pandemi. Pada tahun 2022 komponen PMTB tercatat sebesar 3,87 persen, masih dibawah pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 4,45 persen.

Gambar 2.5 Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2019-2022

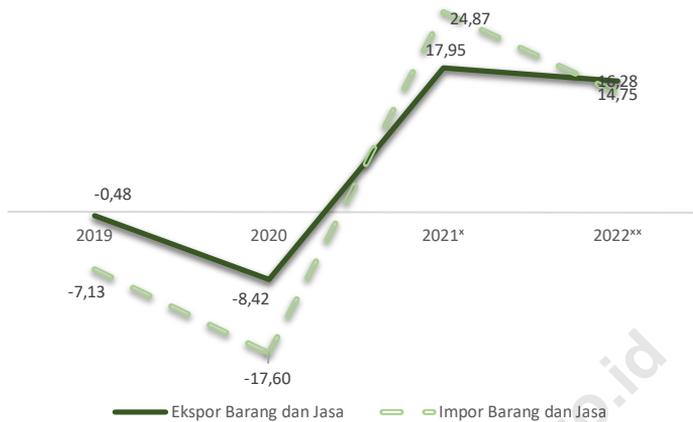


Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat berdasarkan proporsinya, subkomponen bangunan memiliki proporsi mencapai tiga kali lipat dibandingkan subkomponen non bangunan. Proporsi subkomponen bangunan tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 75,62 persen. Setelah itu terjadi penurunan proporsi untuk subkomponen bangunan hingga pada tahun 2022 tercatat sebesar 72,41 persen. Sedangkan proporsi pada subkomponen non bangunan tercatat sebesar 27,59 persen.

Salah satu dampak positif dari perdagangan internasional adalah terciptanya devisa melalui bea masuk dan biaya lain antara ekspor dan impor. Selain itu, selisih perdagangan antara ekspor dan impor juga berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh net ekspor. Selama empat tahun terakhir, neraca perdagangan internasional selalu mengalami surplus. Namun demikian, pertumbuhan dari sisi ekspor maupun impor berlangsung fluktuatif.

Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen), 2019-2022

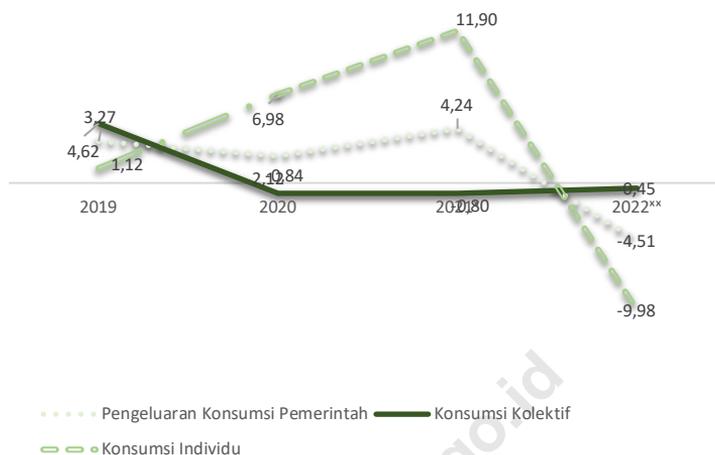


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada masa awal pandemi, ekspor dan impor mengalami kontraksi yang cukup dalam mencapai 8,42 persen dan 17,60 persen. Kendati demikian, kinerja di sektor ekspor dan impor mampu melakukan *rebound* dengan mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 17,95 persen dan 24,87 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekspor dan impor cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat sebesar 16,28 persen dan 14,75 persen. Hal ini disebabkan karena adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang membawa efek domino terhadap perekonomian, baik pada ekspor maupun ketahanan pangan (Bisnis.com, 2022).

Berdasarkan jenisnya, pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contoh jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu (biasanya harga), contoh pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas.

Gambar 2.7 Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2019-2022

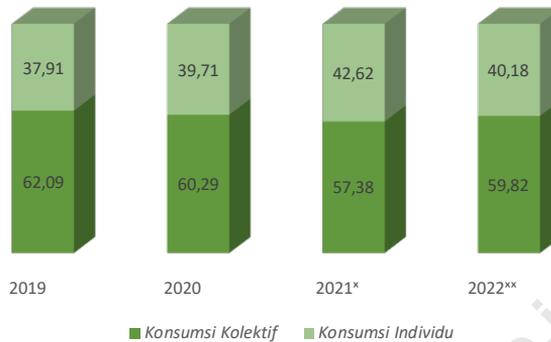


Sumber: Badan Pusat Statistik

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah masih menjadi instrumen penting selama masa penanganan pandemi dan berperan sebagai *countercyclical* dari kontraksi ekonomi. Artinya, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat terjadi kontraksi ekonomi. Pada Gambar 2.7, dapat terlihat bahwa pemerintah menaikkan konsumsi individu selama masa pandemi. Peningkatan ini didorong oleh realisasi belanja barang dan jasa dari APBN. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Namun pada tahun 2022, konsumsi pengeluaran pemerintah justru berkontraksi sebesar 4,51 persen. Kondisi ini berbalik arah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,24 persen. Hal ini utamanya karena adanya penurunan konsumsi individu sebesar 9,98 persen.

Jika dilihat dari proporsinya, konsumsi kolektif pemerintah secara rata-rata mencapai 60 persen. Proporsi kolektif pemerintah mengalami penurunan semenjak masa pandemi dan terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 59,82 persen. Penurunan proporsi pada masa pandemi ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan realisasi belanja barang dan jasa melalui kebijakan PC-PEN. Hal itu berdampak pada meningkatnya realisasi konsumsi individu pemerintah, sehingga secara proporsi konsumsi kolektif pemerintah menurun.

Gambar 2.8 Kontribusi Subkomponen Konsumsi Kolektif dan Konsumsi Individu pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2019-2022



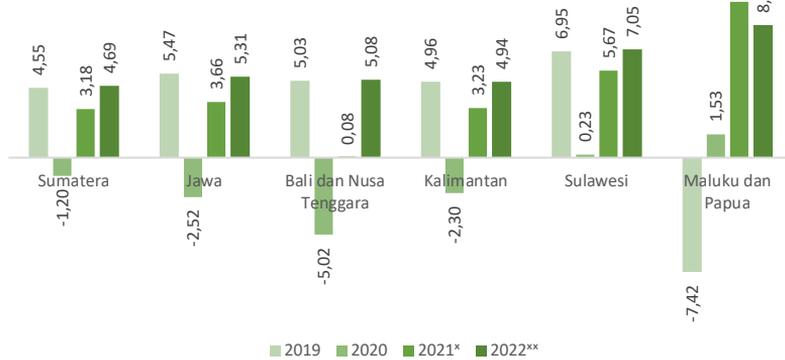
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tidak Mengalami Kontraksi Selama Pandemi, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara Justru Semakin Kuat

Selain di tingkat nasional, perekonomian di tingkat regional juga memiliki kinerja yang sangat baik. Lima dari enam wilayah di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik pada tahun 2022, yaitu wilayah Sumatera (4,69 persen), Jawa (5,31 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,08 persen), Kalimantan (4,94 persen), dan Sulawesi (7,05 persen). Hanya wilayah Maluku dan Papua yang laju pertumbuhannya mengalami perlambatan yaitu sebesar 8,65 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 10,15 persen. Namun demikian, laju pertumbuhan Maluku dan Papua masih sangat baik dengan berada diatas laju pertumbuhan nasional.

Pada tahun 2021, Bali dan Nusa Tenggara belum menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut mengandalkan sektor pariwisata dalam putaran ekonominya. Namun demikian, di periode berikutnya wilayah ini mampu melesat dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Meningkatnya perekonomian di wilayah ini disebabkan karena mulai dilonggarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang dibuktikan pada meningkatnya jumlah wisatawan asing. Di Provinsi Bali sendiri, jumlah wisatawan yang melalui pintu masuk Bandara Ngurah Rai mencapai 2,15 juta di tahun 2022, sangat jauh berbeda jika dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sebanyak 43 wisatawan. Selain itu terdapat beberapa agenda besar seperti pelaksanaan MotoGP di Mandalika, dan acara puncak G20 di Bali yang memiliki *multiplier effect* terhadap sektor lainnya.

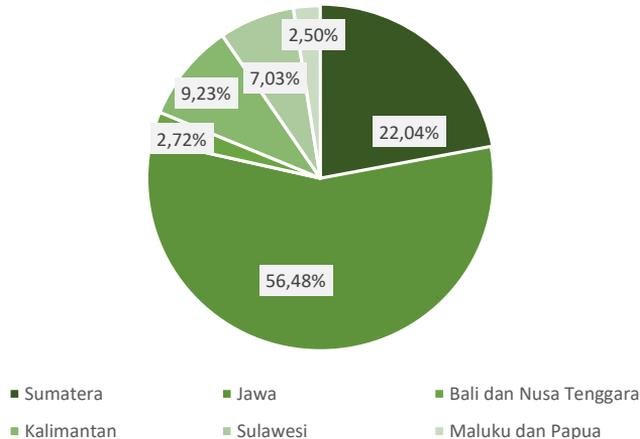
Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari enam wilayah tersebut, terdapat dua wilayah yang tidak mengalami kontraksi selama masa awal pandemi, yaitu Sulawesi serta Maluku dan Papua. Pada tahun 2020, wilayah Sulawesi mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23 persen. Ekspor barang dan jasa menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi di pulau ini. Besarnya ekspor disebabkan karena tingginya permintaan luar negeri terhadap produk besi baja dan nikel dari provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2022, wilayah Sulawesi juga menunjukkan pertumbuhan yang impresif sebesar 7,05 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Sulawesi, wilayah Maluku dan Papua juga menunjukkan kinerja ekonomi yang sangat baik di tahun 2020, tercatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,53 persen. Hal ini disebabkan karena adanya industri hilirisasi nikel di Halmahera yang berdampak pada meningkatnya nilai ekspor luar negeri wilayah tersebut.

Gambar 2.10 Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kontribusinya, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jika dijumlahkan, kedua wilayah ini berkontribusi pada perekonomian Indonesia mencapai 78,52 persen di tahun 2022. Jika dilihat pada Gambar 2.10, Pulau Jawa memiliki kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 56,48 persen. Selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,04 persen, Kalimantan 9,23 persen, Sulawesi 7,03 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,72 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,50 persen.

Pada tahun 2022, seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan masing-masing 22,94 persen dan 15,17 persen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di kedua provinsi ini disebabkan karena besarnya nilai ekspor luar negeri akibat tingginya permintaan untuk komoditas besi baja dan nikel. Industri hilirisasi nikel di wilayah tersebut diharapkan memiliki *multiplier effect* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada provinsi Papua Barat dengan laju pertumbuhan sebesar 2,01 persen di tahun 2022. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi terendah, kinerja ekonomi dari provinsi ini dapat dikatakan cukup baik di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berhasil *rebound* dari kondisi kontraksi di periode tahun sebelumnya. Meningkatnya permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi rumah tangga mampu mendongkrak kinerja perekonomian di tahun 2022. Selain itu, konsumsi pemerintah juga dianggap mampu menopang perekonomian Provinsi Papua Barat di tahun 2022.

Dilihat dari sisi kontribusinya, provinsi DKI Jakarta masih memiliki peran dominan dalam perekonomian Indonesia. Di tahun 2022, provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi sebesar 16,64 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Kontribusi yang besar terhadap PDB nasional tidak terlepas dari posisi DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Selain itu transaksi non tunai terbesar juga berasal dari DKI Jakarta, yakni mencapai 40 persen dari total transaksi (Merdeka, 2021). Meskipun memiliki kontribusi terbesar, laju pertumbuhan provinsi DKI Jakarta masih sedikit di bawah laju pertumbuhan nasional. Selain DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat juga memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian. Kontribusinya secara berturut-turut adalah 14,26 persen dan 12,65 persen. Karena memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional, kondisi ekonomi di ketiga provinsi ini dapat berpengaruh pada perekonomian di provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjaga perekonomian di Indonesia tetap stabil dan tangguh, diperlukan upaya ekstra untuk menjaga kestabilan ekonomi pada provinsi-provinsi dengan tingkat kontribusi yang besar. Menjaga pola distribusi perdagangan antar wilayah, memastikan tidak terjadi defisit stok pada komoditas-komoditas pangan pokok, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk diharapkan dapat menjadi modal agar perekonomian Indonesia dapat tetap kuat dan stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Tabel 2.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen), 2020-2022

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			Kontribusi Ekonomi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
Aceh	-0,37	2,79	4,21	1,06	1,09	1,11
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,15	5,07	4,99
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36	1,53	1,49	1,49
Riau	-1,13	3,36	4,55	4,62	4,95	5,18
Jambi	-0,51	3,69	5,13	1,30	1,37	1,44
Sumatera Selatan	-0,11	3,58	5,23	2,88	2,91	3,09
Bengkulu	-0,02	3,27	4,31	0,47	0,47	0,47
Lampung	-1,66	2,77	4,28	2,24	2,19	2,16
Kep. Bangka Belitung	-2,29	5,05	4,40	0,48	0,51	0,50
Kep. Riau	-3,80	3,43	5,09	1,61	1,63	1,61
DKI Jakarta	-2,39	3,56	5,25	17,55	17,18	16,64
Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45	13,21	13,01	12,65
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	8,55	8,38	8,15
DI Yogyakarta	-2,67	5,58	5,15	0,88	0,88	0,87
Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34	14,59	14,48	14,26
Banten	-3,39	4,49	5,03	3,97	3,93	3,90
Bali	-9,34	-2,46	4,84	1,42	1,30	1,28
Nusa Tenggara Barat	-0,62	2,30	6,95	0,85	0,83	0,82
Nusa Tenggara Timur	-0,84	2,52	3,05	0,68	0,65	0,62
Kalimantan Barat	-1,82	4,80	5,07	1,36	1,36	1,34
Kalimantan Tengah	-1,41	3,59	6,45	0,97	1,00	1,04
Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11	1,14	1,17	1,31
Kalimantan Timur	-2,90	2,55	4,48	3,86	4,11	4,81
Kalimantan Utara	-1,09	3,98	5,34	0,64	0,65	0,72
Sulawesi Utara	-0,99	4,16	5,42	0,84	0,84	0,82
Sulawesi Tengah	4,86	11,70	15,17	1,25	1,46	1,69
Sulawesi Selatan	-0,71	4,64	5,09	3,20	3,22	3,16
Sulawesi Tenggara	-0,65	4,10	5,53	0,83	0,82	0,83
Gorontalo	-0,02	2,41	4,04	0,26	0,26	0,25
Sulawesi Barat	-2,34	2,57	2,30	0,29	0,30	0,28
Maluku	-0,91	3,05	5,11	0,29	0,29	0,28
Maluku Utara	5,39	16,79	22,94	0,27	0,31	0,37
Papua Barat	-0,76	-0,51	2,01	0,53	0,50	0,48
Papua	2,39	15,16	8,97	1,26	1,39	1,37

Sumber: Badan Pusat Statistik

PERAN APBN DALAM Mendukung Arah dan Kebijakan Strategis Pemerintah



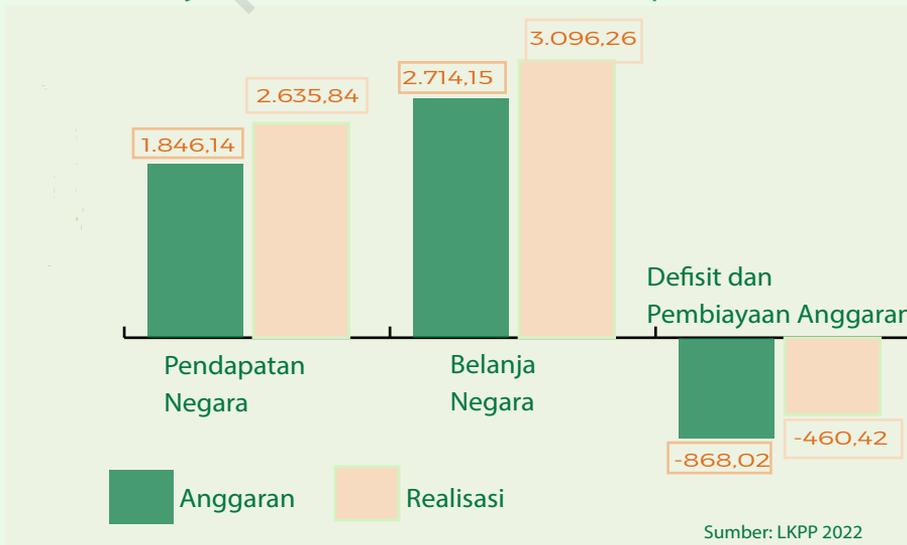
Postur APBN 2023 (Triliun Rupiah)



Kebijakan Fiskal Ekspansif pada APBN TA 2023 diarahkan untuk Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sumber: UU No.28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023

Kinerja Realisasi APBN 2022 (Triliun Rupiah)



Sumber: LKPP 2022



“Kebijakan Fiskal pada APBN Tahun 2023 diarahkan untuk Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

<https://www.kubps.go.id>

Berbagai tantangan dan risiko masih membayangi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2022, terutama berasal dari inflasi yang terjadi di mayoritas negara-negara dunia dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Pelonggaran bahkan pencabutan restriksi mobilitas masyarakat pasca terkendalinya pandemi Covid-19 dan meluasnya cakupan vaksinasi, diiringi dengan pemulihan ekonomi memunculkan fenomena lonjakan permintaan barang dan jasa, terutama komoditas pangan dan energi. Sementara itu, terdampar pada rantai penyediaan (*supply*) yang diperparah dengan perang Rusia-Ukraina berdampak pada ketidakmampuan sisi produksi untuk segera mengimbangi peningkatan dari sisi permintaan. Hal ini berdampak pada lonjakan harga berbagai komoditas yang memicu terjadinya inflasi secara global.

Kondisi perekonomian global berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian nasional dan mendisrupsi keberlanjutan pemulihan ekonomi di tahun 2023. Tingginya tingkat inflasi mendorong berbagai negara untuk menerapkan kebijakan pengetatan keuangan dengan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Selain berdampak pada penurunan permintaan agregat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, langkah untuk menaikkan suku bunga yang diambil oleh mayoritas negara terutama negara-negara maju berdampak pada negara *emerging markets* termasuk Indonesia berupa aliran modal keluar (*Capital Outflow*) dan penguatan mata uang dollar AS terhadap rupiah.

Secara umum, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi terhadap dinamika perekonomian global di tahun 2022, yang mana tetap tumbuh sebesar 5,3 persen (*yoy*) melampaui pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,7 persen di tahun 2021. Pencapaian ini didukung oleh berbagai program yang ditempuh pemerintah yakni program vaksinasi yang berhasil mengembalikan taraf Kesehatan masyarakat dari pandemi dan keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pencapaian dari berbagai implementasi kebijakan pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi nasional tidak terlepas dari Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBN) yang berperan sebagai *shock absorber* (peredam) dalam menghadapi tantangan baik global maupun nasional.

“APBN sebagai instrumen fiskal yang berfungsi sebagai shock absorber di tengah dinamika perekonomian global”

Melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di tahun 2022, APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 berperan dalam mendukung kebijakan fiskal yang masih bersifat ekspansif dengan tetap memperhatikan risiko sustainabilitas jangka panjang dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan fokus

kebijakan fiskal yakni; (1) penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, (2) akselerasi pembangunan infrastruktur, (3) pemantapan reformasi birokrasi, (4) revitalisasi industri, dan (5) pembangunan ekonomi hijau.

APBN 2023 untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Berbeda dengan postur APBN TA 2020 hingga 2022 yang didesain *extraordinary* untuk pemulihan sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, arah kebijakan dan postur makro fiskal APBN TA 2023 ditujukan bagi peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, postur APBN 2023 juga didesain untuk mendukung dimulainya konsolidasi fiskal, dimana defisit anggaran kembali ke batas maksimum tiga persen dari PDB.

Guna mendukung arah kebijakan strategis APBN 2023, beberapa strategi kebijakan fiskal telah dirumuskan pada sisi pendapatan, pengeluaran maupun pembiayaan negara. Adapun tiga langkah strategis tersebut yakni mobilisasi pendapatan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan reformasi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), melanjutkan kebijakan belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*), dan mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN 2023 yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 3,6 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp 14.800/US\$, harga minyak mentah 90 US\$/barell, dan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,9 persen. Adapun postur makro APBN TA 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1 Postur APBN 2022 dan 2023 (triliun rupiah)

Uraian	APBN 2022 (UU No. 6 2021)	APBN 2023 (UU No. 28 2022)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Negara dan Hibah	1 846,14	2 463,02
Penerimaan Perpajakan	1 510,00	2 021,22
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	335,56	441,39
Penerimaan Hibah	0,58	0,41
Belanja Negara	2 714,15	3 061,18
Belanja Pemerintah Pusat	1 944,54	2 246,46
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769,61	814,72
Surplus/Defisit Keseimbangan Primer	-462,15	-156,75
Surplus/Defisit Anggaran	-868,02	-598,15
Persentase Surplus/Defisit Terhadap PDB	4,85	2,84
Pembiayaan Anggaran	868,02	598,15
Pembiayaan Utang	973,58	696,32
Pembiayaan Investasi	-182,32	-175,96

Uraian	APBN 2022 (UU No. 6 2021)	APBN 2023 (UU No. 28 2022)
Pemberian Pinjaman	0,59	5,28
Kewajiban Penjaminan	-1,13	-0,33
Pembiayaan Lainnya	77,30	72,83

Sumber: UU Nomor 6 2021 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 dan UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023

Pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp 2.463,02 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 33,41 persen jika dibandingkan dengan target pada TA 2022. Adapun rinciannya yakni target penerimaan pajak sebesar Rp2.021,22 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 441,39 triliun, dan hibah sebesar Rp 0,41 triliun. Kebijakan pendapatan negara di tahun 2023 dilakukan dalam kerangka mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap memperhatikan daya beli, iklim investasi, dan kelestarian lingkungan yang terjaga. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan strategi dan kebijakan yang sesuai pada setiap sumber penerimaan negara.

Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama dalam pendapatan negara yakni mencapai 82,06 persen dari total target pendapatan negara di tahun 2023. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat agar kinerja penerimaan pajak menjadi optimal. Beberapa kebijakan teknis pajak tahun 2023, diantaranya:

1. upaya perluasan basis pajak dengan pengawasan Wajib Pajak (WP) sebagai tindak lanjut penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP dan Program Pengungkapan Sukarela yang berakhir pada Juni 2022,
2. optimalisasi kegiatan ekstensifikasi pajak,
3. penguatan kegiatan pengawasan dengan menerapkan pengawasan berbasis kewilayahan dan penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP),
4. perluasan kanal pembayaran pajak untuk memudahkan WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,
5. pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur demi mendorong pertumbuhan sektor tertentu yang memberikan *multiplier effect* yang besar dan memberi kemudahan investasi.

Berbagai kebijakan teknis pajak 2023 di atas didukung oleh keberlanjutan pemulihan ekonomi dan efektivitas implementasi kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), reformasi administrasi perpajakan, dan reformasi struktural. Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak 2023 menghadapi tantangan dan risiko, yakni sebagai berikut:

1. ketidakpastian harga komoditas global, seperti energi, mineral, dan perkebunan yang diprediksi akan termoderasi di 2023,
2. perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan penggunaan transaksi elektronik,

3. ketidakpastian kondisi perekonomian global yang diakibatkan oleh isu geopolitik yang berdampak pada merosotnya permintaan terhadap produk ekspor Indonesia.

Sementara itu, PNBPN bersumber dari empat komponen yakni penerimaan sumber daya alam (SDA migas dan nonmigas), Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBPN lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang kinerja capaian realisasi PNBPN dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya harga komoditas, volume produksi, nilai tukar rupiah terhadap USD, jumlah pelayanan yang diberikan, dan jenis serta besaran tarif.

Belanja negara pada APBN tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3.061,18 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,46 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 814,72 triliun. Demi tercapainya belanja negara yang berkualitas dan berdampak optimal bagi perekonomian, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk:

1. mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial,
2. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi, seperti teknologi informasi dan komunikasi, konektivitas, energi, dan pangan, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),
3. meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas,
4. melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja nonprioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil,
5. meningkatkan efektivitas program perlinsos termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bansos yang efektif dan lebih tepat sasaran,
6. memperkuat fleksibilitas belanja untukantisipasi ketidakpastian,
7. meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik, dan
8. meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai manifestasi dari kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif maka APBN 2023 mengalami defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 598,15 triliun atau sekitar 2,84 persen dari PDB. Untuk menutup defisit anggaran TA 2023, pemerintah mendorong pembiayaan yang bersifat inovatif dan berkelanjutan, yang terdiri dari penerimaan neto Pembiayaan Utang sebesar Rp 696,32 triliun, pengeluaran neto Pembiayaan Investasi sebesar Rp 175,96 triliun, penerimaan neto Pemberian/Penerusan Pinjaman sebesar Rp 5,28 triliun, pengeluaran Kewajiban Penjaminan sebesar Rp 0,33 triliun, serta penerimaan neto Pembiayaan Lainnya sebesar Rp 72,83 triliun.

Utang negara masih menjadi sumber utama pembiayaan untuk menutup defisit anggaran TA 2023 yang pengelolaannya didorong untuk *prudent* atau dengan memperhatikan koridor atau batasan berdasarkan

best practice internasional maupun amanat peraturan perundangan seperti batasan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 60 persen (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang utang dapat dilakukan pada tingkat risiko yang aman dan terkendali. Pembiayaan investasi juga didorong efektivitasnya guna menjadi sumber pembiayaan yang inovatif dengan meningkatkan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pembinaan Badan Layanan Umum (BLU) selaku penerima Penyertaan Modal Negara (PMN).

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

Kinerja perekonomian nasional tahun 2022 yang tetap tumbuh stabil ditengah ketidakpastian global terefleksikan pada kinerja pendapatan negara. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 berada pada level ekspansif, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 31,05 persen (*yoy*), tertinggi selama kurun 5 tahun terakhir, atau lebih tinggi Rp624,49 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp2.635,84 triliun. Angka ini juga melampaui nilai yang ditargetkan pada APBN 2022 (UU No.6 Tahun 2021) dengan persentase realisasi sebesar 142,78 persen. Jika dilihat perkembangan sejak 2018, Pendapatan Negara konsisten mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19, dimana pendapatan negara mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 15,96 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

“Ditengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, kinerja realisasi APBN TA 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada komponen Pendapatan dan Hibah disertai dengan peningkatan pada sisi Belanja Negara”

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Negara (triliun rupiah), 2018-2022

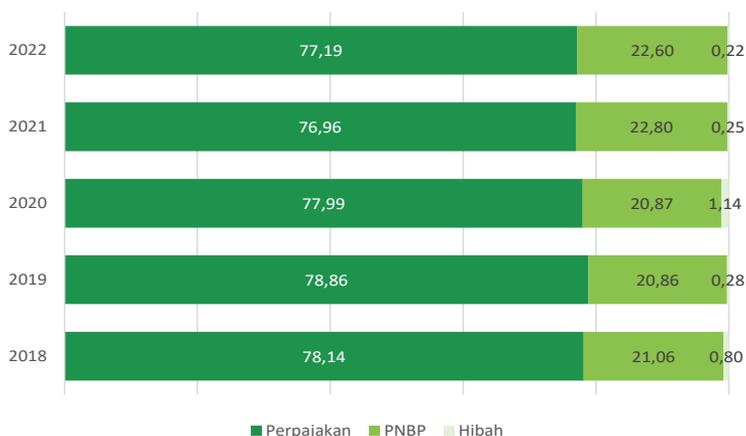
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Negara	1 943,67	1 960,63	1 647,78	2 011,35	2 635,84
1. Penerimaan Perpajakan	1 518,79	1 546,14	1 285,14	1 547,84	2 034,55
1.1 Pajak Dalam Negeri	1 472,91	1 505,09	1 248,42	1 474,15	1 943,65
1.2 Pajak Perdagangan Internasional	45,88	41,05	36,72	73,70	90,90
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	409,32	408,99	343,81	458,49	595,59
3. Penerimaan Hibah	15,56	5,50	18,83	5,01	5,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018-2022

Dalam struktur APBN, terdapat tiga sumber Pendapatan Negara yakni Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pada realisasi APBN 2022, Penerimaan Pajak masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara yakni mencapai 77,19 persen, sedangkan 22,60 persen disumbang oleh PNBP dan sisanya sebesar 0,22 persen berasal dari Penerimaan Hibah. Realisasi ketiga komponen tersebut selama TA 2022 juga menunjukkan kinerja yang positif, terlihat dari peningkatan (yoy) pada realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar 31,44 persen menjadi Rp 2.034,55 triliun, sebuah capaian yang lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, PNBP dan Hibah juga tumbuh sebesar 29,90 persen dan 13,77 persen menjadi Rp 595,59 triliun dan Rp 5,70 triliun. Pertumbuhan *double digit* dari Penerimaan Pajak dan PNBP, yang merupakan penyumbang lebih dari 90 persen dari Pendapatan Negara tentu saja berdampak pada kenaikan Pendapatan Negara yang cukup signifikan.

Kinerja cemerlang dari komponen Penerimaan Pajak dan PNBP dipengaruhi oleh dua faktor yakni adanya peningkatan permintaan dunia (*global demand*) atas komoditas tambang yang berdampak pada pertumbuhan signifikan Penerimaan Pajak TA 2022 pada beberapa sektor utama dan lonjakan harga komoditas dunia. Setidaknya ada tiga keuntungan dari kenaikan harga komoditas dunia pada keseluruhan pendapatan negara yakni terdorongnya kinerja Pendapatan Negara terutama melalui peningkatan PPh migas, meningkatnya penerimaan dari bea masuk dan bea keluar, serta meningkatnya PNBP dari produksi, pengolahan, dan penjualan komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Gambar 3.1 Kontribusi Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Pada Realisasi Pendapatan Negara, 2018-2022



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018-2022

Selama kurun TA 2022, sebesar 95,53 persen penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri sedangkan sisanya berasal dari pajak perdagangan internasional. Dilihat lebih rinci lagi menurut komponen penyusunnya, kontributor utama pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang masing-masing berkontribusi sebesar 51,36 persen dan 35,38 persen. Realisasi hampir semua jenis pajak dalam negeri di TA 2022 mengalami peningkatan dan yang paling signifikan terjadi pada komponen PPh yang naik sebesar 43,28 persen dari realisasi tahun sebelumnya diikuti oleh PPN dan PPnBM yang naik sebesar 24,59 persen. Realisasi penerimaan pajak yang melebihi target merupakan refleksi dari kinerja perekonomian nasional yang bergerak ke arah yang positif.

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah), 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak Penghasilan (PPh)	749,98	772,26	594,03	696,68	998,21
PPh Migas	64,70	59,15	33,03	52,84	77,84
PPh Nonmigas ¹	685,28	713,11	561,01	643,84	920,37
PPN dan PPnBM ²	537,27	531,58	450,32	551,90	687,61
Pajak Bumi dan Bangunan	19,44	21,15	20,95	18,92	23,26
Cukai	159,59	172,42	176,31	195,52	226,88
Pajak Lainnya	6,63	7,68	6,79	11,13	7,69
Total Pajak Dalam Negeri	1 472,91	1 505,09	1 248,41	1 474,14	1 943,65

Catatan: ¹ Termasuk PPh Ditanggung Pemerintah

² Termasuk PPN dan PPnBM Ditanggung Pemerintah

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018-2022

Selain dari perpajakan, penerimaan pendapatan negara tahun 2022 juga melambung didorong oleh PNBP yang meningkat sebesar 29,90 persen menjadi Rp 595,59 triliun. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi pendapatan negara yang ditempuh baik dari sisi penerimaan pajak maupun PNBP. Beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diantaranya perluasan basis pajak yang disertai dengan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta melakukan reformasi perpajakan dengan penerapan *Omnibus Law* Perpajakan. Sementara upaya optimalisasi pendapatan negara dari sisi PNBP dilakukan dengan membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP. Dengan dibuatnya regulasi turunan ini diharapkan tercapainya tata kelola PNBP yang lebih baik, optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN, perbaikan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum (BLU), dan peningkatan pengelolaan asset agar lebih produktif dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU).

Realisasi Belanja Negara Tahun 2022 Bergerak Ekspansif dari Tahun Sebelumnya

Belanja Negara TA 2022 terealisasi sebesar Rp 3.096,26 triliun, meningkat sebesar 11,12 persen atau Rp 309,85 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Dari nominal tersebut, sebesar 73,64 persen atau sebesar Rp 2.280,03 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat dan 26,36 persen atau sebesar Rp 816,23 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mana kedua komponen belanja tersebut mengalami kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya. Pertumbuhan dari belanja pemerintah pusat terutama disebabkan oleh pembayaran Subsidi Energi serta Kompensasi BBM dan Listrik sehingga meningkatkan realisasi Belanja Non K/L. Sedangkan, peningkatan TKDD terutama bersumber dari peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas royalti pertambangan umum serta dari peningkatan penyaluran dana desa.

“Belanja Negara TA 2022 terealisasi sebesar Rp 3.096,26 triliun atau tumbuh sebesar 11,12 persen dari realisasi TA 2021”

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Negara (triliun rupiah), 2018-2022

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Negara	2 213,12	2 309,28	2 595,48	2 786,41	3 096,26
Belanja Pemerintah Pusat	1 455,32	1 496,31	1 832,95	2 000,70	2 280,03
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)	846,56	873,43	1 059,62	1 190,81	1 084,67
Belanja Non K/L	608,76	622,89	773,33	809,89	1 195,35
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	757,79	812,97	762,53	785,71	816,23
Transfer ke Daerah	697,93	743,16	691,43	713,85	748,33
Dana Desa	59,86	69,81	71,10	71,85	67,91

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2018-2022

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2022 terbagi atas realisasi belanja K/L sebesar Rp 1.084,67 triliun dan realisasi belanja Non K/L sebesar Rp 1.195,35 triliun. Gambar 3.2 menampilkan lima K/L dengan porsi realisasi belanja terbesar terhadap total realisasi belanja pemerintah pusat yakni Kementerian Pertahanan (13,87 persen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (11,72 persen), Kementerian Kesehatan (11,16 persen), Kepolisian Negara Republik Indonesia (10,53 persen), dan Kementerian Sosial (8,90 persen).

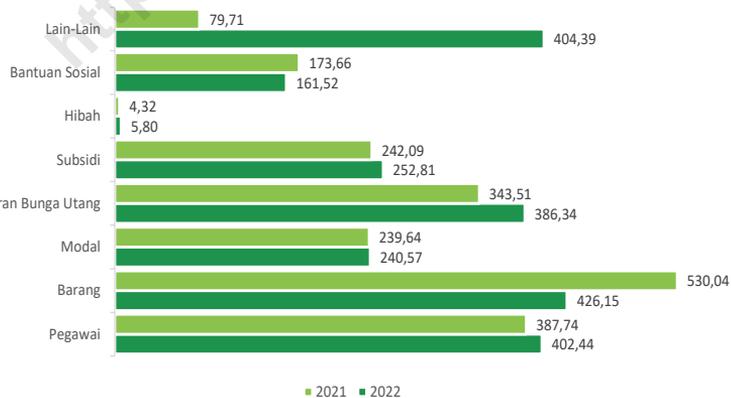
Gambar 3.2 Lima Kementerian Lembaga (K/L) dengan Porsi Realisasi Belanja Terbesar Terhadap Total Belanja Pemerintah Pusat, 2022



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan ke dalam delapan klasifikasi menurut jenis belanja, dimana realisasi pada enam jenis belanja (belanja pegawai, modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan lain-lain) mengalami kenaikan pada tahun 2022, sedangkan dua jenis belanja yakni belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berkurangnya belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya status kesehatan masyarakat dan pulihnya ekonomi nasional.

Gambar 3.3 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah) Menurut Jenis Belanja, 2021-2022



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022

Peningkatan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 yang sebesar 3,79 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA sebelumnya utamanya dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/POLRI, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, serta pembayaran pensiunan ASN/TNI/POLRI. Realisasi Belanja Modal TA 2022 juga sedikit mengalami pertumbuhan sebesar

0,39 persen yang utamanya digunakan untuk pertahanan dan keamanan berupa modernisasi alutsista dan almatsus serta dukungan sarana prasarana, pembangunan infrastuktur dasar dan konektivitas berupa pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, pembangunan gedung dan bangunan (rumah dinas prajurit TNI dan POLRI, Bandara, rumah sakit, Gedung Pendidikan Tinggi, Rusun dan Rusus), serta pengadaan tanah yang dimanfaatkan antara lain untuk lahan proyek strategis nasional (PSN) dalam pembangunan proyek infrastruktur berupa jalan tol, bendungan, irigasi, kereta api, pelabuhan, dan kawasan strategis.

Sejalan dengan Belanja Pegawai dan Modal, Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 12,47 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terutama disebabkan oleh pembayaran bunga Obligasi Negara serta pembayaran imbalan Surat Berharga Syariah Negara. Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 mencapai Rp 252,81 triliun atau meningkat 4,43 persen dari realisasi dari TA sebelumnya yang terdiri atas subsidi energi mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik, subsidi non energi mencakup subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Belanja Hibah Tahun 2022 yakni sebesar Rp 5,80 triliun atau meningkat 34,37 persen terhadap tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan hibah kepada pemerintah daerah. Terakhir, komponen Belanja Lain-lain terealisasi dengan nominal Rp404,39 triliun meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan TA sebelumnya yang utamanya dialokasikan untuk membiayai pelatihan, insentif bagi pencari kerja dan insentif serta evaluasi dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, untuk penyediaan cadangan beras dalam rangka pelaksanaan Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Sementara itu, penurunan realisasi terjadi pada kelompok Belanja Barang dan Jasa TA menjadi Rp 426,15 triliun di TA 2022 atau berkontraksi sebesar 19,60 persen. Selain karena penurunan anggaran untuk penanganan kesehatan seiring dengan perbaikan kondisi pandemi Covid-19, penurunan

“Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial TA 2022 mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya belanja pemerintah untuk penanganan pandemi.”

Belanja Barang juga disebabkan oleh pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dilaksanakan hanya sampai tahun 2021. Belanja Barang TA 2022 utamanya dialokasikan untuk berbagai program regular seperti Bantuan Operasional Siswa (BOS), Bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan, pemberian beasiswa LPDP, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan pelayanan publik lainnya, dan untuk program-program yang mendukung perbaikan dampak pandemi Covid-19 seperti pelaksanaan vaksinasi dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 juga mengalami penurunan sebesar 6,99 persen menjadi Rp 161,52 triliun, yang dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Kartu Sembako, pelaksanaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BBM, pembayaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN, penyaluran bantuan Pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Gambar 3.4 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2022 (triliun rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022

Menurut fungsi, Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk 11 jenis belanja. Pada tahun 2022, hampir 40 persen realisasi Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk fungsi Pelayanan Umum yakni mencapai Rp 909,58 triliun. Realisasi belanja terbesar kedua yakni untuk belanja Fungsi Ekonomi sebesar Rp 443,65 triliun diikuti oleh belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp 267,7 triliun. Signifikannya nominal belanja Fungsi pelayanan Umum, fungsi Ekonomi, dan fungsi Perlindungan Sosial merefleksikan arah fokus prioritas pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan optimalisasi perlindungan sosial.

Selain untuk belanja pemerintah pusat, Belanja Negara juga digunakan untuk Transfer ke Daerah sebagai instrumen penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu, belanja negara untuk daerah juga dialokasikan untuk Dana Desa yang merupakan amanat undang-undang tentang desa dimana pelaksanaannya sudah dimulai sejak 2015. Dalam

kurun waktu 2018 hingga 2022, belanja untuk daerah cenderung meningkat, kecuali di tahun 2020. Untuk tahun 2022, realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp 748,33 triliun atau meningkat 4,83 persen (yoy). Transfer ke Daerah terdiri atas tiga komponen yakni Dana Perimbangan yang terdiri: (1) Dana Transfer Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Transfer Khusus (DAK

“Realisasi belanja pemerintah menurut fungsi merefleksikan arah prioritas pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan optimalisasi perlindungan sosial.”

3 Peran APBN dalam Mendukung Arah dan Kebijakan Strategis Pemerintah

Fisik dan DAK Nonfisik) dengan realisasi sebesar Rp719,58 triliun, (2) Dana Insentif Daerah dengan realisasi sebesar Rp 6,99 triliun, dan (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY dengan realisasi sebesar Rp 21,76 triliun. Sementara itu, Dana Desa terealisasi sebesar Rp 67,91 triliun atau menurun sebesar 5,48 persen yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa dan program-program prioritas lainnya.

Gambar 3.5 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun rupiah), 2018-2022



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022

Sumber Pembiayaan untuk Menutup Defisit Anggaran Diupayakan Inovatif dan Berkelanjutan

Adanya defisit anggaran pada APBN merupakan manifestasi dari kebijakan fiskal ekspansif yang ditempuh oleh pemerintah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Implementasi kebijakan defisit anggaran juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional. Tentu saja, kebijakan defisit fiskal dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal. Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, defisit APBN harus terjaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pemerintah melakukan relaksasi terhadap perundang-undangan tersebut dengan mengizinkan defisit APBN lebih 3 persen selama tahun 2020 hingga 2022 untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Defisit anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp460,42 triliun atau setara dengan 2,35 persen terhadap PDB Tahun 2022. Upaya memelihara kesinambungan fiskal dengan menjaga batas defisit kembali di bawah 3 persen berhasil dicapai lebih cepat dari target, yang mana seharusnya tahun 2022 merupakan tahun terakhir relaksasi batas defisit diizinkan di atas 3 persen. Hal ini terwujud karena komitmen pemerintah melalui optimalisasi Penerimaan Negara dan Hibah Tahun 2022, penguatan *spending better* (kualitas belanja) sehingga laju kenaikan Belanja Negara dapat ditekan agar semakin efisien dan terukur, dan juga kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Tabel 3.5 Realisasi Defisit Anggaran dan Rincian Pembiayaan (triliun rupiah), 2022

Uraian	Realisasi
(1)	(2)
Pendapatan Negara dan Hibah	2 635,84
Belanja Negara	3 096,26
Surplus/Defisit Anggaran	-460,42
Pembiayaan Utang	696,02
Pembiayaan Investasi	-106,72
Pemberian Pinjaman	2,15
Kewajiban Penjaminan	-1,13
Pembiayaan Lainnya	0,67
Pembiayaan Netto	590,98

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022

Defisit anggaran yang terjadi selama TA 2022 ditopang oleh Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 590,98 triliun yang terdiri dari penerimaan neto Pembiayaan Utang sebesar Rp 696,02 triliun pengeluaran neto Pembiayaan Investasi sebesar Rp 106,72 triliun, penerimaan neto Pemberian/Penerusan Pinjaman sebesar Rp 2,15 triliun, pengeluaran Kewajiban Penjaminan sebesar Rp 1,13 triliun, serta penerimaan neto Pembiayaan Lainnya sebesar Rp 0,67 triliun.

Gambar 3.6 Realisasi Komponen Pembiayaan Utang (triliun rupiah), 2021-2022

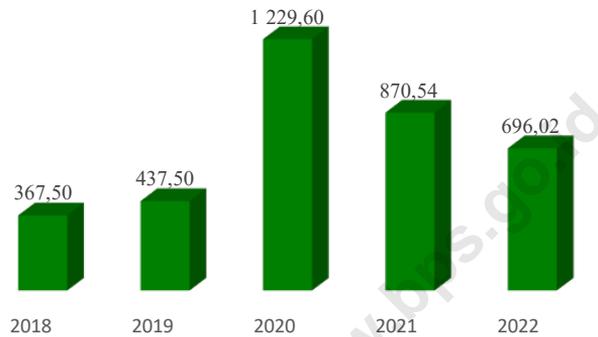


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022

Realisasi Pembiayaan Utang dari Surat Berharga Negara (SBN) neto TA 2022 sebesar Rp 658,82 triliun atau turun dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp 877,51 triliun. Penurunan realisasi SBN neto ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam mengupayakan kemandirian pembiayaan dalam hal strategi pengelolaan utang Pemerintah. Selain itu, penurunan juga dikarenakan realisasi defisit APBN yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Penerbitan SBN oleh pemerintah bertujuan untuk menutup defisit APBN dalam membiayai

pembangunan proyek pembangunan negara dan mengelola portofolio utang negara. Sementara itu, realisasi Pinjaman Dalam Negeri neto TA 2022 sebesar Rp8,20 triliun yang berasal dari perbankan BUMN untuk membiayai beberapa kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia yakni berupa pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri.

Gambar 3.7 Realisasi Komponen Pembiayaan Utang (triliun rupiah), 2021-2022



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2018-2022

KEBIJAKAN MONETER, STABILITAS PERBANKAN DAN PERKEMBANGAN DIGITALISASI SEKTOR KEUANGAN

4



Jumlah uang beredar mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah uang beredar mencapai **2.608,80 Triliun Rupiah**. Peredaran tertinggi terjadi pada Bulan **Desember** dengan peredaran uang kartal mencapai 897,80 Triliun Rupiah (8,01 %, yoy) dan peredaran uang giral mencapai 1.710,99 Triliun Rupiah (17,92 %, yoy).

PERKEMBANGAN DIGITALISASI SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2022



Kartu Debit

Jumlah kartu : 256,05 juta unit
Volume transaksi : 7,56 juta
Nilai transaksi : 7.921,63 triliun Rupiah



Kartu Kredit

Jumlah kartu : 17,2 juta unit
Volume transaksi : 0,34 juta
Nilai transaksi : 323,60 triliun Rupiah



Mesin EDC

Jumlah mesin : 1,71 juta unit
Volume transaksi : 1.583,12 juta
Nilai transaksi : 796,71 triliun Rupiah



Uang Elektronik

Jumlah instrumen : 730,7 juta unit
Volume transaksi : 12,33 juta
Nilai transaksi : 1,17 triliun Rupiah



QR Code (QRIS)

Jumlah merchant : 2,27 juta unit
Volume transaksi : 120 juta
Nilai transaksi : 12 triliun Rupiah



Internet Banking

Volume transaksi : 3,41 juta
Nilai transaksi : 42.550,58 triliun Rupiah



*“Digitalisasi sektor keuangan
berkembang pesat seiring dengan
pemulihan ekonomi pasca pandemi
Covid-19”*

<https://www.bps.go.id>

Perekonomian global masih mengalami tantangan besar di tahun 2022. Meski pandemi covid-19 sudah menurun, namun kondisi perekonomian global belum stabil. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang masih berlangsung menjadi pemicu gangguan perdagangan global. Kondisi ini diperparah dengan perselisihan geopolitik antara Rusia dengan Ukraina yang berujung pada pengenaan sanksi banyak negara kepada Rusia. Persediaan komoditas terganggu, terutama pada negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara-negara yang berkonflik. Imbasnya, terjadi kenaikan harga komoditas dan memicu inflasi tinggi. Merespon hal tersebut, Amerika Serikat (AS) dengan diikuti banyak negara mengambil kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama. Di sisi lain, kenaikan suku bunga tinggi di AS diikuti dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penguatan (depresiasi) mata uang dolar AS di banyak negara. Menghadapi dinamika tersebut, bank sentral di banyak negara harus menstabilkan mata uang negaranya melalui intervensi pasar valuta asing.

Dari kebijakan moneter, terjaganya stabilitas makroekonomi ditopang dari kebijakan likuiditas, nilai tukar dan suku bunga. Bank Indonesia selaku bank sentral menerapkan ketiga kebijakan tersebut secara komprehensif. Pada sisi likuiditas, kontrol terhadap uang beredar diawasi dengan ketat untuk menjaga inflasi. Pada sisi nilai tukar, Bank Indonesia mengatur kebijakan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dengan cara menjaga seminimal mungkin selisih suku bunga acuan dengan suku bunga *The Fed*. Pada sisi suku bunga, Bank Indonesia menerapkan suku bunga acuan sebesar $3,0 \pm 1$ persen untuk menjaga nilai dari inflasi inti.

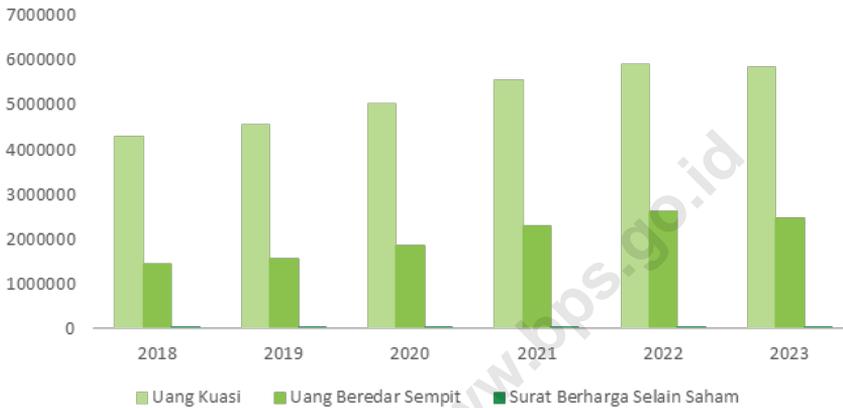
Digitalisasi pada sektor keuangan berkembang sangat pesat untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada akses keuangan yang lebih cepat, mudah dan aman. Infrastruktur pendukung dibangun untuk memenuhi transaksi baik tunai maupun non tunai. Dengan infrastruktur yang ada, kanal untuk transaksi juga beragam mulai dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture (EDC)*, *mobile banking*, *internet banking* dan *QR code*. Selain itu, alat pembayaran selain uang kertas dan uang logam bervariasi, mulai dari alat pembayaran menggunakan kartu maupun uang elektronik.

Perkembangan Uang Beredar

Uang beredar merupakan kewajiban sistem moneter pada Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar dibagi menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2). Uang beredar dalam arti sempit meliputi uang kartal dan uang giral. Uang beredar dalam arti luas atau yang sering disebut sebagai likuiditas perekonomian meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif pada tahun 2022 dengan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki. Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan mempercepat transmisi kebijakan moneter. Pada paruh pertama 2019, kebijakan moneter difokuskan pada penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Gambar 4.1 Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), 2018–2023



Sumber: SEKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Komponen pendukung uang beredar M2, yaitu uang kuasi, simpanan giro dalam rupiah dan uang kartal di luar bank umum dan BPR (Gambar 4.1). Dari tahun ke tahun, semua komponen uang beredar M2 mengalami peningkatan. Komponen terbesar dari M2 adalah uang kuasi. Kontribusi komponen uang kuasi terhadap uang yang beredar M2 mencapai lebih dari 70 persen. Posisi ke dua komponen terbesar M2 adalah simpanan giro dalam rupiah sebesar 29 persen dan sisanya adalah surat berharga selain saham.

Perkembangan uang beredar M2 di awal tahun 2022 bulan Januari menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,99 persen (yoy) dibanding bulan yang sama tahun 2021. Siklus setiap tahunnya menunjukkan peredaran uang M2 di awal tahun selalu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tetapi, kondisi ini mengalami peningkatan hingga pada setiap akhir tahun kondisi M2 yang beredar selalu mencapai puncaknya atau menjadi yang tertinggi pada tahun tersebut (Tabel 4.1).

Salah satu komponen penyumbang uang beredar M2 adalah uang beredar M1 yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sebagai penyumbang komponen terbesar, fluktuasi uang beredar M1 sejalan dengan fluktuasi uang beredar M2. Perkembangan uang beredar M1 setiap bulan di tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat setiap bulannya. Uang beredar M1 mengalami kenaikan yang cukup tinggi di bulan April, Oktober dan Desember.

Kondisi ini dipicu adanya hari raya dan peningkatan penyaluran kredit produktif/investasi.

Tabel 4.1 Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah), 2021–2023

Akhir Periode	M2					
	M1			Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	Jumlah
	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2021						
Januari	712 529	1 049 766	1 762 296	4 983 838	21 274	6 767 408
Februari	698 227	1 086 537	1 784 763	5 012 979	20 045	6 817 788
Maret	692 478	1 134 913	1 827 391	5 049 972	18 201	6 895 564
April	732 644	1 118 307	1 850 951	5 095 802	17 634	6 964 386
Mei	743 534	1 118 233	1 861 767	5 124 161	18 165	7 004 093
Juni	739 006	1 176 423	1 915 429	5 198 175	16 457	7 130 061
Juli	758 703	1 174 588	1 933 291	5 210 210	17 059	7 160 560
Agustus	750 510	1 187 880	1 938 390	5 252 508	20 603	7 211 501
September	748 616	1 219 818	1 968 434	5 311 398	21 089	7 300 921
Oktober	766 704	1 304 714	2 071 418	5 400 094	20 192	7 491 704
November	775 051	1 339 652	2 114 703	5 438 523	20 094	7 573 320
Desember	831 234	1 450 967	2 282 200	5 565 578	22 675	7 870 453
2022						
Januari	765 015	1 384 536	2 149 552	5 474 170	23 068	7 646 789
Februari	795 951	1 399 667	2 195 618	5 470 961	23 556	7 690 135
Maret	792 518	1 462 073	2 254 591	5 529 751	26 608	7 810 949
April	896 318	1 430 891	2 327 208	5 556 189	28 087	7 911 484
Mei	820 155	1 482 756	2 302 911	5 524 848	26 427	7 854 187
Juni	815 316	1 524 134	2 339 450	5 526 503	24 795	7 890 747
Juli	822 043	1 474 003	2 296 045	5 530 342	19 164	7 845 552
Agustus	805 459	1 473 704	2 279 163	5 598 840	19 624	7 897 628
September	807 818	1 513 065	2 320 883	5 620 749	21 062	7 962 693
Oktober	808 649	1 730 418	2 539 067	5 657 949	26 038	8 223 055
November	840 492	1 627 459	2 467 951	5 805 021	24 378	8 297 350
Desember	897 799	1 710 998	2 608 797	5 894 662	24 563	8 528 022
2023						
Januari	830 373	1 591 801	2 422 174	5 822 056	27 608	8 271 838
Februari	813 834	1 589 760	2 403 594	5 871 477	25 577	8 300 648
Maret	832 817	1 575 602	2 408 419	5 861 271	23 594	8 293 283
April	895 719	1 577 150	2 472 869	5 856 023	23 457	8 352 350

Sumber: SEKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Uang kuasi adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada bank umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang, baik sebagai satuan

hitung, alat penyimpan kekayaan, maupun alat pembayaran. Uang kuasi sebagai komponen utama dari M2, pergerakannya disepanjang tahun 2022 (secara *yoy*) terus mengalami pertumbuhan. Laju pertumbuhan uang kuasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 9,84 persen (*yoy*) dan terendah terjadi pada bulan oktober sebesar 4,78 persen (*yoy*).

Perkembangan Uang Primer dan Komponennya

Uang primer adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/ BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Peredaran uang primer di Indonesia pada tahun 2022 secara umum cukup berfluktuatif (Tabel 4.2). Peredaran uang primer di Bulan Januari 2022 tercatat sebesar Rp1.205,76 triliun. Kenaikan peredaran uang primer yang cukup tinggi terjadi di Bulan April, Oktober dan Desember dengan masing-masing laju pertumbuhannya (*mom*) sebesar 13,02 persen, 11,05 persen dan 15,94 persen. Kondisi ini sejalan dengan fluktuasi uang beredar M2 yang dipengaruhi oleh adanya hari raya dan peningkatan penyaluran kredit produktif/investasi.

Uang kartal adalah salah satu komponen uang primer yang beredar di masyarakat, dan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai uang kertas dan uang logam yang digunakan sebagai alat pembayaran. Sepanjang tahun 2022, uang kartal (di luar bank umum dan BPR) yang diedarkan cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan uang kartal tersebut mengalami puncak pada Bulan April yaitu sebesar 22,34 persen (*yoy*). Apabila dilihat pada pertumbuhan secara bulanan (*mom*), pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada Bulan April dengan nilai sebesar 13,09 persen.

Komponen uang primer lainnya adalah kas bank umum dan BPR. Sepanjang tahun 2022, peredaran kas bank umum dan BPR cukup berfluktuatif dimana puncak peredaran terjadi pada Bulan April yaitu sebesar Rp. 408,93 triliun. Sepanjang tahun 2022 laju pertumbuhan peredaran kas umum dan BPR merupakan laju pertumbuhan terbesar terjadi di Bulan Januari tercatat sebesar 32,54 persen (*yoy*). Selanjutnya pada bulan Juli terjadi perlambatan laju pertumbuhan sebesar 3,13 persen (*yoy*).

Komponen selanjutnya adalah saldo giro bank umum pada BI. Saldo giro bank umum pada BI merupakan penempatan bank umum dalam bentuk giro rupiah pada BI yang digunakan dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Pada tahun 2022, saldo giro bank tercatat pada posisi Rp 316 triliun sampai Rp 695 triliun. Pertumbuhan tertinggi saldo giro bank terjadi di Bulan

Oktober dengan laju pertumbuhan sebesar 149 persen (yoy) dan 29,5 persen (mom).

Tabel 4.2 Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah), 2021–2023

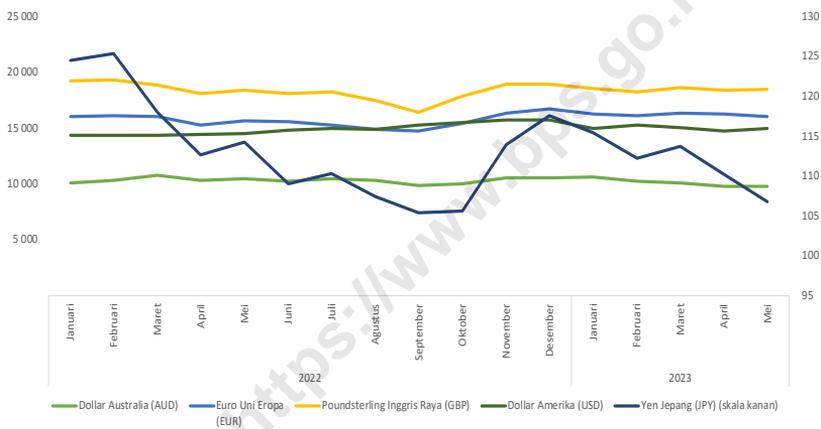
Akhir Periode	Uang Kartal yang Diedarkan		Giro Bank	Giro Perusahaan dan Perorangan	Jumlah
	Uang Kartal	Kas Bank			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021					
Januari	712 529	90 642	172 949	2 801	978 922
Februari	698 227	85 383	186 961	963	971 534
Maret	692 478	90 204	191 042	782	974 506
April	732 644	110 766	193 648	779	1 037 837
Mei	743 534	107 725	240 123	1 053	1 092 435
Juni	739 006	93 378	235 722	1 685	1 069 791
Juli	758 703	94 189	256 836	5 387	1 115 114
Agustus	750 510	93 419	256 202	1 488	1 101 618
September	748 616	93 111	283 751	1 880	1 127 359
Oktober	766 704	87 579	278 278	1 367	1 133 928
November	775 051	92 729	287 726	1 989	1 157 494
Desember	831 234	128 579	389 178	2 183	1 351 172
2022					
Januari	765 015	120 139	316 364	4 240	1 205 758
Februari	795 951	85 547	308 956	2 235	1 192 689
Maret	792 518	98 690	382 994	9 726	1 283 929
April	896 318	145 005	408 934	885	1 451 141
Mei	820 155	109 656	360 600	2 533	1 292 944
Juni	815 316	97 169	423 875	768	1 337 129
Juli	822 043	91 235	513 087	3 308	1 429 673
Agustus	805 459	97 198	564 038	490	1 467 186
September	807 818	97 964	537 082	752	1 443 615
Oktober	808 649	97 208	695 530	1 791	1 603 177
November	840 492	94 711	543 746	767	1 479 716
Desember	897 799	128 684	687 245	1 890	1 715 619
2023					
Januari	830 373	99 673	612 113	2 805	1 544 964
Februari	813 834	91 534	575 398	918	1 481 684
Maret	832 817	115 975	556 470	793	1 506 054
April	895 719	135 305	579 021	4 631	1 614 676
Mei	859 346	112 631	562 922	2 940	1 537 839

Sumber: SEKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Nilai Tukar Rupiah Menguat

Perkembangan kurs rupiah terhadap beberapa mata uang utama seperti dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), Euro (EUR), poundsterling (GBP) dan Yen (JPY), terlihat pada gambar 4.2. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sepanjang tahun 2022 cenderung melemah. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, Euro dan Poundsterling. Kondisi yang berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap Yen yang sepanjang tahun 2022 cenderung menguat, meski di akhir tahun kondisinya melemah. Memasuki tahun 2023, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, Euro, Poundsterling, dan Yen mengalami penguatan. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung stabil.

Gambar 4.2 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, 2022–2023



Sumber: SEKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Pelemahan nilai tukar rupiah didorong oleh menurunnya pasokan mata uang asing di dalam negeri karena adanya arus modal keluar. Kebijakan *The Federal Reserve* atau *The Fed* yang menaikkan suku bunga acuan bank sentral AS menjadi penyebab banyaknya arus modal keluar. Dengan kenaikan suku bunga, investor lebih memilih menyimpan uangnya di AS yang menjanjikan imbal hasil lebih besar dan berisiko rendah daripada menyimpannya di Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral mengeluarkan otoritas dengan mengatur agar selisih suku bunga dengan *The Fed* tidak terlalu signifikan. Hasilnya, imbal hasil pasar keuangan di Indonesia masih menarik investor sehingga arus modal keluar dapat ditahan.

Isu pengurangan ketergantungan perekonomian suatu negara terhadap dolar Amerika (dedolarisasi) sedang banyak diperbincangkan. Dolar Amerika sebagai mata uang dominan untuk perdagangan Indonesia dengan berbagai negara mulai bergeser posisinya dan digantikan dengan beberapa mata uang asing seperti Yen, Yuan, Won, Ringgit dan Baht melalui perjanjian bilateral. Fenomena ketergantungan pada dolar menunjukkan suatu integrasi

dalam perekonomian global. Kondisi ini akan menyebabkan likuiditas berdenominasi asing mempengaruhi rentannya perekonomian domestik dan kebijakan moneter yang tidak independen.

Tabel 4.3 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, 2021–2023

Akhir Periode	Jenis Valuta				
	Dollar Australia (AUD)	Euro Uni Eropa (EUR)	Poundsterling Inggris Raya (GBP)	Yen Jepang (JPY)	Dollar Amerika (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021					
Januari	10 783	17 051	19 311	135	14 084
Februari	11 196	17 333	19 948	134	14 229
Maret	11 080	17 065	20 004	132	14 572
April	11 253	17 529	20 171	133	14 468
Mei	11 061	17 453	20 321	130	14 310
Juni	10 915	17 255	20 061	131	14 496
Juli	10 726	17 210	20 224	132	14 491
Agustus	10 489	16 963	19 784	131	14 374
September	10 373	16 692	19 323	129	14 307
Oktober	10 667	16 460	19 525	125	14 199
November	10 242	16 173	19 127	127	14 340
Desember	10 344	16 127	19 200	124	14 269
2022					
Januari	10 077	16 019	19 233	124	14 381
Februari	10 328	16 153	19 341	125	14 371
Maret	10 783	16 003	18 854	118	14 349
April	10 310	15 271	18 087	113	14 418
Mei	10 454	15 653	18 372	114	14 544
Juni	10 209	15 610	18 074	109	14 848
Juli	10 468	15 273	18 223	110	14 958
Agustus	10 303	14 917	17 456	107	14 875
September	9 824	14 716	16 436	105	15 247
Oktober	9 980	15 465	17 901	106	15 542
November	10 575	16 328	18 954	114	15 737
Desember	10 581	16 713	18 926	118	15 731
2023					
Januari	10 613	16 288	18 540	115	14 979
Februari	10 266	16 120	18 275	112	15 274
Maret	10 108	16 345	18 603	114	15 062
April	9 765	16 298	18 380	110	14 751
Mei	9 781	16 003	18 499	107	14 969

Sumber: SEKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Suku Bunga Acuan Tetap Terjaga

Arah suku bunga kebijakan moneter tahun 2022 lebih ditekankan untuk menjaga inflasi inti (*core inflation*) tetap berada pada rentang $3,0 \pm 1$ persen. Bank Indonesia dari kebijakan sisi moneter dan pemerintah dari kebijakan fiskal bekerjasama untuk memitigasi dampak tingginya harga energi dan pangan global yang memicu inflasi dalam negeri. Melalui pemberian subsidi energi dan bantuan sosial, inflasi yang bersumber dari harga-harga yang diatur pemerintah dapat ditekan. Selain itu, koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi kelompok pangan yang bergejolak juga semakin ditingkatkan.

Suku bunga atau *BI rate* adalah suatu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sejak Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru untuk menggantikan *BI rate* yaitu *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)*. Suku bunga kebijakan baru atau *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* digunakan karena dinilai dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil.

Dari awal tahun hingga Juli 2022, suku bunga BI7DRR tetap dipertahankan di nilai 3,50 persen (Tabel 4.4). Kondisi ini sejalan dengan inflasi inti yang masih terjaga sepanjang periode tersebut meski tekanan eksternal yang terkait dengan peningkatan risiko stagflasi di berbagai negara mengalami peningkatan. Selain karena terkendalinya inflasi inti, penyebab lain suku bunga BI7DDR yang tetap dipertahankan selama semester pertama tahun 2022 adalah masih stabilnya nilai tukar dan dukungan kebijakan fiskal untuk menjaga harga BBM.

Kenaikan harga energi dan pangan global terus berlanjut. Dampaknya terjadi pada kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi ke depannya. Bank Indonesia merespon kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi sebagai dampak kenaikan harga pangan yang bergejolak dan penyesuaian harga BBM dengan menaikkan suku bunga BI7DDR sebesar 25 bps dari yang semula 3,50 persen menjadi 3,75 persen pada Bulan Agustus 2022. Langkah ini diambil untuk memastikan terjaganya stabilitas inflasi. Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga BI7DDR masing-masing sebesar 50 bps pada Bulan September, Oktober dan November 2022 serta pada Bulan Desember 2022 sebesar 25 persen (Tabel 4.4). Peningkatan suku bunga tersebut dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti berada pada rentang yang telah ditetapkan. Selain itu, kenaikan suku bunga BI7DDR dilakukan untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Untuk mendukung tercapainya stabilitas moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) agar bergerak di sekitar suku bunga BI7DDR melalui operasi moneter. Pengendalian

Tabel 4.4 Perkembangan Suku Bunga PUAB dan 7-Day RR Rate, 2022–2023

Akhir Periode	Pasar Uang Antar Bank Rupiah Pagi		Pasar Uang Antar Bank Rupiah Sore		BI 7-day RR Rate
	1 Hari	Keseluruhan	1 Hari	Keseluruhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020					
Januari	3,05	3,21	3,03	3,07	3,75
Februari	2,80	3,17	2,80	2,95	3,50
Maret	2,79	2,95	2,79	2,85	3,50
April	2,80	2,90	2,79	2,80	3,50
Mei	2,80	2,97	2,79	2,94	3,50
Juni	2,80	2,88	2,80	2,85	3,50
Juli	2,80	2,88	2,83	2,93	3,50
Agustus	2,79	2,87	2,78	2,86	3,50
September	2,80	3,04	2,79	2,84	3,50
Oktober	2,80	2,84	2,80	2,83	3,50
November	2,79	2,82	2,79	2,80	3,50
Desember	2,78	2,83	2,78	3,01	3,50
2022					
Januari	2,79	2,80	2,78	2,78	3,50
Februari	2,79	2,89	2,79	2,82	3,50
Maret	2,79	2,92	2,79	3,43	3,50
April	3,50	3,51	3,49	3,50	3,50
Mei	2,79	2,87	2,79	2,81	3,50
Juni	2,80	2,94	2,79	3,07	3,50
Juli	2,80	2,91	2,80	3,08	3,50
Agustus	3,14	3,65	3,12	3,34	3,75
September	3,84	4,03	3,84	3,91	4,25
Oktober	4,26	4,43	4,24	4,26	4,75
November	4,81	5,07	4,81	5,01	5,25
Desember	5,03	5,16	5,01	5,26	5,50
2023					
Januari	5,34	5,52	5,41	5,42	5,75
Februari	5,62	5,73	5,62	5,65	5,75
Maret	5,67	5,75	5,55	5,59	5,75
April	5,69	5,81	5,72	5,79	5,75
Mei	5,65	5,85	5,60	5,74	5,75

Sumber: SEKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

suku bunga PUAB melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang Rupiah dengan cara penyerapan dan atau penolakan likuiditas. Suku bunga PUAB selalu mengalami kenaikan sepanjang tahun 2022, kecuali pada Bulan Mei dan Juli. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan penyaluran kredit oleh perbankan yang

ditandai dengan meningkatnya transaksi pada PUAB. Dengan kata lain, terjadi peningkatan pengelolaan likuiditas bank dalam jangka pendek.

Memasuki tahun 2023, suku bunga BI7DDR mengalami kenaikan sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen (Tabel 4.4). Sejalan dengan kenaikan BI7DDR, secara umum tingkat suku bunga PUAB hingga bulan Mei juga mengalami kenaikan. Kenaikan kedua suku bunga tersebut untuk menjaga ketersediaan pasokan likuiditas di pasar uang. Indikator dari terjaganya pasokan likuiditas tercermin dari semakin kecilnya nilai selisih antara suku bunga BI7DDR dan suku bunga PUAB.

Digitalisasi Sektor Keuangan

Digitalisasi mengubah cara kerja di banyak sektor ekonomi, termasuk di dalamnya sektor keuangan. Dari yang semula berjalan secara konvensional, sektor keuangan terus bergerak cepat beradaptasi dengan kemajuan digital untuk menjawab perkembangan zaman. Salah satu bentuk digitalisasi di sektor keuangan ada pada sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga yang berwenang serta cara kerja yang digunakan dalam memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban yang muncul karena kegiatan ekonomi.

Perubahan sistem pembayaran mengikuti evolusi pembayaran dengan berdasarkan unsur penggerak yang mencakup inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat serta kebijakan otoritas bank sentral. Secara garis besar, sistem pembayaran terbagi menjadi sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, sedangkan sistem pembayaran non tunai menggunakan instrumen yang beragam mulai dari alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, giro, nota debit maupun uang elektronik.

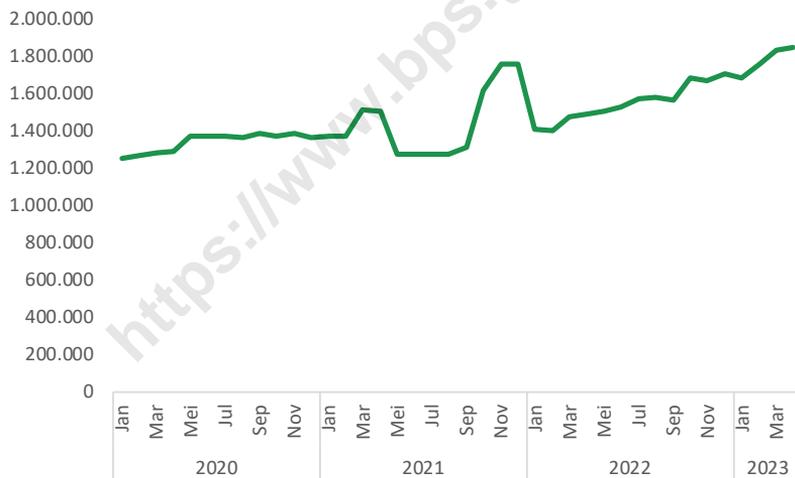
Bank Indonesia selaku bank sentral menyediakan infrastruktur untuk transaksi pembayaran non tunai. Cakupan pembayaran non tunai dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi nilai kecil (transaksi ritel). Transaksi nilai besar yang mempunyai nilai transaksi \geq Rp 1 miliar menggunakan infrastruktur Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Jenis transaksi ini banyak digunakan untuk transaksi antar bank atau transaksi keuangan. Sementara itu, transaksi nilai kecil yang mempunyai nilai transaksi $<$ Rp 1 miliar menggunakan infrastruktur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Jenis transaksi ini banyak digunakan untuk transaksi antar individu dan frekuensinya cukup tinggi.

Baik BI-RTGS, BI-SSSS maupun SKNBI mempunyai keterbatasan jam operasional dan akses kanal digital (*mobile* dan *internet banking*). Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan infrastruktur pembayaran ritel untuk skala nasional yang aman, lengkap, efisien dan bersifat *real time* yang diberi nama BI-FAST. Bank Indonesia mulai menerapkan

infrastruktur BI-FAST secara bertahap mulai Desember 2021 dengan prioritas awal pada transfer kredit antar individu. Selanjutnya, BI-FAST akan dikembangkan untuk transfer debit, *bulk* kredit dan permintaan pembayaran dengan penggabungan transaksi berbasis instrument, QRIS dan lintas negara.

Dalam mendukung sistem pembayaran menggunakan kartu, terdapat infrastruktur berupa mesin *electronic data capture* (EDC) yang dapat langsung terhubung ke rekening bank pengguna untuk selanjutnya dilakukan penghitungan transaksi pembayaran secara *real time*. Mesin EDC banyak terdapat pada penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi kartu kredit, kartu debit dan atau uang elektronik serta bekerjasama dengan bank-bank tertentu. Selama tiga tahun terakhir, jumlah mesin EDC mengalami tren peningkatan. Berdasarkan pada Gambar 4.3, peningkatan jumlah mesin EDC secara cepat terjadi pada tahun 2022 hingga sekarang. Hal ini menjadi indikasi semakin banyaknya transaksi non tunai yang terjadi pada masa pemulihan setelah pandemi covid-19.

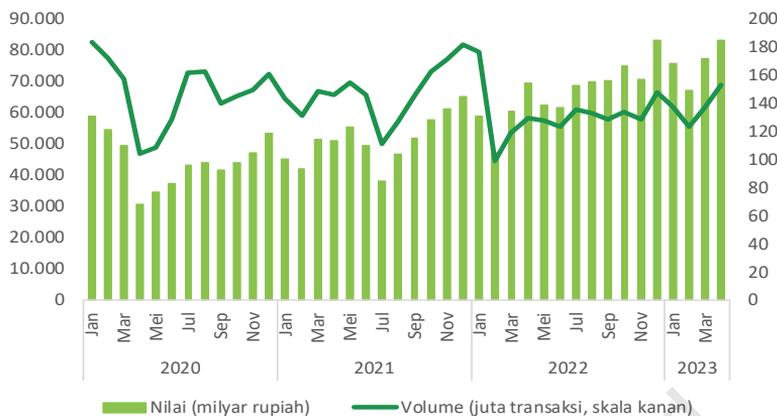
Gambar 4.3 Jumlah Mesin EDC (unit), 2020–2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Tren peningkatan jumlah mesin EDC selaras dengan nilai transaksi yang terjadi (Gambar 4.4). Selama tiga tahun terakhir, nilai transaksi pada mesin EDC mengalami tren peningkatan dengan peningkatan yang cukup tinggi terjadi mulai tahun 2022 atau pada masa pemulihan setelah pandemi covid-19. Tetapi, tren yang terjadi pada nilai transaksi berbeda dengan pola jumlah (volume) transaksi pada mesin EDC. Transaksi dengan menggunakan mesin EDC mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2022, peningkatan volume transaksi cukup berbeda dengan peningkatan nilai transaksi. Dengan kata lain, pada masa pemulihan setelah pandemi covid-19 terjadi peningkatan nilai transaksi pada setiap transaksi yang terjadi jika dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19.

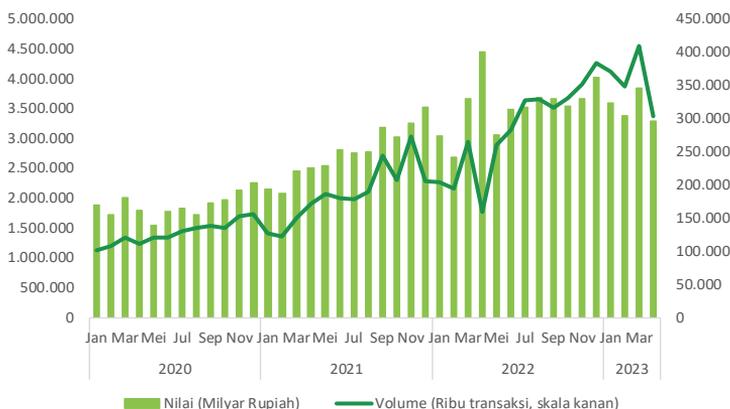
Gambar 4.4 Volume dan Nilai Transaksi pada Mesin EDC, 2022–2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Selain pembayaran menggunakan kartu dengan mesin EDC, terdapat juga kanal pembayaran untuk memfasilitasi transaksi non tunai tanpa menggunakan kartu. Kanal pembayaran ini dikembangkan dan dimiliki oleh bank secara mandiri untuk kepentingan nasabahnya dengan menggunakan berbagai teknologi seperti *short message service (SMS)*, *mobile*, *website*, *subscriber identity module tool kit*, dan atau *unstructured supplementary service data*. Yang paling terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat sekarang adalah layanan yang berbasis internet (*internet banking*). Dibandingkan dengan transaksi yang menggunakan mesin EDC, transaksi dengan *internet banking* mempunyai nilai transaksi yang lebih besar hampir 50 kali dan volume transaksi lebih besar 2000 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Gambar 4.5). Kenaikan nilai dan volume transaksi melalui *internet banking* ini tidak lepas dari fitur kemudahan, keamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan.

Gambar 4.5 Volume dan Nilai Transaksi Internet Banking, 2020–2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

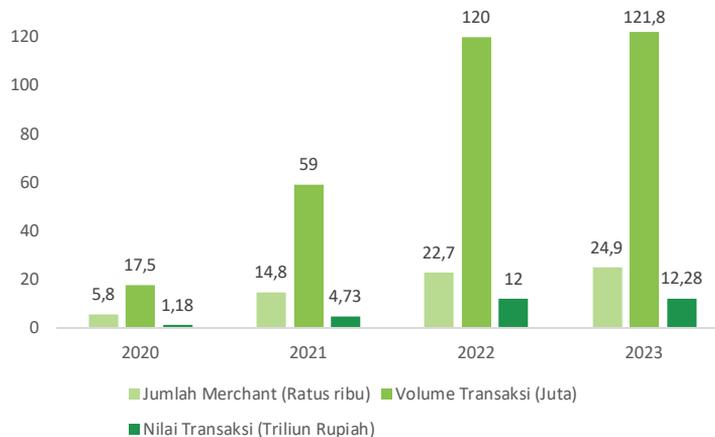
Gambar 4.6 Sebaran Merchant QRIS Regional per Mei 2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Gambar 4.6 Sebaran Merchant QRIS Regional per Mei 2023 Kanal transaksi non tunai lain yang sedang populer adalah pembayaran dengan menggunakan kode cepat (*quick code*). Bank Indonesia beserta penyelenggara jasa sistem pembayaran mengembangkan sistem *quick response code Indonesian standard* (QRIS) untuk mengakomodasi transaksi dengan QR code menjadi lebih mudah, cepat dan aman. Hingga Mei 2023, penjual barang atau jasa (*merchant*) yang menggunakan QRIS sudah tersebar di seluruh Indonesia. Konsentrasi *merchant* yang menggunakan QRIS paling banyak ada di wilayah dengan kondisi perputaran ekonomi yang cepat dan banyak seperti di Pulau Jawa, beberapa provinsi di Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau), Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 4.6).

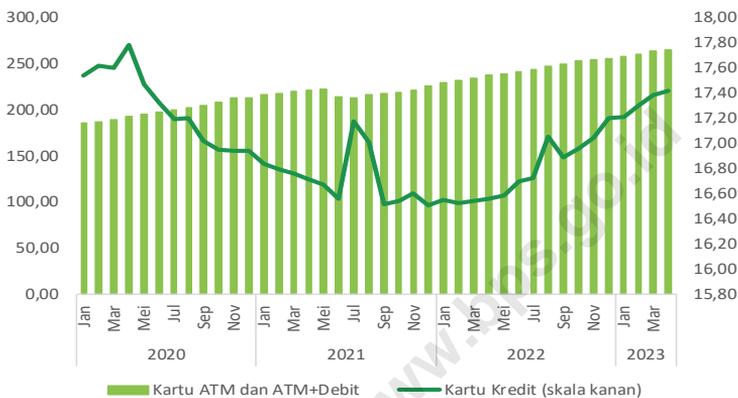
Gambar 4.7 Perkembangan Transaksi QRIS, 2020–2023



Sumber: Bank Indonesia, Kompas.id

Sejak tahun 2020, transaksi dengan menggunakan QRIS mengalami peningkatan yang sangat cepat. Jumlah *merchant* pengguna QRIS di tahun 2020 sekitar 5,8 ratus ribu, pada tahun 2023 penggunaanya mengalami kenaikan lebih dari 6 kali lipat atau sebesar 24,9 ratus ribu. Begitu juga dengan volume dan nilai transaksi yang terjadi. Selama 3 tahun terakhir, terjadi kenaikan volume transaksi hampir 7 kali lipat dan kenaikan nilai transaksi lebih dari 10 kali lipat (Gambar 4.7).

Gambar 4.8 Jumlah Kartu Kredit, Kartu ATM dan Kartu ATM + Debit (unit), 2020–2023



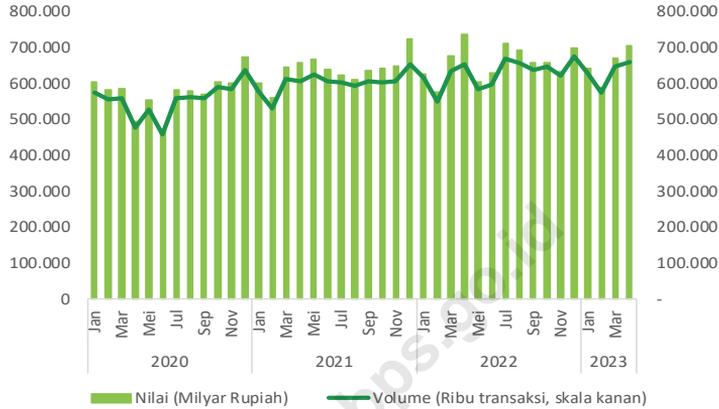
Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Pengembangan infrastruktur sektor keuangan tidak lepas dari pengembangan instrumen pembayaran untuk melengkapi keterpaduan digitalisasi. Salah satu instrumen pembayaran yang sudah lama dikembangkan adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Terdapat tiga jenis kartu alat pembayaran, yaitu kartu ATM dan ATM + debit serta kartu kredit. Selama 3 tahun terakhir, jumlah kartu ATM dan ATM + debit mengalami peningkatan. Berbeda halnya dengan jumlah kartu kredit. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah kartu kredit secara tren mengalami penurunan yang cukup tajam dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 dan baru mengalami peningkatan lagi sejak awal tahun 2022 (Gambar 4.8). Kondisi ini mencerminkan tingkat perekonomian individu yang membatasi pengeluaran pribadi selama pandemi covid-19 melalui pinjaman dari kartu kredit.

Berdasarkan volume dan nilai transaksi yang terjadi, penggunaan kartu ATM dan ATM + debit masih relatif stabil selama 3 tahun terakhir (Gambar 4.9). Hal ini mengindikasikan penggunaan kartu ATM dan ATM + debit lebih pada kegiatan ekonomi sehari-hari yang bersifat reguler dan tidak terlalu terganggu pada efek pandemi covid-19. Berbeda dengan volume dan nilai transaksi pada kartu kredit (Gambar 4.10). Pada tahun 2020-2021, terjadi penurunan volume dan nilai transaksi yang sejalan dengan penurunan permintaan kartu kredit. Baru setelah tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit demi sedikit hingga Bulan April 2023. Dibandingkan dengan pola nilai dan volume

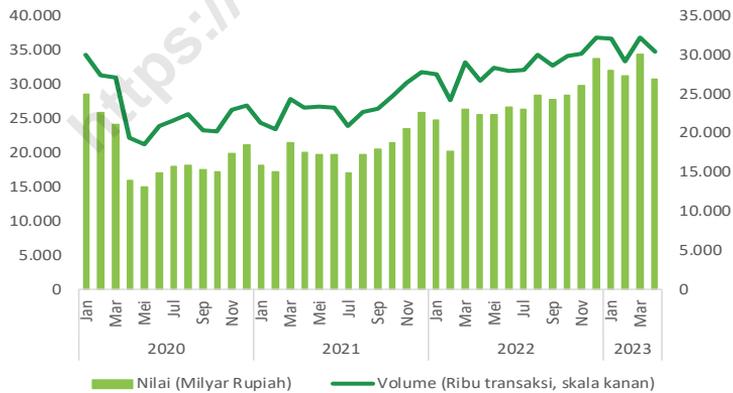
transaksi pada kartu ATM dan ATM + debit, terjadi *gap* antara kenaikan nilai dan volume transaksi pada kartu kredit sepanjang 3 tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan nilai transaksi pada kartu kredit per transaksi tidak sebesar pada nilai transaksi kartu ATM dan ATM + debit.

Gambar 4.9 Volume dan Nilai Transaksi Kartu ATM dan ATM + Debit, 2020–2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Gambar 4.10 Volume dan Nilai Transaksi Kartu Kredit, 2020–2023

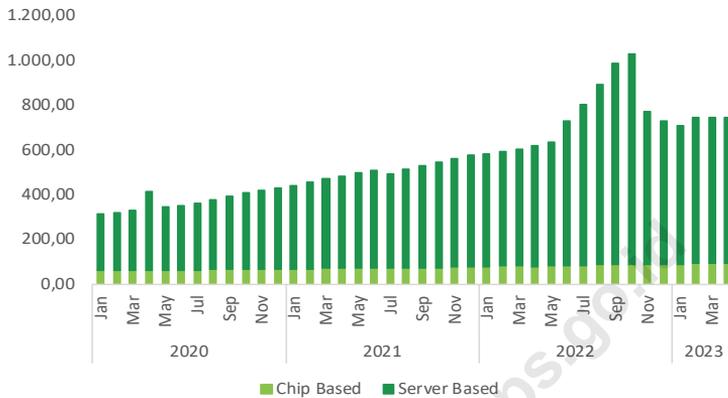


Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Instrumen alat pembayaran lain selain kartu ATM dan ATM + debit serta kartu kredit adalah uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang dibayarkan terlebih dahulu kepada penerbit untuk selanjutnya dikelola oleh penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang disimpan secara elektronik pada media seperti server atau chip. Pada perkembangannya, uang elektronik berbentuk server based lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan uang elektronik dalam bentuk chip based (Gambar

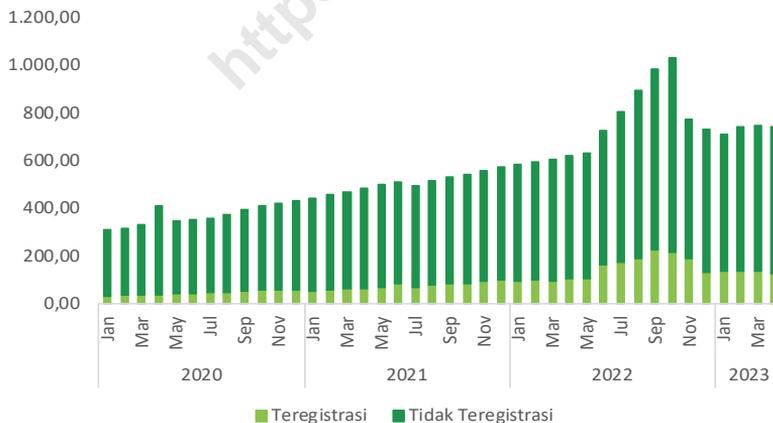
4.11). Tren jumlah kartu/ instrumen uang elektronik yang beredar mirip dengan tren jumlah kartu ATM dan ATM + debit, kenaikan yang lebih tinggi terjadi pada masa perekonomian bangkit lagi setelah pandemi Covid-19.

Gambar 4.11 Jumlah Kartu / Instrumen Uang Elektronik Berdasarkan Media Penyimpanan (juta unit), 2020–2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Gambar 4.12 Jumlah Kartu/Instrumen Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Data (juta unit), 2020–2023

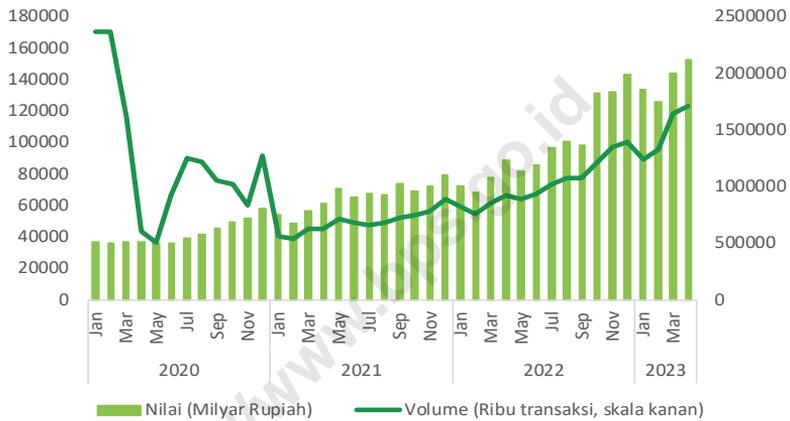


Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Berdasarkan pendaftaran identitas pengguna, uang elektronik dibedakan berdasarkan uang elektronik teregistrasi dan uang elektronik tidak teregistrasi. Uang elektronik teregistrasi mengharuskan pengguna mendaftarkan data dirinya pada penerbit uang elektronik, sedangkan pada uang elektronik tidak teregistrasi pengguna tidak perlu mendaftarkan data diri.

Terdapat juga perbedaan batas maksimal nilai uang elektronik yang tersimpan pada uang elektronik yang teregistrasi dan uang elektronik tidak teregistrasi. Pada uang elektronik teregistrasi, nilai maksimum yang bisa disimpan sebesar Rp 10 juta. Sedangkan pada uang elektronik tidak teregistrasi, nilai maksimum yang bisa disimpan sebesar Rp 2 juta. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah kartu/instrumen uang elektronik yang tidak teregistrasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kartu/instrumen uang elektronik yang teregistrasi (Gambar 4.12). Hal ini disebabkan karena kemudahan syarat dan penggunaan yang diterapkan pada uang elektronik yang tidak teregistrasi.

Gambar 4.13 Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik, 2020–2023



Sumber: SSKI Edisi Mei 2023, Bank Indonesia

Nilai transaksi uang elektronik mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir. Meskipun demikian, volume transaksi yang terjadi sempat mengalami penurunan yang tajam pada awal pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Selama ini uang elektronik yang beredar di masyarakat paling banyak digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Dengan adanya pembatasan mobilitas sosial, imbasnya ada pada terbatasnya gerak masyarakat terlebih yang menggunakan transportasi umum. Ketika kondisi perekonomian sudah pulih di akhir pandemi covid-19 dan pembatasan mobilitas sosial sudah tidak diterapkan lagi, nilai dan volume transaksi uang elektronik perlahan mengalami kenaikan (Gambar 4.13).

INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT



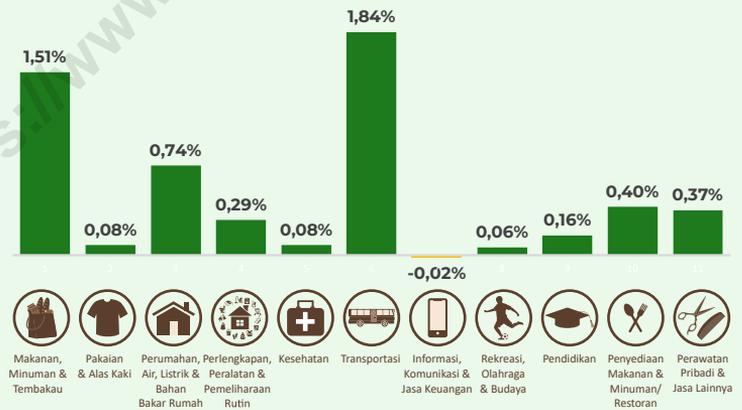
INFLASI 2022
5,51%
 (y-on-y)

Inflasi umum 2022 lebih tinggi dari target antara 2-3 persen, terutama disumbang inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered price*) dan inflasi inti

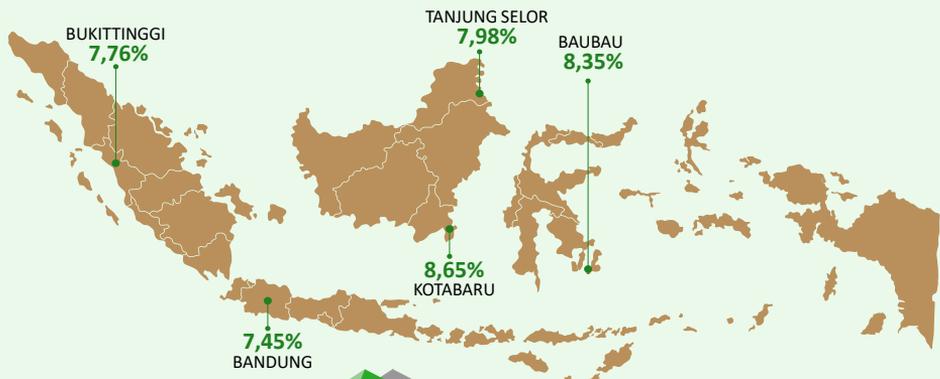
INFLASI INTI 3,36% (y-on-y) <i>andil: 2,20%</i>	INFLASI HARGA DIATUR PEMERINTAH 13,34% (y-on-y) <i>andil: 2,36%</i>	INFLASI BARANG BERGEJOLAK 5,61% (y-on-y) <i>andil: 0,95%</i>
--	--	---

ANDIL INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN TAHUN 2022

Inflasi tahun 2022 *y-on-y* disumbang oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu: kelompok pengeluaran transportasi sebesar **1,84 persen** dampak dari penyesuaian tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Bulan September 2022



KOTA DENGAN INFLASI TERTINGGI TAHUN 2022





“Inflasi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,51 persen, relatif terkendali dibanding inflasi beberapa negara maju, meskipun belum memenuhi target”

<https://www.bppt.go.id>

Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas di bidang perekonomian, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi menunjukkan kenaikan harga di tingkat konsumen atau masyarakat secara umum di suatu wilayah ditargetkan rendah dan stabil untuk menjaga daya beli serta mendorong konsumsi masyarakat sehingga juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, inflasi yang terlalu rendah juga tidak diharapkan karena kurang menarik investor atau pengusaha dan menandakan turunnya produktivitas ekonomi agregat.

Inflasi di Indonesia ditargetkan sebesar 3 persen pada tahun 2022 dan 2023 serta 2,5 persen pada tahun 2024 dengan deviasi masing-masing sebesar 1 persen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Untuk mencapai target inflasi tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain menjaga sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan (kebijakan moneter), serta mengendalikan ekspektasi dan menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta pemberian subsidi. Upaya tersebut dibutuhkan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Target inflasi Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 3 persen dengan deviasi 1 persen”

Inflasi dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tingkat konsumen yang menghasilkan Indeks Harga Konsumen (IHK) sehingga biasa disebut dengan inflasi IHK atau inflasi umum. Sejak tahun 2020, IHK dihitung menggunakan tahun dasar 2018 yang datanya dikumpulkan pada 90 kota inflasi pada 11 kelompok komoditas berdasarkan COICOP 2018. Perubahan metodologi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pola konsumsi masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang digunakan dalam penghitungan angka indeks berbeda antar kota inflasi, mengikuti pola konsumsi masyarakat pada daerah masing-masing.

Inflasi Indonesia 2022 Dibandingkan Inflasi Global

Ekonomi global dihadapkan pada tingkat inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melemah di tahun 2022. Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), inflasi global pada tahun 2022 tercatat sebesar 8,91 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,33. Isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi penyebab harga-harga komoditas global, khususnya energi dan pangan meningkat tajam dan menyebabkan tekanan inflasi di sebagian besar negara.

Belum seimbangnnya penawaran dan pemulihan penawaran pasca pandemi Covid-19 mengakibatkan belum stabilnya rantai pasokan komoditas global. Kondisi tersebut diperparah dengan perbaikan ekonomi global pasca pandemi Covid-19 yang belum stabil, dan juga diperburuk perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan inflasi melambung tinggi di tahun 2022. Berdasarkan data IMF, beberapa negara yang mengalami inflasi tinggi di tahun 2022 antara lain Argentina (94,79 persen), Turki (64,27 persen), dan Laos (39,30 persen).

Gambar 5.1 Perbandingan Inflasi Beberapa Negara *year-on-year* (persen), 2015-2022



Catatan: Inflasi Indonesia 2015-2019 menggunakan IHK 82 kota (2012=100) dan Inflasi 2020-2022 menggunakan IHK 90 kota (2018=100)

Sumber: *International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023*

Sementara itu, sejalan dengan tren inflasi global dan beberapa negara lain, inflasi Indonesia tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen. Meskipun belum dapat mencapai target yang ditentukan pemerintah, inflasi Indonesia relatif lebih terkendali dibanding inflasi beberapa negara maju. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi global dan juga inflasi Amerika Serikat dan Inggris, yang masing-masing inflasinya sebesar 6,63 persen dan 10,53 persen.

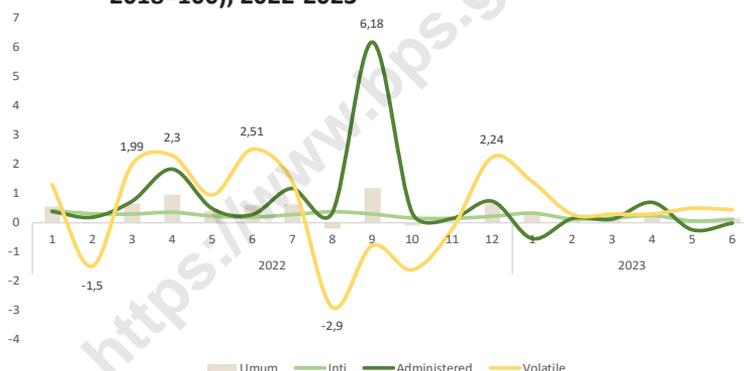
“Tidak stabilnya rantai pasok global, khususnya komoditas energi dan pangan, mengakibatkan inflasi tinggi di tahun 2022”

Inflasi pasca pandemi Covid-19 diperkirakan IMF mencapai puncaknya di tahun 2022. Inflasi global diprediksi akan turun menjadi 7 persen pada tahun 2023. Sedangkan inflasi Indonesia di tahun 2023 diprediksi akan lebih terkendali dan kembali ke sasaran yang telah ditentukan, yaitu antara 2 hingga 3 persen.

Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah Penyumbang Inflasi Tertinggi

Disagregasi angka inflasi dilakukan berdasarkan karakteristik atau sifat perubahan harga dari kelompok barang dan jasa menjadi inflasi inti (*core inflation*) dan inflasi non inti (*non-core inflation*). Inflasi inti bersifat cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, harga komoditas internasional, dan ekspektasi inflasi. Sedangkan inflasi non inti merupakan komponen inflasi yang cenderung lebih bergejolak (*volatile*) karena dipengaruhi faktor non fundamental dan relatif sementara. Inflasi non inti dibagi lagi ke dalam dua kelompok, yaitu inflasi harga yang diatur pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik dan lainnya, dan inflasi barang bergejolak, seperti harga beras, cabe dan lainnya yang dipengaruhi faktor musim panen, distribusi, dan bencana alam.

Gambar 5.2 Perkembangan Inflasi Umum, Inti, Harga yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak di Indonesia (m-to-m, 2018=100), 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan inflasi umum antar bulan di sepanjang 2022 relatif stabil, deflasi terdalam terjadi pada Bulan Agustus sebesar 0,21 persen (*m-to-m*) dan inflasi tertinggi pada Bulan September sebesar 1,17 persen (*m-to-m*). Inflasi inti relatif stabil berkisar antara 0,15 persen dan 0,42 persen. Sementara itu, komponen inflasi harga yang diatur pemerintah mengalami gejolak relatif stabil, kecuali pada Bulan September yang mencapai 6,18 persen akibat penyesuaian tarif BBM. Inflasi barang bergejolak di sepanjang 2022 mengalami deflasi terendah pada Agustus 2022 hingga 2,9 persen akibat penurunan harga beberapa komoditas. Sedangkan inflasi barang bergejolak tertinggi terjadi pada pertengahan dan akhir tahun 2022, yaitu sebesar 2,30 pada Bulan April dan 2,51 persen pada Bulan Juni. Kenaikan beberapa komoditas akibat kondisi cuaca yang menyebabkan terganggunya produksi mendorong inflasi di Bulan Juni. Sedangkan, inflasi barang bergejolak di Bulan April yang tinggi dipengaruhi oleh hara raya idul fitri. Momen tersebut juga berpengaruh pada inflasi harga yang diatur pemerintah, yang mencapai 0,73 persen. Hingga semester pertama tahun 2023, inflasi umum cenderung lebih stabil.

Tabel 5.1 Inflasi dan Andil Inflasi (Persen), 2021-2023 (2018=100)

Tahun/Bulan	Umum		Inti		Harga yang Diatur Pemerintah		Barang Bergejolak	
	Inflasi	Inflasi	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2021	1,87	1,56			1,79		3,20	
2022	5,51	3,36	2,20		13,34	2,36	5,61	
Januari	0,56	0,42	0,27		0,38	0,07	1,30	
Februari	-0,02	0,31	0,20		0,18	0,03	-1,50	
Maret	0,66	0,30	0,20		0,73	0,13	1,99	
April	0,95	0,36	0,24		1,83	0,32	2,30	
Mei	0,40	0,23	0,15		0,48	0,09	0,94	
Juni	0,61	0,19	0,12		0,27	0,05	2,51	
Juli	0,64	0,28	0,18		1,17	0,21	1,41	
Agustus	-0,21	0,38	0,24		0,33	0,06	-2,90	
September	1,17	0,30	0,20		6,18	1,11	-0,79	
Oktober	-0,11	0,16	0,10		0,33	0,06	-1,62	
November	0,09	0,15	0,10		0,14	0,03	-0,22	
Desember	0,66	0,22	0,14		0,73	0,14	2,24	
2023								
Januari	0,34	0,33	0,21		-0,55	-0,11	1,40	
Februari	0,16	0,13	0,08		0,14	0,03	0,28	
Maret	0,18	0,16	0,10		0,12	0,03	0,29	
April	0,33	0,25	0,16		0,69	0,13	0,29	
Mei	0,09	0,06	0,04		-0,25	-0,04	0,49	
Juni	0,14	0,12	0,08		-0,02	-0,01	0,44	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi Indonesia selama tahun 2022 sebesar 5,51 persen (*y-o-y*) disumbang paling besar oleh inflasi harga yang diatur pemerintah. Inflasi komponen tersebut mencapai 13,34 persen dan sumbangannya terhadap angka inflasi umum mencapai 2,36 persen. Tingginya inflasi harga yang diatur pemerintah merupakan pengaruh dari adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada 1 September 2022. Penyesuaian tersebut dilakukan pemerintah menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah acuan global akibat prospek berkurangnya pasokan karena berkurangnya produksi OPEC+ dan juga diperparah dengan konflik perang Rusia dan Ukraina.

Dampak kenaikan BBM pada umumnya berpengaruh pada kenaikan harga barang-barang lain secara umum. Hal tersebut dikarenakan biaya mobilitas untuk rantai distribusi barang-barang juga turut lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya

masyarakat yang berpendapatan tetap. Merespon hal tersebut, pemerintah memberikan subsidi atas kenaikan harga BBM sebagai bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun (djpb.kemenkeu.go.id, 15 November 2022). Bantalan sosial berupa bantuan dana diharapkan dapat menjaga kestabilan daya beli masyarakat di tengah naiknya harga BBM.

Inflasi pada komponen inti pada tahun 2022 sebesar 3,36 persen (*y-o-y*) dan menyumbang sekitar 2,20 persen pada inflasi umum. Inflasi inti pada tahun tersebut relatif terjaga rendah sejalan dengan rendahnya dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM, hal tersebut juga dipengaruhi oleh bantalan sosial yang diberikan pemerintah. Sementara itu, inflasi barang bergejolak cukup terkendali di tahun 2022. Inflasi barang bergejolak sebesar 5,61 persen (*y-o-y*) dan menyumbang sekitar 0,95 persen terhadap inflasi umum. Terkendalinya inflasi barang bergejolak merupakan salah satu hasil dari koordinasi TPIP-TPID dan GNPIP dalam menjaga kestabilan pasokan dan kelancaran distribusi.

Secara umum, harga barang di Indonesia di setiap bulan tahun 2022 mengalami inflasi, kecuali pada Bulan Februari, Agustus, dan Oktober yang mengalami deflasi. Deflasi terendah terjadi pada Bulan Agustus 2022, yaitu sebesar 0,21 persen (*m-to-m*). Deflasi disumbang oleh deflasi barang bergejolak sebesar 2,90 persen (*m-to-m*) yang disebabkan turunnya harga komoditas cabai dan bawang merah sebagai pengaruh dari naiknya pasokan dari daerah produksi.

Inflasi umum tertinggi terjadi pada Bulan September 2022, sebesar 1,17 persen (*m-to-m*). Inflasi pada bulan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga di kelompok barang yang diatur pemerintah. Peningkatan harga akibat penyesuaian harga BBM Subsidi per 1 September 2022. Dampak langsung dari kenaikan harga BBM terlihat dari inflasi harga yang diatur pemerintah pada Bulan September yang mencapai 6,18 persen dibanding periode sebelumnya.

Inflasi umum yang juga relatif tinggi dibanding bulan lainnya terjadi pada Bulan April 2022, yaitu sebesar 0,95 persen (*m-to-m*). Inflasi pada periode waktu tersebut dipengaruhi oleh momen ramadan dan hari raya idul fitri. Kenaikan mobilitas di momen hari raya idul fitri berpengaruh pada peningkatan inflasi harga yang diatur pemerintah di Bulan April 2022, yaitu sebesar 1,83 persen (*m-to-m*). Selain itu, inflasi harga yang diatur pemerintah juga paling utama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis pertamax serta harga LPG di tingkat eceran. Sedangkan inflasi barang bergejolak juga cukup tinggi, mencapai 2,30 persen (*m-to-m*). Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan tersebut antara lain minyak goreng, daging dan telur ayam ras, dan ikan segar. Tingginya permintaan pada bulan ramadan dan juga kendala cuaca menyebabkan inflasi pada komoditas tersebut.

Berbeda dengan momen ramadan dan hari raya idul fitri 2022, inflasi pada momen yang sama di tahun 2023 lebih rendah dan stabil. Pada Bulan April 2023, inflasi umum tercatat sebesar 0,33 persen (*m-to-m*). Inflasi inti terkendali pada 0,16 persen. Sedangkan inflasi harga yang diatur pemerintah dan inflasi barang bergejolak juga relatif rendah pada 0,69 persen dan 0,29

persen. Inflasi barang ber gejolak pada momen tersebut cukup terkendali karena panen yang berlangsung pada Bulan Maret dan April. Selain itu, dukungan cuaca juga menunjang pasokan pangan khususnya untuk komoditas hortikultura. Salah satu faktor utama capaian inflasi pada momen tersebut adalah hasil koordinasi yang kuat antara TPIP dan TPID.

Inflasi Kelompok Pengeluaran Transportasi Tertinggi di Tahun 2022

Dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 di tahun 2022, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat kembali meningkat. Kondisi tersebut juga berdampak pada naiknya inflasi hingga 5,51 persen (*y-o-y*) di tahun 2022. Angka tersebut disumbang oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi 0,36 persen.

Inflasi tertinggi dialami oleh kelompok pengeluaran transportasi sebesar 15,26 persen (*y-o-y*), kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen (*y-o-y*), dan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,83 persen (*y-o-y*). Inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi menyumbang 1,84 persen terhadap inflasi umum, tertinggi dibanding kelompok pengeluaran lainnya. Sedangkan inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 1,51 persen terhadap inflasi umum.

Tabel 5.2 Laju dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021-2022 (2018=100)

Kelompok Pengeluaran (1)	2021		2022	
	Inflasi (2)	Andil (3)	Inflasi (4)	Andil (5)
Umum	1,87	1,87	5,51	5,51
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,09	0,79	5,83	1,51
Pakaian dan Alas Kaki	1,53	0,08	1,40	0,08
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,76	0,15	3,78	0,74
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,66	0,16	4,86	0,29
Kesehatan	1,68	0,04	2,87	0,08
Transportasi	1,58	0,19	15,26	1,84
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,07	0,00	-0,36	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,13	0,02	3,04	0,06
Pendidikan	1,60	0,09	2,77	0,16
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	2,68	0,24	4,49	0,40
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,70	0,11	5,91	0,37

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS), Badan Pusat Statistik

Tingginya inflasi kelompok pengeluaran transportasi dipengaruhi oleh disesuaikannya tarif BBM bersubsidi oleh pemerintah sebagai imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Naiknya harga BBM juga berpengaruh pada peningkatan tarif angkutan, baik angkutan udara, kereta api, dan juga angkutan dalam kota yang menyebabkan inflasi secara keseluruhan pada kelompok pengeluaran transportasi. Inflasi kelompok pengeluaran transportasi mencapai 8,88 persen (*m-to-m*) pada Bulan September 2022, merupakan respon langsung dari penyesuaian tarif pada awal bulan tersebut.

Komoditas emas perhiasan dominan menyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi kelompok pengeluaran tersebut mencapai 1,14 persen (*m-to-m*) pada Bulan April 2022. Kenaikan harga emas perhiasan di Indonesia seiring dengan harga emas dunia yang juga naik di sepanjang Maret 2022. Naiknya harga emas dunia diakibatkan dorongan permintaan emas sebagai aset yang aman di tengah belum meredanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga emas juga didorong oleh kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh *The Federal Reserve* (market.bisnis.com, 31 Maret 2022).

Sementara itu, pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau terdapat beberapa komoditas yang dominan dalam menyumbang inflasi, antara lain: beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, ikan segar, bawang merah, rokok putih, tomat, dan tahu mentah. Di sisi lain, beberapa komoditas pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi, dengan sumbangan terbesar dari komoditas minyak goreng dan cabai rawit. Naiknya harga beras di tahun 2022 juga menjadi salah satu dampak limpahan dari kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada September 2022. Selain itu, turunnya produksi beras nasional di kuartal keempat 2022 khususnya Bulan Desember juga turut berpengaruh pada kenaikan harga beras (nasional.kontan.co.id, 2 Desember 2022).

Inflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau juga disumbang oleh komoditas rokok. Sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok, pemerintah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berlaku sejak awal tahun 2022. Kenaikan tarif diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Kenaikan tarif CHT untuk produk tembakau rata-rata hingga 12 persen. Harga Jual Eceran (HJE) terendah rokok juga mengalami kenaikan menyesuaikan kenaikan tarif CHT. Sementara itu, inflasi pada komoditas telur ayam ras, ikan segar, dan komoditas dominan lainnya dipengaruhi oleh penurunan produksi dan faktor cuaca yang kurang baik.

Harga CPO dunia yang meroket pada akhir 2021 hingga awal 2022 menyebabkan lonjakan harga minyak goreng curah dan kemasan di tingkat konsumen. Per 1 Februari, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET), masing-masing untuk minyak goreng curah Rp 11.500, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.000 dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000. Penetapan HET tersebut membawa dampak terjadinya kelangkaan

stok minyak goreng eceran. Dengan kondisi tersebut, pemerintah kembali melepas harga minyak goreng keekonomian mekanisme pasar. Hal tersebut mendapatkan respon banyaknya pasokan minyak goreng dengan harga melambung di pasar. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk menekan harga minyak goreng dalam negeri, termasuk menerapkan wajib pemenuhan domestik dan harga domestik. Kebijakan tersebut berhasil diikuti dengan terus turunnya harga minyak goreng, hingga mencapai titik stabil pada harga perekonomian hingga menjadi salah satu komoditas yang mengalami deflasi.

Satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2022 adalah kelompok pengeluaran komunikasi, informasi, dan jasa keuangan. Komoditas yang dominan dalam deflasi tersebut adalah biaya administrasi transfer uang dan telepon seluler. Hal tersebut merupakan pengaruh diberlakukannya BI-FAST mulai akhir tahun 2021 yang menurunkan biaya transfer antar bank dari Rp 6.500 menjadi Rp 2.500.

Tabel 5.3 Laju Inflasi Indonesia Gabungan 90 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021-2023 (2018=100)

Tahun/Bulan	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2021	3,09	1,53	0,76	2,66	1,68	1,58
2022	5,83	1,40	3,78	4,86	2,87	15,26
Januari	1,17	0,43	0,51	0,79	0,24	0,02
Februari	-0,84	0,09	0,25	0,45	0,33	0,07
Maret	1,47	0,17	0,41	0,50	0,28	0,42
April	1,76	-0,01	0,28	0,66	0,31	2,42
Mei	0,78	-0,20	0,10	0,43	0,19	0,65
Juni	1,77	0,16	0,10	0,53	0,17	0,30
Juli	1,16	0,23	0,47	0,25	0,08	1,13
Agustus	-1,80	0,02	0,58	0,25	0,11	-0,08
September	-0,30	0,20	0,16	0,35	0,57	8,88
Oktober	-0,97	0,09	0,18	0,18	0,21	0,35
November	0,00	0,12	0,07	0,23	0,20	0,01
Desember	1,57	0,09	0,63	0,15	0,14	0,45
2023						
Januari	1,16	0,10	0,35	0,24	0,40	-1,15
Februari	0,48	0,20	0,06	0,19	0,23	-0,22
Maret	0,35	0,17	-0,26	0,21	0,00	0,54
April	0,34	0,61	0,07	0,23	0,26	0,84
Mei	0,48	-0,46	0,05	0,20	0,11	-0,56
Juni	0,39	0,08	0,10	0,08	0,23	-0,10

(lanjutan)

Tahun/Bulan	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Umum
2021	-0,07	1,13	1,60	2,68	1,70	1,87
2022	-0,36	3,04	2,77	4,49	5,91	5,51
Januari	-0,13	0,41	0,08	0,36	0,62	0,56
Februari	-0,04	0,34	0,07	0,53	0,60	-0,02
Maret	0,00	0,17	0,01	0,32	1,14	0,66
April	0,00	0,20	0,00	0,55	0,75	0,95
Mei	0,03	0,30	0,01	0,54	0,32	0,40
Juni	-0,04	0,12	0,01	0,33	0,16	0,61
Juli	-0,01	0,33	0,34	0,34	0,27	0,64
Agustus	-0,03	0,21	1,85	0,33	0,29	-0,21
September	-0,03	0,31	0,21	0,57	0,28	1,17
Oktober	-0,07	0,16	0,15	0,30	0,24	-0,11
November	0,02	0,22	0,02	0,10	0,44	0,09
Desember	-0,06	0,23	0,01	0,14	0,66	0,66
2023						
Januari	0,01	0,25	0,12	0,33	0,84	0,34
Februari	-0,02	0,07	0,03	0,17	0,11	0,16
Maret	-0,03	0,11	0,00	0,24	0,28	0,18
April	-0,02	0,05	0,00	0,34	0,68	0,33
Mei	0,01	0,10	0,01	0,15	0,14	0,09
Juni	0,00	0,12	0,01	0,22	-0,04	0,14

Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju inflasi di semua kelompok pengeluaran pada tahun 2023 lebih stabil dan rendah. Inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau tercatat 1,16 persen (*m-to-m*) pada Januari 2023, tertinggi pada semester pertama 2023. Inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut merupakan akibat dari kenaikan tarif CHT alias cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023 yang menaikkan harga barang secara umum. Rata-rata kenaikan tarif CHT sebesar 10 persen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris (ekonomi.republika.co.id, 2 Januari 2023).

Kelompok pengeluaran transportasi mengalami deflasi hingga 1,15 persen pada Bulan Januari 2023. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi harga transportasi umum setelah sempat naik pada natal dan tahun baru. Selain itu, Pertamina juga mengumumkan penurunan harga BBM nonsubsidi

sejak 3 Januari. Jenis BBM yang mengalami penurunan harga pada periode tersebut antara lain Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Laju Inflasi di 90 Kota Inflasi Indonesia

Pengukuran tingkat perubahan harga di tingkat konsumen dilaksanakan BPS melalui Survei Biaya Hidup (SBH). Sejak tahun 2018, SBH dilaksanakan pada 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Sumber tekanan inflasi di suatu daerah bergantung dan dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing daerah. Perbedaan karakteristik sumber tekanan harga di masing-masing daerah antara lain karena infrastruktur logistik, kemampuan produksi pangan lokal, kebijakan harga yang diatur pemerintah, serta struktur pasar di daerah (Utari dkk, 2016).

Pada tahun 2022, dari seluruh 90 kota dilaksanakannya Survei Biaya Hidup (SBH), terjadi banyak kota yang mengalami inflasi. Sebanyak 63 kota tingkat inflasinya di atas tingkat inflasi nasional 5,51 persen ($y-o-y$). Beberapa wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi pada tahun tersebut antara lain: Kotabaru sebesar 8,65 persen ($y-o-y$), Baubau sebesar 8,35 persen ($y-o-y$), dan Tanjung Selor sebesar 7,98 persen ($y-o-y$).

Isu tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan menjadi isu serius bagi pemerintah dan memerlukan perkuatan koordinasi dan kerja sama dari TPID Kotabaru dan TPID Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kotabaru, inflasi di Kotabaru yang tinggi disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang berpengaruh pada kenaikan harga tiket pesawat, tiket penyeberangan kapal ferry, dan juga tiket transportasi darat. Faktor cuaca dan gagal panen juga menjadi penyebab kurangnya pasokan komoditas sayuran dan beras di pasaran. Selain itu, ditemukan juga praktek monopoli dalam perdagangan telur, daging sapi, dan daging ayam yang membuat harga komoditas tersebut melambung tinggi. Untuk mengatasi isu tersebut, pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan strategi pengendalian inflasi secara inovatif dan disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut.

Tingginya inflasi di Kota Baubau Sulawesi Tenggara yang mencapai 8,35 persen ($y-o-y$)

pada tahun 2022 paling dominan disumbang dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,11 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar, antara lain: beras, ikan cakalang/ikan sisik, ikan layang/ikan benggol, tomat, kue kering berminyak, rokok kretek filter, roti manis, diapers, ikan selar/ikan tude, serta telur ayam ras. Naiknya

“Inflasi tahun 2022 Kabupaten Kotabaru tertinggi di banding kabupaten/kota lain, mencapai 8,65 persen ($y-o-y$)”

harga beras yang terjadi sejak Bulan Oktober 2022 menjadi pemicu inflasi di Baubau. Kenaikan harga eceran beras diakibatkan oleh kenaikan harga di tingkat *supplier* dari Sulawesi Selatan dan Konawe. Kota Baubau sendiri bukan merupakan daerah penghasil beras, tetapi menjadi pusat perekonomian di Kepulauan Buton sehingga pasokan beras dinilai tidak mencukupi meskipun distribusi beras lancar dan tidak ada penimbunan (rri.go.id, 24 Januari 2023).

Tabel 5.4 Laju Inflasi 90 Kota di Indonesia, 2021-2023 (2018=100)

Kota	2021	2022	2023					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meulaboh	2,07	6,56	0,76	0,39	-0,66	-0,70	0,58	0,47
Banda Aceh	2,41	6,00	0,61	0,57	-0,57	0,18	0,13	0,06
Lhokseumawe	1,97	5,37	0,75	0,51	-0,31	-0,42	0,51	0,07
Sibolga	1,86	6,43	1,46	0,32	-0,66	0,27	0,16	0,62
Pematang Siantar	2,12	6,16	0,98	-0,04	-0,30	-0,25	0,45	0,52
Medan	1,70	6,10	0,86	-0,38	-0,30	-0,20	0,24	0,29
Padangsidempuan	1,49	6,40	1,16	0,42	-0,17	-0,04	0,49	0,21
Gunungsitoli	0,54	5,74	1,87	-0,98	-0,91	-0,42	0,38	0,21
Padang	1,37	7,38	0,45	0,13	-0,10	-0,03	0,40	-0,03
Bukittinggi	1,69	7,76	0,39	0,10	-0,03	0,06	0,18	0,09
Tembilahan	1,09	4,82	0,52	0,13	-0,19	0,42	0,13	0,03
Pekanbaru	1,55	7,04	0,63	0,19	-0,17	-0,01	0,02	0,20
Dumai	1,66	6,46	0,84	-0,06	-0,02	-0,16	0,27	0,29
Bungo	1,65	6,04	0,77	0,16	-0,12	0,27	0,15	0,12
Jambi	1,67	6,39	0,91	-0,22	-0,16	0,14	0,51	0,07
Palembang	1,84	5,95	0,35	0,09	0,21	0,33	-0,05	0,39
Lubuklinggau	1,63	5,83	0,34	0,04	0,11	0,35	0,13	0,25
Bengkulu	2,42	5,92	0,62	0,04	0,25	0,28	0,17	0,21
Bandar Lampung	2,13	5,52	0,82	0,16	0,07	0,30	-0,11	0,17
Metro	2,74	5,37	0,76	0,16	-0,22	0,30	0,25	0,01
Tanjung Pandan	4,01	4,17	1,71	-0,26	0,70	0,19	1,28	-0,03
Pangkal Pinang	3,60	6,07	-0,10	-0,31	0,26	0,58	0,01	0,40
Batam	2,45	5,95	-0,26	0,50	-0,32	0,47	-0,25	0,52
Tanjung Pinang	0,86	4,96	-0,11	0,32	-0,04	0,22	-0,27	0,29
DKI Jakarta	1,53	4,21	0,09	0,19	0,36	0,40	-0,10	0,01
Bogor	1,93	5,82	0,61	0,36	0,15	0,32	0,22	0,18
Sukabumi	1,71	5,45	0,38	0,31	0,15	0,48	0,19	0,16
Bandung	1,65	7,45	0,38	0,26	-1,50	0,32	0,10	0,14

Kota	2021	2022	2023					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cirebon	1,81	4,86	1,17	0,36	0,17	0,37	0,15	0,20
Bekasi	1,61	5,37	0,41	0,39	0,13	0,56	0,08	0,22
Depok	1,81	6,06	0,54	0,37	0,16	0,23	0,11	0,07
Tasikmalaya	1,17	6,65	0,41	0,41	0,07	0,63	0,27	0,04
Cilacap	1,88	6,81	0,45	0,27	0,19	0,28	0,22	0,05
Purwokerto	2,18	6,49	0,37	0,31	0,10	0,27	0,22	0,02
Kudus	1,59	6,4	0,27	0,35	0,25	0,34	0,21	0,01
Surakarta	2,58	7,03	0,32	0,48	0,24	0,27	0,19	0,09
Semarang	1,49	4,99	0,30	0,21	0,20	0,27	0,22	0,02
Tegal	1,53	6,31	0,44	0,62	-0,03	0,33	0,32	0,04
Yogyakarta	2,29	6,49	0,17	0,27	0,60	0,22	0,35	0,02
Jember	2,09	7,39	0,16	0,18	0,39	0,21	0,24	0,14
Banyuwangi	1,59	6,06	0,27	0,29	0,28	0,18	0,22	0,09
Sumenep	2,57	6,32	0,63	-0,02	0,67	0,45	0,66	-0,42
Kediri	1,64	5,76	0,26	0,16	0,25	0,13	0,32	0,17
Malang	1,75	6,45	0,15	0,09	0,42	0,24	0,25	0,07
Probolinggo	1,76	5,45	0,22	-0,04	0,42	0,45	0,26	0,18
Madiun	2,00	5,80	0,35	0,04	0,25	0,22	0,07	0,08
Surabaya	2,71	6,59	0,42	0,10	0,39	0,34	0,14	0,12
Tangerang	1,81	4,56	0,44	0,20	0,14	0,68	0,01	0,17
Cilegon	2,19	5,86	0,88	0,15	0,32	0,20	0,25	0,07
Serang	2,23	7,22	0,33	0,42	-0,14	0,35	0,35	0,11
Singaraja	2,39	4,63	0,95	0,29	0,42	-0,22	0,37	0,22
Denpasar	2,01	6,44	0,62	0,04	0,03	0,06	0,34	-0,08
Mataram	2,28	6,18	0,44	0,31	-0,03	0,44	0,20	-0,02
Bima	1,57	6,39	-0,09	0,59	-0,13	0,18	-0,03	0,18
Waingapu	1,28	3,54	1,16	0,27	1,00	0,76	-0,03	1,05
Maumere	0,55	6,25	0,92	-0,51	1,09	0,04	-0,05	-0,35
Kupang	1,86	7,07	1,00	-0,77	1,30	-0,16	-0,79	1,02
Sintang	1,88	6,50	0,20	-0,07	0,13	0,36	0,34	0,42
Pontianak	1,16	6,35	0,24	0,05	0,04	0,49	0,37	0,22
Singkawang	2,55	5,96	0,45	-0,19	0,23	0,55	0,30	0,41
Sampit	4,62	5,99	0,11	0,10	0,48	0,08	0,37	0,26
Palangka Raya	2,58	6,51	0,13	0,11	0,51	0,32	0,24	0,27

Kota	2021	2022	2023					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotabaru	2,68	8,65	0,12	0,06	0,61	0,29	0,56	0,36
Tanjung	2,43	5,01	0,21	0,20	0,93	0,34	0,15	-0,38
Banjarmasin	2,54	6,98	0,15	0,20	0,77	0,07	-0,14	0,41
Balikpapan	2,28	5,51	0,41	0,31	0,67	0,40	0,33	0,08
Samarinda	2,05	5,22	0,44	-0,04	0,52	0,45	0,11	0,25
Tanjung Selor	2,33	7,98	-0,04	0,25	0,20	0,50	0,03	0,03
Tarakan	2,83	3,93	0,32	0,09	0,27	0,58	-0,20	0,46
Manado	2,65	4,00	0,36	-0,21	0,75	0,25	-0,22	0,11
Kotamobagu	2,51	6,03	0,65	0,06	0,53	-0,01	0,28	-0,08
Luwuk	2,48	6,62	0,74	-0,05	0,88	0,31	0,48	0,72
Palu	2,14	5,81	0,53	-0,17	0,51	0,04	0,03	0,18
Bulukumba	2,16	4,12	0,52	0,12	0,39	0,19	0,30	0,02
Watampone	2,26	5,52	0,55	-0,05	0,55	0,25	0,28	-0,10
Makassar	2,26	5,81	0,67	-0,25	0,75	0,20	0,03	0,22
Pare-Pare	4,09	6,66	0,38	-0,27	0,88	0,20	0,26	-0,03
Palopo	2,96	5,13	0,50	0,06	0,86	0,31	0,30	-0,23
Kendari	3,05	7,11	-0,23	-0,48	0,67	0,46	0,71	0,36
Baubau	1,05	8,35	-0,44	0,05	0,06	0,27	0,84	-0,13
Gorontalo	2,59	5,15	0,29	-0,30	0,20	0,02	0,08	0,59
Mamuju	4,39	4,85	0,63	0,16	0,05	-0,18	0,01	0,70
Ambon	4,05	6,39	-0,21	-0,61	0,16	0,29	0,86	1,10
Tual	3,45	4,52	0,53	0,64	0,44	0,47	0,69	0,62
Ternate	2,38	3,37	0,10	1,85	-1,26	1,32	0,34	0,01
Manokwari	3,39	6,06	0,03	-0,73	-0,64	1,39	0,45	0,85
Sorong	3,49	3,26	0,96	-0,24	0,92	0,01	0,59	0,73
Merauke	1,68	4,90	0,41	0,10	0,90	1,05	1,03	1,09
Timika	2,09	5,93	-0,60	-0,59	0,64	1,40	0,75	0,76
Jayapura	1,70	5,81	-0,55	-0,84	0,12	1,44	-0,05	1,36
Indonesia	1,87	5,51	0,34	0,16	0,18	0,33	0,09	0,14

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS), Badan Pusat Statistik

Inflasi di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan mencapai 7,98 persen (*y-o-y*). Inflasi tersebut dominan disumbang oleh Angkutan Udara sebesar 1,81 persen, Bensin sebesar 1,25 persen, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,84 persen. Minimnya jumlah maskapai yang beroperasi di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor menjadi penyebab inflasi pada Angkutan Udara.

Kenaikan bahan bakar avtur juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga tiket pesawat sejak Bulan Juli 2022. Pemerintah Kalimantan Utara berusaha untuk terus intens melakukan komunikasi dengan beberapa maskapai untuk penambahan operasi maskapai di Bandara Tanjung Harapan (radartarakan.jawapos.com, 5 Januari 2023). Perbaikan akses transportasi darat dari Tanjung Redep, Kalimantan Timur menuju Tanjung Selor menghambat distribusi barang masuk, terutama ketika curah hujan tinggi. Kesulitan distribusi baik BBM maupun kebutuhan pokok menyebabkan kenaikan harga secara umum di Tanjung Selor dan menyumbang inflasi yang tinggi di wilayah tersebut (rakyatkaltara.prokal.co, 9 November 2022).

Memasuki tahun 2023, inflasi di 90 kabupaten/kota dilaksanakannya SBH relatif lebih rendah dan stabil. Hingga pertengahan tahun, inflasi tertinggi tercatat di Gunungsitoli, Sumatera Utara pada Januari 2023 sebesar 1,85 persen (*m-to-m*). Inflasi pada komoditas beras menjadi penyumbang utama hingga 0,51 persen. Minimnya pasokan beras dalam negeri menyumbang pada inflasi, tidak hanya di Kota Gunungsitoli melainkan juga secara nasional. Kenaikan harga beras juga menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi di Kota Ternate. Inflasi pada wilayah tersebut tercatat sebesar 1,85 persen (*m-to-m*) pada Bulan Februari 2023. Selain komoditas beras, kenaikan harga ikan segar yang cukup tinggi akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku Utara juga menyebabkan kenaikan harga secara umum.

Sementara itu, beberapa kota juga mengalami deflasi di beberapa bulan di tahun 2023. Deflasi terdalam dialami Kota Bandung pada Maret 2023, hingga 1,50 persen (*m-to-m*). Komoditas penyumbang deflasi di wilayah tersebut antara lain tarif air minum PDAM, cabai merah dan bawang merah. Capaian deflasi tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak, karena dapat memberikan bahan kebutuhan masyarakat secara lebih murah sehingga meringankan masyarakat.

Inflasi, Daya Beli, dan Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap barang dan jasa salah satunya dapat dilihat dari inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi menunjukkan kenaikan harga barang-barang secara umum. Hal tersebut berpengaruh pada daya beli atau *purchasing power* dari masyarakat yang menurun. Masyarakat yang sebelumnya dapat membeli barang seharga sekian rupiah, dengan adanya inflasi yang tinggi kini harus mengeluarkan lebih banyak uang.

Berdasarkan ILO (2022), meningkatnya inflasi global menyebabkan pertumbuhan negatif upah riil di banyak negara. Akibatnya, daya beli masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah sangat tertekan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa krisis global yang dihadapi dalam tiga tahun terakhir, antara lain: pandemi Covid-19, terjadinya perang antara Rusia-Ukraina, serta naiknya biaya hidup secara umum.

Dalam beberapa penelitian, inflasi yang tinggi dapat berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemodelan yang dilakukan Kusumatriana dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa kenaikan inflasi berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi untuk tingkat inflasi di atas 9,59 persen. Sehingga, inflasi di bawah nilai tersebut dapat dikatakan masih dapat ditolerir dan tidak memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang tinggi di suatu daerah menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, karena pendapatan riil atau daya beli masyarakat menurun, terutama untuk pekerja yang berpenghasilan tetap. Hal tersebut dapat memengaruhi perekonomian daerah secara agregat, konsumsi rumah tangga menurun dan kemiskinan meningkat. Sehingga, tingkat inflasi yang stabil dan rendah perlu dijaga untuk menjaga nilai mata uang sehingga daya beli masyarakat terjaga.

Sejalan dengan kondisi tersebut, inflasi Indonesia tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51 persen (*y-o-y*) relatif tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh hingga 5,31 persen selama 2022. Kondisi tersebut menjadi sinyal pemulihan perekonomian Indonesia setelah sempat melambat akibat pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi secara nasional. Tingkat inflasi di Indonesia relatif terjaga selama tahun 2022 dan sangat patut untuk diapresiasi. Mengingat inflasi global yang tinggi mencapai 8,91 persen. Saat ini negara-negara di dunia sedang menghadapi tantangan global di tahun 2022 adalah inflasi yang sangat tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan global. Meningkat akibat disrupsi rantai pasok, perang Rusia-Ukraina, dan proteksionisme pangan.

Di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan meluasnya cakupan vaksinasi Covid-19, mobilitas masyarakat Indonesia kembali pulih. Tingginya mobilitas berpengaruh pada roda perekonomian yang kembali berjalan, berdampak pada tumbuhnya ekonomi dan meningkatnya inflasi. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022 berdampak pada naiknya inflasi harga yang diatur pemerintah. Kondisi tersebut menggerus daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah yang lebih rentan.

Koordinasi pengendalian inflasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal ini, sangat diperlukan peran aktif pemerintah daerah secara langsung untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat, khususnya dengan memperkuat sisi produksi pangan dan menjaga kelancaran distribusi (Utari dkk, 2016). Selain itu, untuk meredam dampak kenaikan harga suatu komoditas terhadap inflasi secara umum, peran pemerintah untuk memberikan bantalan sosial berupa subsidi juga sangat penting. Hal tersebut juga dilakukan pemerintah pada saat kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022 demi menjaga kestabilan daya beli masyarakat di tengah naiknya harga BBM.

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum kondusif serta harga komoditas yang bergejolak, inflasi global diproyeksi IMF masih tinggi di 2023 di level 7,00 persen. Inflasi global diperkirakan baru akan mereda

mulai tahun 2024, meskipun belum pada level sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global 2023 menurut *World Economic Outlook* (WEO) April 2023 diperkirakan sebesar tumbuh 2,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Di tengah krisis dunia, ekonomi Indonesia diperkirakan lebih kuat dan mampu tumbuh hingga 5 persen pada tahun 2023 menurut proyeksi IMF. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu antara 2 hingga 4 persen pada tahun 2023. Pencapaian target sangat bergantung pada perubahan cuaca serta koordinasi dan peran TPIP dan TPID.

<https://www.bps.go.id>

PERDAGANGAN INDONESIA DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

6

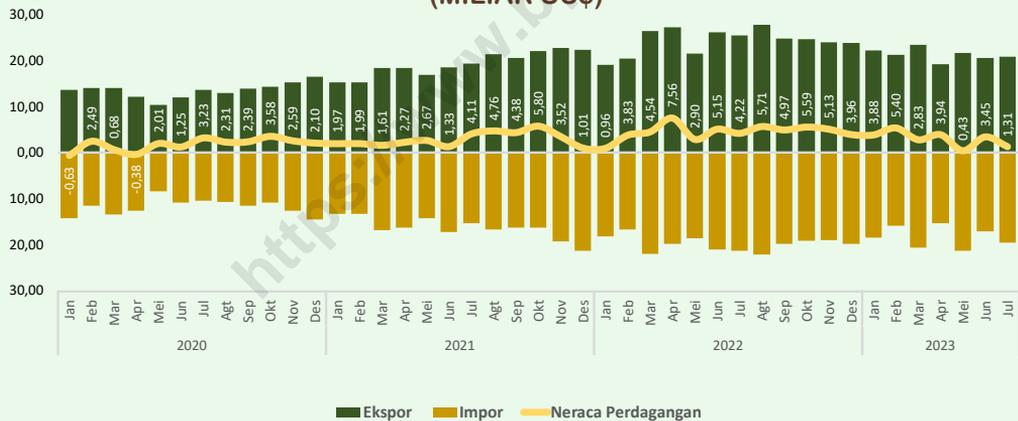
Neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus dalam 39 bulan terakhir, ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. Surplus tahun 2022 mencapai **US\$ 54.457,2**

NILAI EKSPOR 2022
US\$ 291.904,3

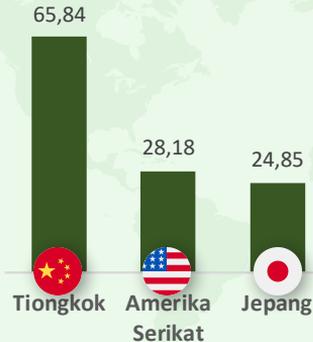
NILAI IMPOR 2022
US\$ 237.447,1



PERKEMBANGAN EKSPOR, IMPOR, DAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA (MILIAR US\$)



TIGA NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA, 2022 (MILIAR US\$)



TIGA NEGARA ASAL IMPOR UTAMA, 2022 (MILIAR US\$)



*“Indonesia terus Mengukir
Surplus Perdagangan di Antara
Gejolak Perdagangan Global”*

<https://www.mps.go.id>

Reorientasi arus perdagangan antar negara akibat perang Ukraina telah memutuskan saling ketergantungan perdagangan tradisional dengan memprioritaskan hubungan dagang atas kesamaan nilai politik, persahabatan, dan kedekatan wilayah. Sementara itu, ditengah upaya pemulihan perekonomian dunia pasca pandemi Covid-19 yang masih berjalan, ujian perdagangan global ditambah oleh kekeringan jalur perdagangan Terusan Panama yang memicu lonjakan biaya dan waktu pengiriman ditengah tingginya permintaan komoditas dan energi. (cnbcIndonesia.com, 18 Agustus 2023).

Disaat negara Amerika Serikat dan Eropa mulai menunjukkan perlambatan ekonomi, negara-negara Asia, khususnya Tiongkok malah sedang mengakselerasi perekonomian. Kondisi dimana terbuka potensi bagi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan energinya untuk mengambil manfaat dari perubahan arus perdagangan global. Indonesia yang selama ini menjual komoditas mentah sebagai andalan ekspor, menyadari situasi rentan terpuruk dari fluktuasi harga komoditas mentah dibanding produk barang jadi. Sehingga semangat hilirisasi seolah mendapatkan momentumnya untuk diperjuangkan demi meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja, investasi, substitusi impor, dan daya saing serta kesejahteraan bangsa.

Pada 2020, secara bertahap pemerintah menghentikan ekspor bahan tambang mentah dari mulai nikel, bauksit, timah, hingga alumina. Perhentian ekspor nikel ini kemudian sempat digugat oleh World Trade Organization (WTO) yang dianggap mengganggu

“Selama tahun 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga terutama untuk komoditas nonmigas”

pasokan nikel global serta dapat memicu konflik dagang. (www.bisnis.tempo.co.id, 12 Desember 2022). Namun, kinerja ekspor Indonesia setelahnya terus meningkat dan menjaga surplus neraca perdagangan yang memperkuat perekonomian Indonesia selama 39 bulan berturut-turut semenjak defisit perdagangan terakhir pada bulan April 2020.

Indonesia telah mengatur pelarangan ekspor sumber daya alam mentah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan produk pertambangan. Namun, hilirisasi idealnya harus sejalan dengan pengembangan industri hilir sebagai penampung hasil dari produk hilirisasi. Tanpa industri hilir yang maju sulit memperoleh produk ekspor dengan daya saing dan nilai jual yang lebih tinggi. Dukungan terhadap reindustrialisasi yang mendukung hilirisasi terkonfirmasi pada peningkatan impor barang modal serta komoditi impor berupa bahan baku dan penolong selama tahun 2022 yang tumbuh rata-rata di atas 20 persen.

Selama tahun 2022, surplus neraca perdagangan masih terjaga terutama untuk komoditas nonmigas. Ditengah-tengah kondisi Indonesia yang kembali dihadapkan pada lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron, serta upaya menjaga pasokan domestik di tengah godaan tingginya harga dan permintaan di pasar global, memaksa pemerintah untuk memperluas cakupan kebijakan larangan ekspor ke sektor pertanian yaitu perkebunan, dan perikanan (www.bisnis.tempo.co.id, 14 Januari 2023). Hilirisasi industri berbasis agro, dilakukan pada produk kelapa sawit menjadi *oleofood complex* untuk pangan dan nutrisi; *oleochemical and biomaterial complex*, sebagai bahan kimia dan pembersih; dan bahan bakar nabati, seperti biodiesel, *greendiesel*, *greenfuel*, dan biomass. Indikator keberhasilan program hilirisasi industri kelapa sawit tergambar dari komposisi ekspor antara bahan baku dan produk olahan.

Pada 2022, komposisi ekspor bahan baku mengalami penurunan menjadi 2 persen CPO dan 4 persen CPKO, sementara ekspor produk hilir mengalami peningkatan signifikan, yakni 73 persen produk *refinery* dan 21 persen produk lainnya. Keberhasilan hilirisasi sawit juga tercermin dari kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang kini mencapai 17,5 juta ton per tahun, industri oleofood 2,7 juta ton per tahun, dan industri oleokimia mencapai 11,6 juta ton per tahun (Antara, 16 Agustus 2023).

Surplus Neraca Perdagangan Setiap Bulan Berturut-Turut

Tabel 6.1 Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), 2020-Triwulan II 2023

Komoditas	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	- 6 005,7	- 13 281,7	- 24 418,1	- 4 314,8	- 4 485,4
Nonmigas	27 628,7	48 701,3	78 875,3	16 425,7	12 299,9
Jumlah	21 623,0	35 419,6	54 457,2	12 110,9	7 814,5

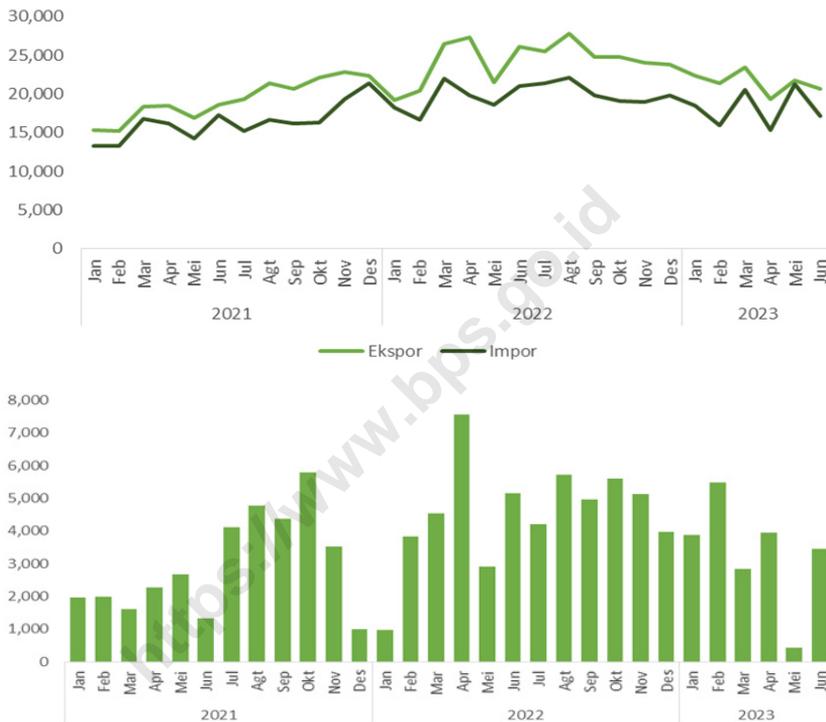
Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali mencatatkan surplus di tahun 2022. Neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2022 mengalami surplus hingga US\$ 54,46 miliar. Angka tersebut naik 53,96 persen dibanding tahun sebelumnya dan melanjutkan tren surplus perdagangan pasca Covid19. Namun, neraca perdagangan migas mengalami defisit hingga US\$ 24,42 miliar. Defisit neraca perdagangan migas tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya harga komoditas migas berpengaruh pada meningkatnya defisit neraca perdagangan migas tahun 2022, dimana Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Meskipun defisit neraca perdagangan migas lebih dalam dibanding tahun sebelumnya, surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai US\$ 78,88 miliar dapat mengoreksi defisit dari migas tersebut. Berdasarkan

capaian nilai ekspor impor Indonesia hingga semester I 2023, kondisi neraca perdagangan Indonesia berpeluang untuk melanjutkan tren positif di tahun 2023. Fluktuasi harga komoditas di pasar internasional serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia menjadi beberapa faktor pendukung untuk tercapainya kondisi tersebut.

Gambar 6.1. Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2023



Sumber Indikator Ekonomi, BPS

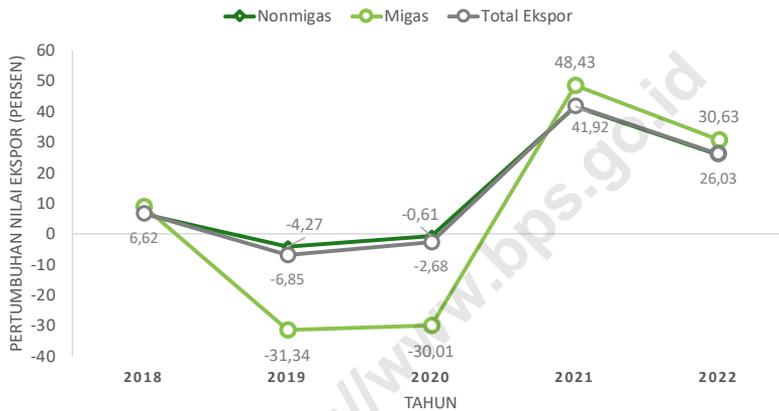
Nilai ekspor dan impor di sepanjang 2022 menunjukkan perkembangan positif, mengindikasikan kinerja ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 mulai membaik dibanding ketika pandemi tahun 2020. Pertumbuhan nilai ekspor yang lebih tinggi dibanding impor berdampak pada surplus neraca perdagangan di sepanjang bulan di tahun 2022. Dari Gambar 6.1 dapat dilihat bahwa surplus neraca perdagangan tercatat sepanjang bulan sejak 2021. Surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi pada Bulan April 2022 yang mencapai US\$ 7,56 miliar, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur dan tingginya harga komoditas unggulan Indonesia.

Surplus neraca perdagangan diharapkan masih terus berlanjut pada tahun 2023. Kondisi tersebut terkonfirmasi pada triwulan I 2023 dimana surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$ 12,11 miliar, lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar US\$ 9,33 miliar.

Tren surplus juga terjadi pada triwulan II 2023 yang mencapai US\$ 7,82 miliar dan diprediksi masih akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya seiring dengan masih berlanjutnya tren permintaan terhadap komoditas Indonesia. Walaupun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat membatasi surplus tersebut, antara lain lonjakan harga minyak, larangan ekspor komoditas sumber daya alam mentah, dan meningkatnya impor seiring peningkatan aktifitas pembangunan industri untuk menyerap program hilirisasi.

Ekspor Indonesia Masih Mampu Tumbuh Positif

Gambar 6.2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (persen), 2019-2022



Sumber: Indikator ekonomi, BPS

Capaian nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2022 tercatat US\$ 291,9 miliar, kembali memecahkan rekor nilai ekspor tertinggi dalam sejarah. Sebelumnya, nilai ekspor tertinggi tercatat US\$ 231,61 miliar pada tahun 2021. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2022 secara total naik hingga 26,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditunjang oleh pertumbuhan ekspor nonmigas dan migas yang keduanya naik masing-masing sebesar 25,78 persen dan 30,63 persen.

Memasuki tahun 2023, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekspor dan menargetkan ekspor nonmigas bisa mencapai US\$ 289,76 miliar atau setara Rp 4.508 triliun (kurs Rp 15.560) di tahun 2023 (www.kemendag.go.id, 02 Januari 2023). Sementara itu, hingga semester I 2023 total nilai ekspor nonmigas Indonesia telah mencapai US\$ 120,81 miliar.

Realisasi ekspor nonmigas Indonesia di tahun 2022 mencapai US\$ 275,91 miliar, berkontribusi sebesar 94,51 persen dari total ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekspor nonmigas secara keseluruhan mengalami pertumbuhan hingga 25,78 persen dibandingkan tahun 2021. Sektor industri sebagai sektor tumpuan ekspor Indonesia tumbuh hingga 16,29 persen di tahun 2022, nilai

ekspornya mencapai US\$ 206,07 miliar. Sektor industri masih menjadi sektor

Tabel 6.2. Nilai ekspor Migas dan Nonmigas Indonesia (juta US\$), 2020-Triwulan II 2023

Ekspor	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	8 251,1	12 247,4	15 998,2	4 012,6	3 827,0
Minyak Mentah	1 396,9	2 795,9	1 615,3	440,5	436,4
Hasil Minyak	1 456,5	1 996,8	4 644,9	1 245,9	1 339,2
Gas	5 397,7	7 454,7	9 738,0	2 326,2	2 051,4
Nonmigas	154 940,7	219 362,1	275 906,1	63 048,5	57 765,2
Sektor Pertanian	4 119,0	4 242,0	4 895,2	1 089,9	1 041,8
Sektor Industri	131 087,0	177 204,5	206 068,5	47 642,4	43 828,9
Sektor Tambang dan Lainnya	19 734,7	37 915,6	64 942,4	14 316,2	12 894,5
Jumlah	163 191,8	231 609,5	291 904,3	67 061,1	61 592,2

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

penopang perekonomian Indonesia. Nilai ekspor pada sektor tersebut menyumbang sekitar 70,59 persen dari total ekspor Indonesia. Tingginya ekspor dari sektor industri terus didorong untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor hasil sumber daya alam mentah dan mengurangi ketergantungan komoditas impor untuk produk industri sejenis.

Sektor nonmigas lainnya juga mengalami pertumbuhan nilai ekspor positif di tahun 2022. Bahkan, pertumbuhan nilai ekspor pada sektor tambang dan lainnya meningkat hingga 71,28 persen (y-o-y), dengan nilai mencapai US\$ 64,92 miliar. Tingginya pertumbuhan di sektor tersebut akibat melonjaknya harga komoditas batu bara sejak tahun 2021 dan tingginya permintaan di pasar Internasional. Sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan nilai ekspor positif, yaitu sebesar 15,40 persen. Meskipun pertumbuhannya tidak setinggi sektor-sektor lain, pertumbuhan nilai ekspor sektor pertanian terus naik beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan sektor tersebut resilient atau tahan melalui dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, kontribusi ekspor migas di tahun 2022 terhadap total ekspor sebesar 5,48 persen. Nilai ekspor migas di tahun 2022 sebesar US\$ 15,99 miliar, naik hingga 30,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah terpuruk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, ekspor migas kembali bangkit. Kinerja ekspor migas tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan nilai ekspor hasil minyak, gas, dan minyak mentah. Nilai ekspor hasil minyak di tahun 2022 mencapai US\$ 4,64 miliar, tumbuh sekitar 132,62 persen dibandingkan tahun 2021.

Nilai ekspor gas pada tahun 2022 tercatat hingga US\$ 9,74 miliar. Nilai tersebut naik hingga 30,63 persen apabila dibandingkan dengan nilai ekspor gas pada tahun sebelumnya. Meskipun nilainya meningkat, volume ekspor gas turun dari tahun ke tahun. Nilai ekspor gas secara total meningkat akibat naiknya harga gas di pasar global.

Ekspor Hasil Industri Sebagai Andalan Ekspor Indonesia

Kopi masih menjadi komoditas unggulan di sektor pertanian Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Produksi kopi di Indonesia di tahun 2021 mencapai 774,6 ribu ton. Kopi Indonesia juga digemari di pasar internasional, dibuktikan dengan tingginya nilai ekspor komoditas kopi Indonesia. Nilai ekspor komoditas kopi di tahun 2022 mencapai US\$ 1,14 miliar, atau mengalami kenaikan 33,78 persen dibanding tahun 2021. Kenaikan nilai ekspor kopi di tahun 2022 dipengaruhi oleh permintaan global untuk kopi yang sudah berangsur naik, setelah mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Selain Kopi, nilai ekspor komoditas Kakao juga naik 13,50 persen menjadi US\$ 63,9 juta. Sedangkan komoditas buah-buahan, yang juga salah satu komoditas unggulan di sektor pertanian, kinerja ekspornya mengalami penurunan 21,40 persen di tahun 2022. Nilai ekspor komoditas buah-buahan tahun 2022 senilai US\$ 309,2 juta. Padahal, nilai ekspor komoditas tersebut di masa pandemi Covid-19 sebesar US\$ 438 Juta di tahun 2020.

Dari sektor industri, pada tahun 2022 setiap komoditasnya mengalami pertumbuhan nilai ekspor positif kecuali industri hasil karet remah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor hasil industri alat-alat listrik yang tumbuh sebesar 29,33 persen atau senilai US\$ 8,36 miliar. Sedangkan ekspor produk industri paling dominan, didorong oleh pertumbuhan nilai ekspor komoditas hasil industri logam dasar yang naik hingga 23,62 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor hasil industri logam dasar tercatat US\$ 33,73 miliar di tahun 2022. Dari total nilai ekspor hasil industri logam dasar tersebut, nilai ekspor didominasi oleh komoditas besi/baja yang nilainya mencapai sekitar US\$ 28,48 miliar atau meningkat 32,80 persen dibandingkan tahun 2021. Meningkatnya nilai ekspor komoditas tersebut akibat dari banyaknya investasi asing di sektor tersebut selama tahun 2022.

Hasil Industri olahan Kelapa Sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia, mengalami kenaikan nilai ekspor di tahun 2022 sebesar 3,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, kenaikan ini lebih disebabkan kenaikan harga pasar, sedangkan secara volume justru turun sebesar 2,85 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini, sekaligus mengkonfirmasi upaya pemerintah dalam mengurangi ekspor CPO secara bertahap sampai dengan tahun 2023, dan menghentikan ekspor CPO bertahap pada tahun 2030 (Indonesia.go.id, 25 Oktober 2021).

Secara kumulatif, Industri logam dasar semester I 2023 sebesar US\$ 15,39 miliar, sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai nilai US\$ 17,69 miliar. Kontribusi ekspor hasil industri logam dasar ini, diharapkan ke depannya dapat menggeser dominasi dari komoditas CPO, seiring hilirisasi produk pertambangan dan agro berjalan baik.

Tabel 6.3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023

Ekspor	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Hasil Pertanian	4 119,0	4 242,0	4 895,2	1 089,9	1 041,8
Kopi	809,2	849,4	1 136,3	177,9	246,6
Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-rempah	618,5	765,7	610,5	127,2	120,4
Buah-buahan	438,0	393,4	309,2	83,1	51,2
Biji Kakao	75,8	56,3	63,9	11,8	15,2
Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap	125,8	118,5	112,2	25,8	24,9
Hasil Pertanian Lainnya	2 051,7	2 058,7	2 663,1	664,1	583,5
Ekspor Hasil Industri	131 087,0	177 204,5	206 068,5	47 642,4	43 828,9
Minyak Kelapa Sawit	18 444,0	28 606,0	29 655,9	5 917,7	5 411,4
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	5 856,5	6 909,4	7 992,5	1 735,8	1 585,6
Alat-alat Listrik	5 121,3	6 462,1	8 357,5	2 299,5	1 852,2
Karet Remah	2 900,9	3 893,6	3 453,0	659,3	611,4
Hasil Industri Logam Dasar	19 893,2	27 284,6	33 728,2	7 871,7	7 521,4
Ekspor Industri Lainnya	78 871,1	104 048,8	122 881,4	29 158,4	26 846,9
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	19 729,8	37 908,2	64 935,9	14 314,8	12 892,8
Batu Bara	14 534,0	26 538,2	46 739,2	10 200,4	8 909,8
Bijih Tembaga	2 412,2	5 386,2	9 244,1	1 493,2	1 790,7
Hasil Tambang Lainnya	2 783,6	5 983,8	8 952,6	2 621,2	2 192,3

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Melonjaknya harga komoditas ekspor juga berlaku untuk komoditas komoditas hasil tambang, seperti batu bara dan bijih tembaga. Harga batu bara di pasar internasional meningkat hingga 85,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain karena pemulihan ekonomi global pasca pandemi 2020, naiknya harga batu bara juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan untuk pembangkit listrik dan lonjakan harga gas alam terutama saat musim dingin di Eropa (cnbcindonesia.com, 2 Januari 2022).

Tetapi, di tengah tingginya harga batu bara tersebut, pemerintah Indonesia sempat memberlakukan larangan ekspor batu bara yang berlaku

selama bulan Januari 2022. Kebijakan tersebut diberlakukan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO). Pada akhirnya hingga semester I 2023, nilai ekspor komoditas batu bara Indonesia mencapai US\$ 19,11 miliar, atau turun hingga 9,77 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 yang sebesar US\$ 21,18 miliar.

Tabel 6.4 menampilkan nilai ekspor Indonesia menurut golongan barang SITC atau *Standard International Trade Classification*. Golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) kembali mendominasi ekspor Indonesia tahun 2022. Pertumbuhan nilai ekspor golongan barang SITC 3 juga tertinggi dibanding golongan barang lain, yaitu 57,50 persen (y-o-y) dengan realisasi nilai ekspor mencapai US\$ 71,00 miliar. Tercakup dalam SITC 3 antara lain batu bara, minyak bumi dan produksinya, serta gas alam yang memang harganya sedang naik di pasar global setelah lesu di tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

Tabel 6.4 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2020 - Triwulan II 2023

SITC	Ekspor	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	14 565	16 944	18 941	4 316	4 068
1	Minuman dan Tembakau	1 244	1 253	1 449	372	381
2	Bahan Mentah	14 034	20 503	29 813	6 679	6 584
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	25 502	45 077	70 995	16 801	15 036
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	19 710	30 884	32 676	6 545	5 958
5	Bahan Kimia	12 659	18 706	22 216	4 467	4 110
6	Hasil Industri Menurut Bahan	28 591	43 799	51 026	11 476	11 358
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	21 416	26 977	33 859	8 722	7 772
8	Hasil Industri Lainnya	19 805	25 846	29 847	7 490	6 110
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	5 666	1 620	1 157	193	215
Jumlah		163 192	231 609	291 979	67 061	61 592

Sumber Indikator Ekonomi, BPS

Selain SITC 3, golongan barang yang mendominasi ekspor Indonesia adalah Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6) dengan nilai ekspor di tahun 2022 mencapai US\$ 51,03 miliar. Nilai tersebut naik sekitar 16,50 persen dibanding tahun 2021. Pertumbuhan nilai ekspor pada SITC 6 juga didorong oleh naiknya

harga di pasar global untuk barang-barang hasil industri, seperti hasil industri besi, baja, dan tembaga (menurut Indeks *Unit Value* Ekspor tahun 2021, BPS).

Pada kelompok ini, hampir semua golongan barang mengalami kenaikan nilai ekspor, kecuali golongan barang Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya (SITC 9). Kinerja ekspor golongan barang tersebut turun hingga 28,58 persen dibanding tahun lalu, dengan nilai ekspor tahun 2021 sebesar US\$ 1,62 miliar. Padahal, nilai ekspor golongan barang SITC 9 naik di tahun 2020 lalu sempat naik hingga 56,05 persen dengan nilai ekspor US\$ 5,67 miliar. Termasuk dalam golongan barang SITC 9 antara lain koin (selain koin emas), bukan alat pembayaran yang sah dan emas non-moneter (tidak termasuk bijih emas dan konsentratnya).

Penurunan nilai ekspor SITC 9 masih berlanjut hingga tahun 2023. Nilai ekspor golongan barang SITC 9 di triwulan I 2023 tercatat sebesar US\$ 193 juta, atau turun 44,38 persen dibandingkan triwulan I tahun 2022. Golongan barang yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor tertinggi di triwulan I 2023 antara lain: Bahan Bakar, Bahan Penyemir (SITC 3) naik 36,40 persen, Mesin dan Alat Angkutan (SITC 7) naik 12,35 persen, serta Minuman dan Tembakau (SITC 1) naik 12,05 persen. Nilai ekspor golongan barang SITC 1 pada triwulan II 2023 juga masih meningkat dibanding periode sebelumnya, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 381 juta.

Keragaman Pasar Negara Tujuan Ekspor Indonesia

Tabel 6.5 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023

Negara Tujuan	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ASEAN	36 420,2	48 021,6	61 325,7	13 862,9	13 087,4
	(22,32)	(20,73)	(21,01)	(20,67)	(21,25)
(Malaysia)	8 098,8	11 971,0	15 429,6	3 323,4	3 141,5
	(4,96)	(5,17)	(5,29)	(4,96)	(5,10)
(Thailand)	5 110,3	7 088,0	8 196,8	2 023,6	1 747,8
	(3,13)	(3,06)	(2,81)	(3,02)	(2,84)
(Singapura)	10 661,8	11 635,8	14 349,5	3 339,0	2 992,3
	(6,53)	(5,02)	(4,92)	(4,98)	(4,86)
2. Tiongkok	31 781,8	53 765,5	65 839,3	16 576,	14 636,9
	(19,48)	(23,21)	(22,56)	(24,72)	(23,76)
3. Jepang	13 664,7	17 872,7	24 853,1	6 072,5	4 930,9
	(8,37)	(7,72)	(8,51)	(9,06)	(8,01)
4. Asia Lainnya	32 641,1	45 594,3	65 552,6	13 720,4	13 381,7
	(20,00)	(19,69)	(22,46)	(20,46)	(21,73)

Negara Tujuan	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Amerika Serikat	18 622,5	25 793,0	28 182,7	5 827,3	5 578,7
	(11,41)	(11,14)	(9,65)	(8,69)	(9,06)
6. Amerika Lainnya	4 021,7	6 076,7	7 103,3	1 618,4	1 750,2
	(2,46)	(2,62)	(2,43)	(2,41)	(2,84)
7. Australia dan Oceania Lainnya	3 290,2	4 285,1	4 616,9	1 046,1	1 008,2
	(2,02)	(1,85)	(1,58)	(1,56)	(1,64)
8. Afrika	4 614,7	7 065,5	7 509,5	1 962,6	1 748,9
	(2,83)	(3,05)	(2,57)	(2,93)	(2,84)
9. Inggris	1 283,4	1 477,1	1 658,9	400,6	436,8
	(0,79)	(0,64)	(0,57)	(0,60)	(0,71)
10. Uni Eropa	13 080,4	18 002,0	21 472,7	4 456,3	4 396,3
	(8,02)	(7,77)	(7,36)	(6,65)	(7,14)
(Belanda)	3 113,7	4 630,7	5 377,8	963,5	905,8
	(1,91)	(2,00)	(1,84)	(1,44)	(1,47)
(Jerman)	2 456,3	2 914,8	3 206,1	714,3	700,1
	(1,51)	(1,26)	(1,10)	(1,07)	(1,14)
11. Eropa Lainnya	3 771,1	3 656,1	3 789,6	1 518,1	636,6
	(2,31)	(1,58)	(1,30)	(2,26)	(1,03)
Jumlah	163 191,8	231 609,5	291 904,3	67 061,1	61 592,2
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Selama tahun 2022, negara tujuan utama komoditas ekspor Indonesia masih didominasi permintaan dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Nilai ekspor Indonesia ke tiga negara tersebut mencapai 40,72 persen dari total ekspor Indonesia, atau sebesar US\$ 118,88 miliar. Tren permintaan untuk tiga negara tersebut terus berlanjut di 2023. Selama periode Januari-Juni 2023 saja, ekspor untuk tiga negara tersebut mencapai US\$ 53,62 miliar atau 42,51 persen dari total ekspor pada semester I-2023.

Pada semester I-2023, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok sendiri telah mencapai US\$ 29,93 miliar dengan komoditas utama berupa besi/ baja, batubara, dan lignit (BPS, 17 Juli 2023). Nilai tersebut berkontribusi hingga 24,77 persen terhadap total ekspor. Meningkatnya realisasi nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok juga dipengaruhi kebijakan Tiongkok dalam *inventory restocking* setelah pergantian musim serta untuk mengantisipasi lonjakan permintaan energi akibat meningkatnya aktifitas ekonomi pasca berakhirnya pandemi Covid19 (Industry & Regional Brief-Bank Mandiri.co.id, 20 Juli 2023).

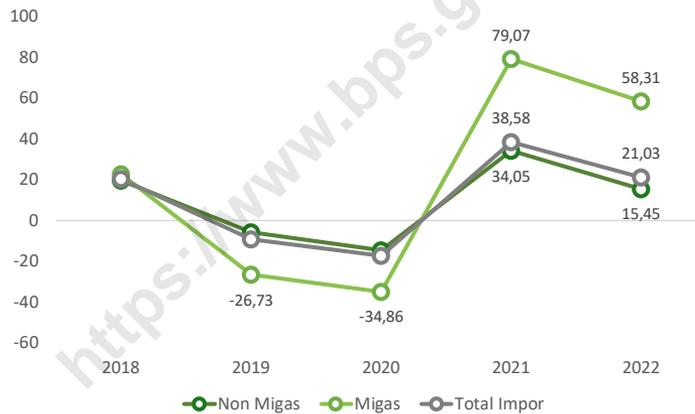
Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang juga

tumbuh positif di tahun 2022. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di tahun 2022 mencapai US\$ 28,18 miliar, meningkat sebesar 9,27 persen (y-o-y) dan berkontribusi sebesar 9,65 persen dari total ekspor Indonesia. Sedangkan Jepang yang menerima 8,51 persen dari total ekspor Indonesia, juga meningkat sebesar 39,06 persen dari tahun 2021 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 24,85 miliar.

Impor Indonesia Tumbuh Positif Untuk Reindustrialisasi

Kegiatan impor sejalan dengan hilirisasi sumber daya alam, terutama untuk memenuhi permintaan barang modal dalam negeri serta kebutuhan bahan baku dan penolong proses industri yang belum tersubstitusi oleh produk domestik, sehingga masih memerlukan impor dari luar negeri. Dengan demikian, impor yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah lebih baik ke dalam perekonomian negara.

Gambar 6.3 Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia (persen), 2019-2022



Sumber : Indikator Ekonomi, BPS

Selepas pembatasan aktivitas karena Covid-19, impor Indonesia kembali menunjukkan peningkatan sejalan meningkatnya aktivitas perekonomian di dalam negeri yang mulai pulih. Total nilai kebutuhan terhadap produk impor Indonesia mencapai US\$ 237,45 miliar di tahun 2022, dimana 82,98 persen merupakan impor berupa produk nonmigas, terutama dalam bentuk bahan baku dan penolong untuk kegiatan industri pengolahan.

Pada sisi lain, selama tahun 2022 impor terhadap produk migas menjadi komponen impor yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 79,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tinggi impor migas tersebut salah satunya dipicu oleh kenaikan permintaan domestik terhadap bahan bakar sebagai respon atas dicabutnya peraturan pembatasan aktivitas penduduk, serta kenaikan harga migas di pasar global.

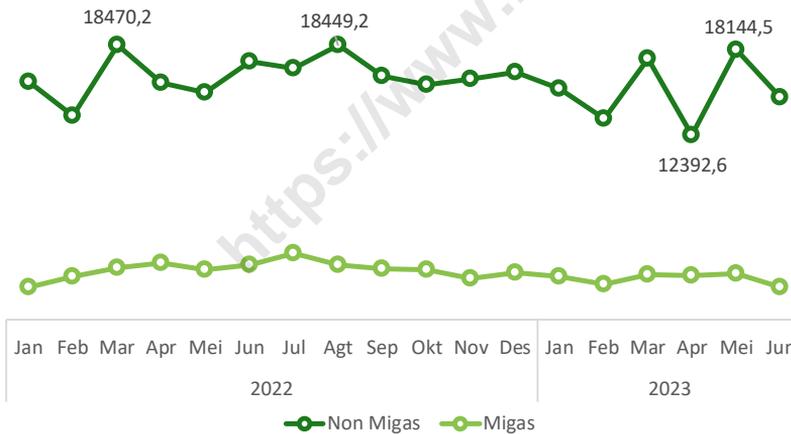
Tabel 6.6 Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023

Impor	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	14 256,8	25 529,1	40 416,3	8 327,4	8 312,4
Nonmigas	127 312,0	170 660,8	197 030,8	46 622,8	45 465,3
Jumlah	141 568,8	196 189,9	237 447,1	54 950,2	53 777,7

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Walaupun demikian, di tahun 2023 ini sudah nampak pola penurunan nilai impor. Selama semester I 2023 terjadi penurunan sebesar US\$ 7.454,8 juta atau menjadi US\$ 108,73 miliar dari US\$ 116,18 miliar dalam periode yang sama di tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya impor migas sebesar US\$ 2.824,4 juta dan nonmigas US\$ 4.630,4 juta. Penurunan impor migas dipengaruhi oleh penurunan impor hasil minyak dan produk gas, sedangkan impor minyak mentah masih tetap meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu.

Gambar 6.4 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas (juta US\$), Januari 2022-Juni 2023

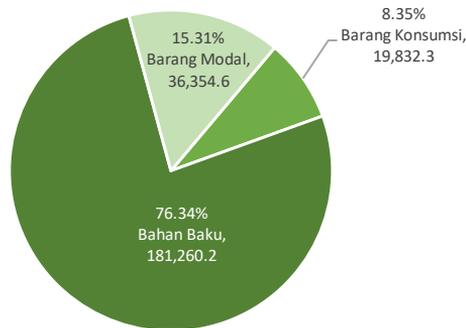


Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Perkembangan nilai impor dalam periode bulanan, tercatat cukup stabil bahkan cenderung melambat di dua tahun terakhir. Puncak nilai impor Indonesia dicapai pada Desember 2021, dimana impor migas mencapai nilai US\$ 3,38 miliar dan impor nonmigas senilai US\$ 17,97 miliar. Capaiannya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang mulai meningkat pasca kasus Covid-19 yang mulai terkendali.

Memasuki tahun 2022, kinerja impor mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi nilai impor dicapai pada Maret 2022 sebesar 32 persen atau menjadi US\$ 21,96 miliar dari bulan sebelumnya. Kenaikan nilai impor ini didominasi oleh kenaikan impor nonmigas terutama komoditas bahan baku dan barang modal.

Gambar 6.5 Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang (juta US\$), 2022



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Perkembangan impor menurut penggunaan golongan barang, masih diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong. Di tahun 2022, impor bahan baku Indonesia mencapai US\$ 181,26 miliar atau berkontribusi 76,34 persen terhadap total impor Indonesia. Nilai tersebut naik hingga 22,99 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, nilai impor barang modal dan barang konsumsi di tahun 2022 masing-masing sebesar US\$ 36,35 miliar dan US\$ 19,83 miliar. Impor barang konsumsi berkontraksi sebesar 1,74 persen dibanding tahun lalu, dan berkontribusi sebesar 8,35 persen terhadap total impor Indonesia. Sedangkan impor barang modal meningkat sebesar 26,99 persen dan berkontribusi sekitar 15,31 persen terhadap total impor. Meningkatnya impor bahan baku dan barang modal di tahun 2022 melanjutkan tren positif pemulihan aktivitas ekonomi domestik, khususnya di industri pengolahan.

Tabel 6.7 Nilai Impor Indonesia menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023

SITC	Impor	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	15 443,7	19 584,2	22 648,6	5 583,0	5 575,0
1	Minuman dan Tembakau	762,1	857,2	983,4	206,0	232,0
2	Bahan Mentah	7 298,0	11 289,2	12 032,9	2 546,0	2 815,0
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	15 778,4	28 838,2	44 893,3	9 520,0	9 427,0
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	191,8	300,4	320,7	59,0	58,0
5	Bahan Kimia	21 491,4	32 624,4	33 424,6	7 123,0	6 514,0

SITC	Impor	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Hasil Industri Menurut Bahan	22 768,0	32 673,4	37 481,5	8 574,0	8 298,0
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	46 743,1	56 996,3	70 218,5	18 017,0	17 088,0
8	Hasil Industri Lainnya	9 189,4	10 344,1	11 922,4	2 772,0	3 044,0
9	Bahan dan Trans-aksi Khusus Lainnya	1 902,7	2 682,7	3 521,3	550,0	726,0
Jumlah		141 568,6	196 190,1	237 447,2	54 950,0	53 777,0

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Menurut golongan barangnya, impor Indonesia didominasi oleh golongan barang Mesin dan Alat Pengangkutan (SITC 7). Nilai impor untuk SITC 7 di tahun 2022 mencapai US\$ 70,22 miliar, meningkat sebesar 23,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatannya sejalan dengan kenaikan impor barang modal, dimana golongan barang ini mencakup produk mesin industri dan peralatan listrik yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nilai impor golongan mesin dan alat angkutan ini juga telah mencakup 29,57 persen dari total impor Indonesia pada tahun 2022, atau terbesar dibanding golongan barang lainnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, impor golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) mengalami kenaikan hingga 55,67 persen di tahun 2022, dengan nilai impor mencapai US\$ 44,89 miliar. Komoditas yang termasuk dalam SITC 3 antara lain minyak bumi dan turunannya, batu bara, dan gas. Naiknya nilai impor di golongan barang tersebut tidak terlepas dari naiknya permintaan domestik dan harga komoditas-komoditas tersebut di pasar dunia (cnbcindonesia.com, 3 Februari 2022).

Mengurangi Ketergantungan Terhadap Negara Pemasok Barang Impor

Tiga negara pemasok barang impor ke Indonesia tertinggi selama tahun 2022 adalah Tiongkok senilai US\$ 67,72 miliar, Singapura senilai 19,41 miliar, dan Jepang senilai US\$ 17,18 miliar. Kontribusi dari ketiga negara tersebut mencapai 43,93 persen dari total impor Indonesia. Impor Indonesia dari Tiongkok didominasi oleh komoditas nonmigas, antara lain mesin dan alat elektronik. Nilai impor dari negara tersebut pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 20,45 persen dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari peranannya terhadap total impor nonmigas selama periode Januari–Juni 2023, kontribusi yang sama masih didominasi oleh Tiongkok sebesar US\$ 30.37 miliar atau mencapai 27,94. Kontribusi yang cukup tinggi juga berasal dari kelompok negara ASEAN sebesar US\$ 22,34 miliar yang mencakup 20,54 persen dari total nilai impor pada semester I 2023.

Walaupun demikian, ketergantungan terhadap pasokan produk impor dari negara utama selama semester I 2023 mengalami penurunan. Selama periode Januari-Juni 2023, nilai impor dari Tiongkok turun sebesar 5,91 persen dibanding semester I 2022. Begitupun dengan nilai impor dari Jepang dan Singapura yang masing-masing turun sebesar 1,51 persen dan 26,99 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 6.8 Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$), 2020 – Triwulan II 2023

Negara Tujuan	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ASEAN	29 832,8	39 951,4	50 184,3	11 569,6	10 767,2
	(21,07)	(20,36)	(21,13)	(21,05)	(20,02)
(Malaysia)	6 933,0	9 451,0	12 475,6	2 823,5	2 545,7
	(4,90)	(4,82)	(5,25)	(5,14)	(4,73)
(Thailand)	6 483,8	9 146,5	10 989,0	2 929,7	2 410,1
	(4,58)	(4,66)	(4,63)	(5,33)	(4,48)
(Singapura)	12 341,2	15 451,7	19 409,5	4 039,9	4 113,6
	(8,72)	(7,88)	(8,17)	(7,35)	(7,65)
2. Tiongkok	39 634,7	56 227,2	67 723,7	15 336,6	15 037,7
	(28,00)	(28,66)	(28,52)	(27,91)	(27,96)
3. Jepang	10 672,1	14 644,3	17 176,7	4 295,5	3 986,6
	(7,54)	(7,46)	(7,23)	(7,82)	(7,41)
4. Asia Lainnya	23 371,2	33 015,1	40 493,5	8 951,1	8 619,7
	(16,51)	(16,83)	(17,05)	(16,29)	(16,03)
5. Amerika Serikat	8 580,2	11 249,2	11 614,0	2 884,1	2 892,5
	(6,06)	(5,73)	(4,89)	(5,25)	(5,38)
6. Amerika Lainnya	6 778,4	7 732,7	10 413,1	2 373,3	2 215,8
	(4,79)	(3,94)	(4,39)	(4,32)	(4,12)
7. Australia dan Oceania Lainnya	5 559,2	10 408,8	11 358,1	2 285,9	2 648,3
	(3,93)	(5,31)	(4,78)	(4,16)	(4,92)
8. Afrika	2 566,0	6 301,8	10 230,8	2 136,8	2 566,8
	(1,81)	(3,21)	(4,31)	(3,89)	(4,77)
9. Inggris	956,4	1 090,7	1 039,7	284,4	306,1
	(0,68)	(0,56)	(0,44)	(0,52)	(0,57)
10. Uni Eropa	9 228,4	11 095,9	11 666,9	3 382,4	3 566,0
	(6,52)	(5,66)	(4,91)	(6,16)	(6,63)
(Jerman)	3 023,9	3 187,6	3 821,8	783,8	962,7
	(2,14)	(1,62)	(1,61)	(1,43)	(1,79)
(Italia)	1 556,8	1 728,3	1 486,2	394,0	503,7

Negara Tujuan	2020	2021	2022	Trw I 2023	Trw II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1,10)	(0,88)	(0,63)	(0,72)	(0,94)
(Perancis)	1 358,4	1 275,6	1 329,9	466,0	391,9
	(0,96)	(0,65)	(0,56)	(0,85)	(0,73)
11. Eropa Lainnya	4 389,4	4 472,9	5 546,3	1 450,4	1 171,0
	(3,10)	(2,28)	(2,34)	(2,64)	(2,18)
Jumlah	141 568,8	196 189,9	237 447,1	54 950,2	53 777,7
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

<https://www.bps.go.id>

KEBANGKITAN INVESTASI INDONESIA DI MASA PANDEMI DAN PERDAGANGAN SAHAM

7



Lima sektor dengan realisasi investasi dalam negeri tertinggi

1 Industri
Rp 143,56 triliun



2 Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi
Rp 75,14 triliun



3 Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran
Rp 66,17 triliun



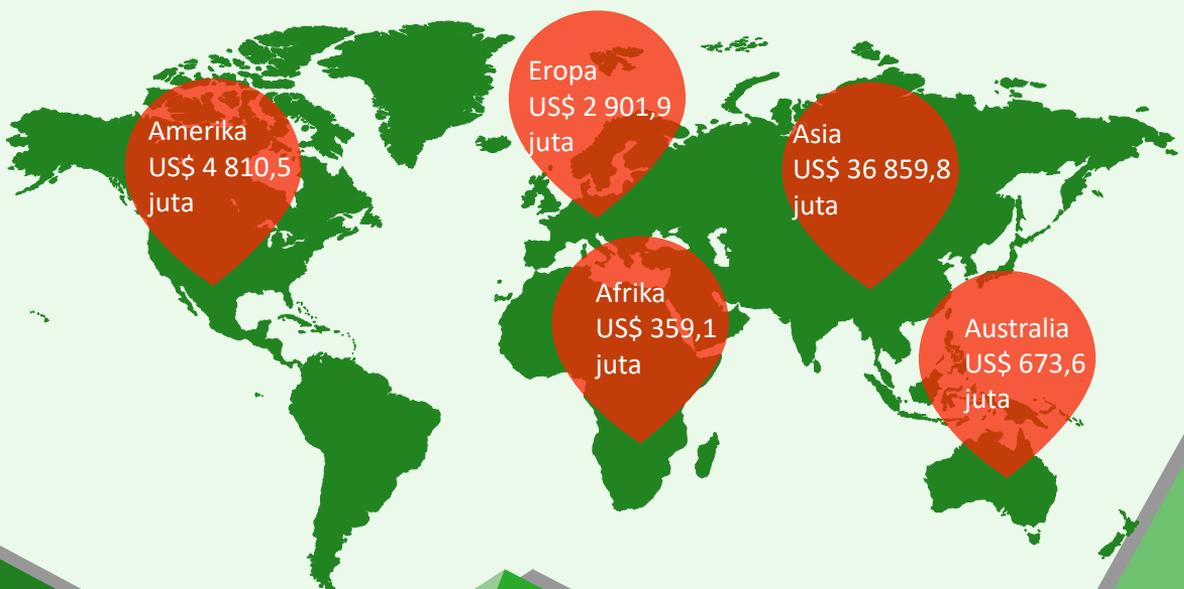
4 Pertambangan
Rp 62,52 triliun



5 Perdagangan dan Hotel
Rp 52,63 triliun



Realisasi investasi asing menurut asal benua



“Undang-Undang Cipta Kerja memberi sinyal positif bagi kegiatan investasi di tahun 2020, dimana mampu menarik dan meyakinkan investor di dalam negeri dan luar negeri”

<https://www.kempp.go.id>

Wabah Covid 19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tapi juga merambah ke sektor ekonomi. Di tengah kondisi yang kurang menguntungkan tersebut pemerintah berusaha mencari celah yang dapat memberikan pengaruh positif pada setiap sektor perekonomian. Salah satu yang dilirik pemerintah adalah kegiatan investasi.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong kegiatan investasi, baik oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing. Maka dari itu dilakukanlah kebijakan dan regulasi yang dapat menarik para investor agar berminat melakukan investasi di Indonesia. Investasi memiliki korelasi yang positif terhadap pembangunan, karena investasi sebagai salah satu penerimaan atau pemasukan bagi Negara. Namun masih banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan investasi selain kebijakan dan regulasi pemerintah yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan investasi.

Dukungan pemerintah dalam bidang investasi adalah dengan membuat kebijakan yang tujuannya adalah melindungi dan memberikan kenyamanan/ keyakinan kepada investor agar dapat terus menanamkan modalnya, serta memberikan kemudahan bagi calon investor baru. Terbukti disaat wabah Covid-19 melanda, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah berhasil menunjukkan kinerja investasi masih berjalan baik yang intinya dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Peran investasi sangat terlihat sekali dalam pemulihan ekonomi disaat wabah Covid-19 melanda Indonesia di tahun 2020 dan 2021. Pemerintah berharap dana investasi yang terkumpul dapat membantu kegiatan perekonomian di dalam negeri dan pembangunan dapat terus berjalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dapat memberikan andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi kedepannya.

Dukungan Pemerintah Menjadi Kekuatan Investasi di Dalam Negeri

Wabah Covid-19 sendiri baru terdeteksi di Indonesia sejak awal tahun 2020 dan penularannya begitu cepat sekali membuat perekonomian seketika lumpuh dan roda kehidupan berubah dengan drastis. Tidak hanya Indonesia yang mengalami, hampir semua negara di guncang oleh wabah Covid-19 yang membuat perekonomian dunia terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sempat mengalami penurunan namun pemerintah tetap berusaha agar perekonomian tetap bisa berjalan tidak menimbulkan keterpurukan yang semakin dalam.

Untuk menopang perekonomian di dalam negeri dan roda pembangunan agar terus berjalan, andalan pemerintah adalah melalui kegiatan investasi. Kondisi keamanan menjadi salah satu modal pemerintah dalam membuat program dan kebijakan perekonomian Indonesia di tahun 2020. Sinyal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat

kebijakan-kebijakan yang membantu dan memberi kemudahan bagi para investor. Kondisi keamanan didalam negeri menjadi kunci dan modal dasar bagi masuknya investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Indonesia, agar dana investasi yang terkumpul dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan.

Di tengah kondisi yang sulit Pemerintah menggulirkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana didalamnya mendorong dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang tujuannya dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan mampu membuka lapangan kerja baru.

Ternyata kebijakan dan program yang digulirkan pemerintah dengan mengeluarkan UU Cipta Kerja memberi sinyal positif bagi kegiatan investasi di tahun 2020, dimana mampu menarik dan meyakinkan investor di dalam negeri dan luar negeri untuk tetap berinvestasi. Terbukti dengan investasi yang terkumpul di tahun 2020 mencapai Rp 826,3 triliun, dimana nilai investasi tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 817,2 triliun. Investasi PMDN sendiri mencapai nilai sebesar Rp 413,5 triliun atau sekitar 50,04 persen dari total investasi yang terealisasi.

Mulai dijalankan Program vaksinasi yang dilakukan disepanjang tahun 2021 oleh pemerintah telah berhasil melampaui jumlah target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Namun keberhasilan program vaksinasi tidak membuat Indonesia terbebas dari wabah Covid-19. Pemerintah selain fokus pada perlindungan kesehatan bagi penduduk juga masih fokus pada kegiatan investasi, karena masih mampu memberi dampak positif bagi perkembangan perekonomian. Kinerja Pemerintah fokus pada usaha untuk dapat terus menggairahkan kegiatan investasi di dalam negeri agar tidak terpengaruh oleh terjangkit wabah Covid-19 yang masih ada.

Berdasarkan keberhasilan kinerja investasi yang dicapai di tahun 2020, pemerintah dalam RPJMN menargetkan nilai investasi di tahun 2021 mencapai Rp 858,1 triliun. Kebijakan dan UU Cipta Kerja yang dikeluarkan pemerintah ternyata telah berhasil meyakinkan para investor lama maupun yang baru untuk berinvestasi di Indonesia di dukung oleh kondisi keamanan yang kondusif di Indonesia. Terbukti dengan realisasi investasi yang terkumpul di tahun 2021 mencapai Rp 901,0 triliun. Nilai investasi yang terkumpul tersebut sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi untuk PMDN sendiri di tahun 2021 mencapai Rp 447,06 triliun terjadi peningkatan 8,11 persen dibanding tahun 2020.

Capaian kinerja BKPM dalam 2 tahun terakhir disaat wabah Covid-19 masih melanda cukup menakjubkan investasi yang terkumpul selalu melebihi

target yang ditetapkan oleh BKPM. Karena kegiatan perekonomian sudah berjalan normal kembali membuat BKPM di tahun 2022 semakin bersemangat dan yakin memasang target investasi. Karena didukung dengan kebijakan program pemerintah yang masih fokus pada transformasi ekonomi dan memetakan wilayah yang dapat mengungkit/menyerap nilai investasi. Hal tersebut membuat pemerintah di tahun 2022 pasca meredanya wabah Covid-19 memasang target investasi lebih tinggi lagi yaitu Rp 1.200 triliun. Ternyata kinerja BKPM tidak main-main, dengan dukungan pemerintah berhasil mengumpulkan investasi di tahun 2022 mencapai Rp 1.207 triliun. Berarti nilai investasi yang terkumpul tersebut sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebanyak 45,8 persen dari realisasi investasi tersebut merupakan penanaman modal domestik atau PMDN. Investasi domestik yang terealisasi di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 mencapai 23,64 persen.

Ternyata kebijakan dan program yang digulirkan pemerintah tersebut mampu menarik dan meyakinkan investor dan juga faktor keamanan di dalam negeri membuat para investor tetap berinvestasi. Terbukti dengan investasi yang terkumpul sudah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya kemudahan yang diperoleh para investor, keuntungan dan semakin berkembangnya modal mereka membuat para investor semakin yakin untuk terus menambah investasinya. Pada intinya investasi yang terkumpul dapat direalisasikan pada proyek-proyek tertentu yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di dalam negeri. Selain itu dengan investasi dapat membiayai proyek-proyek pembangunan strategis agar dapat tetap berjalan dan dengan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Sektor yang Menjanjikan Bagi Pemodal Dalam Negeri (PMDN)

Di masa pandemi Covid-19 investasi domestik yang terkumpul di tahun 2020 banyak diserap di Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai investasi mencapai Rp 93,28 triliun (22,56 persen) yang tersebar di 4.115 proyek. Sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,01 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor industri menempati urutan kedua nilai investasi mencapai Rp 82,82 triliun yang tersebar di 18.300 proyek dengan kontribusi sebesar 20,03 persen dari total investasi domestik. Sektor Konstruksi menempati posisi ke tiga dengan nilai investasi mencapai Rp 68,29 triliun (16,15 persen) yang tersebar di 6.549 proyek.

Investasi PMDN di tahun 2021 menurut sektor menunjukkan bahwa sektor yang pada tahun 2020 mampu menyerap investasi cukup besar di tahun 2021 malah mengalami penurunan. Penyerapan investasi domestik pada tahun 2021 banyak terserap di Sektor Industri dengan nilai investasi mencapai Rp 94,70 triliun (21,18 persen). Sektor yang cukup tinggi juga menyerap investasi domestik adalah Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Pergudangan dengan nilai investasi mencapai Rp 85,50 triliun (19,12 persen) yang tersebar di 3.257 proyek. Sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Konstruksi

dan Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi masing-masing turun sebesar 42,06 persen dan 34,35 persen, dengan nilai investasi masing-masing hanya sebesar Rp 39,57 triliun dan Rp 61,24 triliun.

Memasuki tahun 2022, Indonesia masih diwarnai dengan gelombang baru kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Omicron. Namun wabah Covid-19 sudah dapat diatasi dengan kegiatan imunisasi dan kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan normal kembali. Pada tahun 2022 sekitar 25,97 persen investasi domestik terserap di Sektor Industri, dimana sektor ini cukup bergairah sekali mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 143,56 triliun. Tahun lalu sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi mengalami pelemahan dalam menyerap Investasi PMDN dan di tahun 2022 sangat bergairah dan mampu menyerap investasi cukup banyak mencapai Rp 75,14 triliun atau sekitar 13,59 persen dari total PMDN. Sektor yang mengalami kenaikan investasi cukup tinggi di tahun 2022 adalah sektor pertambangan yang naik mencapai 145,02 persen dengan nilai investasi mencapai Rp 62,52 triliun yang tersebar di 2.545 proyek.

Tabel 7.1 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), 2020-2022

Sektor	2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 675	33 824,90	3 712	37 249,52	4 615	48 695,65
		(8,18)		(8,33)		(8,81)
Pertambangan	1 717	13 755,07	1 518	25 517,13	2 545	62 521,63
		(3,33)		(5,71)		(11,31)
Industri	18 300	82 817,73	13 290	94 698,50	15 704	143 564,40
		(20,03)		(21,18)		(25,97)
Listrik, Gas, dan Air	1 921	35 518,80	1 357	38 727,71	1 251	32 107,48
		(8,59)		(8,66)		(5,81)
Konstruksi	6 549	68 289,30	11 011	39 569,36	18 661	33 846,52
		(16,51)		(8,85)		(6,12)
Perdagangan dan Reparasi serta Hotel dan Restoran	44 258	26 951,52	53 247	40 251,71	58 203	52 630,35
		(6,52)		(9,00)		(9,52)
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	4 115	93 282,77	4 490	61 241,52	6 076	75 138,39
		(22,56)		(13,70)		(13,59)
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	4 347	44 852,76	3 257	85 497,81	3 729	66 167,81
		(10,85)		(19,12)		(11,97)
Jasa Lainnya	10 741	14 242,67	14 120	24 310,39	13 798	38 096,75
		(3,44)		(5,44)		(6,89)
Jumlah	96 623	413 535,52	106 002	447 063,65	124 582	552 768,97
		(100,00)		(100,00)		(100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi

Memasuki tahun 2023, dimana Covid-19 sudah memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi membuat pemerintah berani mengambil keputusan untuk menghapus atau mencabut PPKM. Semua sudah berjalan normal, pemerintah mulai menggiatkan roda perekonomian di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menerapkan green economy yang pada KTT G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

Dari sisi pemulihan ekonomi dan pengelolaan penerimaan negara di tahun 2022 tetap berjalan dan aktivitas manufaktur menunjukkan pemulihan. Melihat kekuatan investasi Indonesia, strategi yang salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tahun 2022. Memasuki tahun 2023 membuat pemerintah semakin optimis jika investasi masih dapat berkembang. BKPM memasang target realisasi investasi sebesar Rp 1.400 (PMA + PMDN).

Nilai investasi domestik yang terkumpul selama bulan Januari-Maret 2023 mencapai Rp 151,95 triliun yang tersebar di 104.230 proyek. Memasuki triwulan II (Bulan April-Juni 2023) investasi PMDN yang terealisasi mengalami peningkatan sebesar 7,57 persen menjadi Rp 163,45 triliun dari triwulan sebelumnya yang tersebar di 111.677 proyek.

Gambar 7.1 Realisasi PMDN Menurut Sektor (miliar rupiah), Triwulan I-II 2023



Dari Gambar 7.1 terlihat bahwa dalam triwulan pertama sebagian besar investasi domestik diserap oleh sektor Industri dengan nilai investasi mencapai Rp 35,91 triliun yang tersebar di 13.894 proyek. Posisi ke dua adalah sektor Pertambangan dengan nilai investasi mencapai Rp 19,84 triliun yang

tersebar di 2.915 proyek. Arah pemulihan ekonomi semakin terlihat, aktivitas manufaktur semakin kuat kegiatan ekonomi mulai bergerak menuju normal.

Kinerja investasi domestik semakin menunjukkan kekuatannya, sektor yang sangat kuat menyerap investasi domestik di triwulan II-2023 adalah sektor Industri, dimana dari triwulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 14,68 persen menjadi Rp 41,18 triliun. Posisi ke dua adalah sektor pertanian yang mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 20,77 triliun. Sektor yang cukup diminati oleh investor domestik adalah sektor pertambangan walaupun sedikit mengalami penurunan nilai investasi dibanding triwulan sebelumnya dengan nilai investasi mencapai Rp 19,54 triliun yang tersebar di 2.765 proyek.

Investasi domestik, jika di lihat pergerakan masih menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang dilirik oleh para investor domestik. Keunggulan Pulau Jawa karena sudah tersedianya infrastruktur yang sangat memadai. Di saat wabah Covid-19 melanda Indonesia dan Pulau Jawa menjadi episentrum penularan penduduk terinfeksi cukup tinggi, namun tidak menyurutkan para investor lokal untuk tetap berinvestasi di P. Jawa. Para investor lokal tidak ingin mengambil risiko merugi, di masa sulit sebisa mungkin masih mampu menghasilkan atau memberi keuntungan bagi para investor. Investasi domestik yang terealisasi di tahun 2020 yang terserap di P Jawa mencapai 51,86 persen atau senilai Rp 214,45 triliun yang tersebar di 58.826 proyek. Jika pada tahun-tahun sebelumnya di P Jawa sendiri sebagian besar investasi terpusat di DKI Jakarta namun di tahun 2020 investasi domestik banyak terserap di Provinsi Jawa Timur diikuti Provinsi Jawa Barat.

Gangguan pandemi Covid-19 di tahun 2021 tidak begitu membawa dampak negatif pada kinerja investasi di Indonesia, terbukti dengan masih meningkatnya nilai investasi domestik yang terkumpul. Dampak Covid-19 berimbas pada penyerapan nilai investasi yang terjadi di P. Sumatera, dimana investasi di pulau tersebut mengalami penurunan sebesar 4,21 persen dari tahun lalu. Investasi yang terserap di pulau lainnya selain P. Sumatera mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan investasi tertinggi terjadi di Pulau Kalimantan, mencapai 37,00 persen yaitu dari Rp 45,42 triliun tahun 2020 menjadi Rp 62,23 triliun di tahun 2021 yang tersebar di 9.346 proyek.

Begitu banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia. Fokus pemerintah saat ini adalah mampu mewujudkan investasi yang inklusif dan berkualitas yaitu adanya keseimbangan realisasi investasi antara P. Jawa dan diluar P. Jawa. Investasi yang terkumpul mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan mineral, serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan fokus pada pembangunan infrastruktur terutama di wilayah timur dan jaring pengaman

sosial serta memiliki kebijakan-kebijakan inovatif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan membangun infrastruktur dan pariwisata di luar P. Jawa kedepannya akan semakin menyuburkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah luar P. Jawa. Pada tahun 2022 selama tiga tahun pandemi jika dilihat berdasarkan wilayah atau pulau menunjukkan peningkatan nilai investasi domestik di masing-masing pulau. Kenaikan investasi tertinggi di tahun 2022 terjadi di P. Jawa naik sekitar 29,33 persen dengan nilai investasi mencapai Rp 293,94 triliun. Kenaikan tertinggi ke dua adalah P. Kalimantan dengan nilai investasi domestik Rp 75,37 triliun atau naik sekitar 21,12 persen dibanding tahun 2021.

Tabel 7.2 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah), 2020-2022

Pulau	2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	18 988	111 623,24	20 444	106 924,54	21 892	129 136,72
		(26,99)		(23,92)		(23,36)
Jawa	58 826	214 451,03	64 644	227 270,94	74 950	293 938,95
		(51,86)		(50,84)		(53,18)
Bali dan Nusa Tenggara	4 474	15 043,55	4 590	19 188,33	5 432	20 492,91
		(3,64)		(4,29)		(3,71)
Kalimantan	8 818	45 421,96	9 346	62 226,99	10 222	75 372,19
		(10,98)		(13,92)		(13,64)
Sulawesi	4 500	21 211,25	5 142	24 301,49	8 011	26 351,50
		(5,13)		(5,44)		(4,77)
Maluku dan Papua	1 017	5 784,50	1 836	7 151,35	4 075	7 476,70
		(1,40)		(1,60)		(1,35)
Jumlah	96 623	413 535,52	106 002	447 063,65	124 582	552 768,97
		(100,00)		(100,00)		(100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi

Seiring dengan konsumsi swasta yang terus pulih di tengah mobilitas masyarakat yang membaik akibat pelonggaran (pembatasan kegiatan sosial) dan program vaksinasi serta booster, investasi diperkirakan akan terus meningkat. Namun investor lokal tidak mau mengambil risiko sebisa mungkin wilayah untuk berinvestasi dapat memberikan keuntungan. Investor domestik masih sepenuhnya mengandalkan wilayah P. Jawa dan P. Sumatera sebagai tempat berinvestasi. Pada triwulan I-2023 investasi domestik sebagian besar terserap di P. Jawa dengan nilai investasi mencapai Rp 74,38 triliun yang tersebar di 64.302 proyek. Wilayah P.Jawa sendiri sebagian besar yang menjadi incaran para investor lokal di tw I-2023 adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kondisi ekonomi yang mulai sepenuhnya stabil, para investor domestik lebih memilih melakukan investasi di P. Jawa dan P. Sumatera. BKPM mencatat capaian realisasi investasi domestik yang terserap di P. Jawa sepanjang bulan April-Juni 2023 sebesar Rp 70,42 triliun dengan kontribusi mencapai 43,08 persen dan provinsi yang menyerap cukup banyak investasi domestik adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Realisasi PMDN yang masuk ke P. Sumatera di triwulan II 2023 sebesar Rp 49,88 triliun atau sekitar 30,52 persen dari total PMDN. Wilayah P.Sumatera sebagian besar investasi domestik terserap di Provinsi Riau dan Bengkulu.

Usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan khususnya wilayah timur sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia, mulai memperlihatkan hasil. Pada triwulan II 2023 pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami peningkatan secara signifikan, khususnya wilayah timur. Investasi domestik yang terealisasi di triwulan II 2023 di P. Sulawesi dan P. Maluku dan Papua masing-masing mencapai Rp 9,08 triliun dan Rp 3,34 triliun, dimana jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terjadi kenaikan masing-masing sebesar 6,63 persen dan 16,96 persen.

Gambar 7.2 Realisasi PMDN Menurut Pulau (miliar rupiah), Triwulan I-II 2023



Payung Hukum Investasi di Indonesia Untuk Menarik Penanam Modal Asing

Kegiatan investasi di Indonesia sudah dilakukan sejak lama tepatnya sejak tahun 1967. Dalam kegiatan investasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dan dapat memberikan stimulan terhadap peningkatan perkapita dan konsumsi masyarakat. Pemerintah selalu berusaha menarik investor khususnya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Terkait dengan investasi khususnya investasi asing pemerintah selalu mengevaluasi permasalahan yang timbul dan juga regulasi kebijakan yang

diterapkan. Oleh karena itu pemerintah selalu mencoba memfasilitasi khususnya bagi investor asing dengan cara:

- Perhatian pemerintah yang utama adalah fokus pada stabilitas keamanan di dalam negeri. Karena tingkat keamanan itu penting, dengan kondisi keamanan yang terjamin otomatis investor akan datang berinvestasi karena merasa nyaman dan aman.
- Selain itu pemerintah juga membangun kawasan industri atau kawasan ekonomi sebagai suatu wilayah bisnis yang strategis di beberapa wilayah.
- Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem investasi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait perizinan.
- Strategi pemerintah untuk menarik investor asing agar berminat berinvestasi di Indonesia dengan membangun infrastruktur yang mendukung dan memberikan kemudahan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
- Memberikan layanan end-to-end kepada investor sampai realisasi investasi.
- Membantu investor sampai tahap produksi.

Dari fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi investor, pemerintah juga menjamin dan melindungi para investor dengan cara membuat payung hukum. Sejak tahun 2020 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan serta mendorong kegiatan investasi, dan juga memberikan payung hukum dan perlindungan bagi investor.

“Pemerintah juga menjamin dan melindungi para investor dengan cara membuat payung hukum”

Semoga strategi yang diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah ke depannya dapat memberikan keyakinan, kepastian dan keamanan kepada investor tidak hanya investor lokal tapi juga investor asing/luar. Kebijakan pemerintah khususnya di bidang investasi dapat memberikan keberhasilan dan investasi dapat berjalan dan benar-benar dapat bermanfaat bagi pembangunan.

Investasi yang kuat dan konsumsi yang stabil dengan permintaan yang bertumbuh maka Indonesia selalu memiliki kemampuan untuk bertahan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menarik investor khususnya investor asing. Wabah Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan nilai PDB-pun mengalami penurunan hingga mencapai 2,07 persen. Selain itu juga terjadi perlambatan aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia hanya mencapai US\$ 28,67 miliar atau naik sekitar 1,62 persen.

Pada tahun ke dua pandemi Covid-19 aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana mampu menghimpun investasi asing sebanyak US\$ 31,09 miliar atau terjadi peningkatan sekitar 8,47 persen dari tahun lalu. Indonesia patut bersyukur di tengah kondisi kegelapan ekonomi global investasi asing yang masuk ke Indonesia tetap tumbuh. Hal ini merupakan bukti bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Di tahun ke tiga pandemi yaitu tahun 2022 ditambah kondisi dunia yaitu perang Rusia dan Ukraina ternyata tidak memberikan dampak buruk pada kegiatan investasi asing di Indonesia. BKPM mencatat realisasi investasi asing yang terkumpul mencapai US\$ 45,60 miliar yang tersebar di 32.681 proyek. Kinerja dan langkah-langkah kebijakan dilakukan BKPM ternyata mampu meningkatkan realisasi investasi.

Sektor-Sektor Incaran Investor Asing

Pandemi Covid-19 sempat memperlambat aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia yang berdampak pada krisis ekonomi. Langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah pengendalian pandemi tetap menjadi kunci utama selain itu juga berusaha dalam mendorong perekonomian agar tetap berjalan dan tumbuh. Pemerintah dan BKPM berusaha menjaga investor asing agar tetap bertahan berinvestasi di Indonesia.

Karena banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dengan masuknya modal asing. Manfaat yang dapat kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

Hantaman Covid-19 di tahun 2020 tidak menurunkan kinerja investasi asing di Indonesia, bahkan sektor industri masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Sektor industri pada tahun 2020 mampu menyerap investasi asing sebesar 46,06 persen dari total PMA. Nilai investasi asing di sektor tersebut mencapai US\$ 13,20 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 38,23 persen dibanding tahun lalu. Namun jika dilihat investasi yang terserap dimasing-masing sektor sebagian besar

sektor mengalami penurunan. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi nilai investasi asing di tahun 2020 adalah sektor pertanian yaitu mencapai 22,92 persen dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,28 miliar (4,45 persen) yang tersebar di 2.294 proyek.

Tabel 7.3. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US\$), 2020-2022

Sektor	2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 294	1 275,0	1 059	1 009,2	1 195	1 919,9
		(4,45)		(3,25)		(4,21)
Pertambangan	1 199	2 005,1	486	3 817,0	525	5 145,0
		(6,99)		(12,28)		(11,28)
Industri	19 359	13 202,4	8 654	15 803,7	9 278	24 679,3
		(46,06)		(50,83)		(54,12)
Listrik, Gas, dan Air	846	4 613,9	444	2 938,6	432	3 762,7
		(16,10)		(9,45)		(8,25)
Konstruksi	856	189,5	372	93,4	405	165,3
		(0,66)		(0,30)		(0,36)
Perdagangan dan Reparasi serta Hotel dan Restoran	18 582	875,2	9 575	896,0	11 933	1 234,7
		(3,05)		(2,88)		(2,71)
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	1 588	3 580,4	821	3 159,2	1 027	4 125,1
		(12,49)		(10,16)		(9,05)
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	2 209	2 191,4	1 323	2 186,3	2 175	3 014,6
		(7,64)		(7,03)		(6,61)
Jasa Lainnya	9 793	733,3	4 537	1 189,7	5 711	1 558,4
		(2,56)		(3,83)		(3,42)
Jumlah	56 726	28 666,3	27 271	31 093,1	32 681	45 605,0
		(100,00)		(100,00)		(100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi

Kondisi investasi asing yang masuk ke Indonesia di tahun 2021 disaat pandemi masih berlangsung, secara total menunjukkan peningkatan, tidak menyurutkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun jika dilihat persektor para investor asing tersebut tidak mau mengambil risiko mereka melihat sektor yang cukup kuat, menguntungkan

dan menjanjikan adalah sektor industri. Nilai investasi asing yang terserap di sektor industri mengalami peningkatan 19,70 persen dibanding tahun lalu dengan nilai investasi mencapai US\$ 15,80 miliar. Sektor yang mengalami peningkatan investasi asing cukup tinggi dari tahun sebelumnya adalah sektor Pertambangan, dan Sektor Jasa Lainnya masing masing meningkat 90,36 persen (US\$ 3,82 miliar) dan 62,24 persen (US\$1,19 miliar) dibanding tahun 2020. Kondisi ini memberikan harapan bagi Indonesia kedepannya, investasi asing dapat terus masuk ke Indonesia dan bisa menjadi modal pendamping dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Di tengah kegelapan ekonomi global, investasi asing yang masuk Indonesia tetap tumbuh, strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Selama tiga tahun pandemi investasi asing yang masuk mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibanding investasi domestik. Investasi asing yang terserap disetiap sektor mengalami peningkatan, dimana sektor yang cukup tinggi menyerap investasi asing adalah sektor Industri mengalami kenaikan sekitar 56,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi dari tahun lalu adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Konstruksi masing-masing naik hingga 90,24 persen dan 76,98 persen.

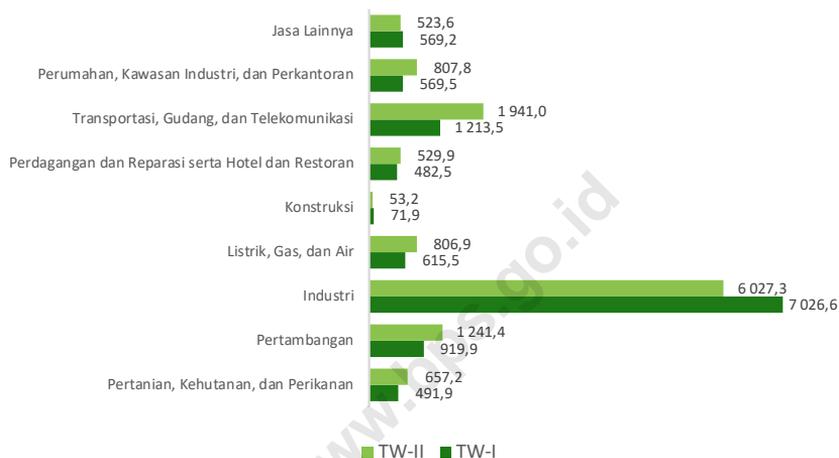
Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut hingga memasuki tahun 2023 yang berakibat pada melambungnya harga minyak dunia, bahkan pasar modal hingga pasar uang terkena dampaknya. Kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. membuat perekonomian dunia di tahun 2023 akan mengalami resesi. Kondisi dunia di tahun 2023 harus diwaspadai oleh Indonesia dengan kehati-hatian.

Kegiatan investasi di Indonesia masih berjalan dengan baik investor asing masih aktif berinvestasi di Bursa Indonesia karena ditunjang dengan kondisi keamanan yang sangat stabil dan iklim ekonomi dan investasi yang aman saat ini. Investor asing masih mengandalkan sektor industri pengolahan, dimana masih memegang peranan sangat penting dalam peningkatan realisasi investasi dan tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi asing yang terserap di Sektor Industri pada triwulan I 2023 mencapai US\$ 7,03 miliar atau sekitar 58,75 persen dari total investasi asing. Memasuki triwulan II 2023 Sektor Industri masih menarik bagi investor asing terbukti dengan nilai investasi asing yang terserap mencapai US\$ 6,03 miliar walaupun mengalami pelemahan 14,22 persen dibanding triwulan sebelumnya (Q to Q), dimana 47,88 persen investasi asing yang masuk terserap disektor industri.

Investasi PMA semakin meningkat dari triwulan sebelumnya, namun tidak dengan kondisi perekonomian dunia yang mengalami ketidakpastian karena terjadinya resesi ekonomi yang disebabkan perang Rusia dan Ukraina. Kinerja investasi asing di Indonesia membuktikan berjalan baik terjadi kenaikan investasi yang terserap diberapa sektor. Selain yang mengalami kenaikan

cukup tinggi dari triwulan sebelumnya adalah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang mengalami peningkatan hingga 59,95 persen dengan nilai investasi asing mencapai US\$ 1,94 miliar. Sektor yang juga meningkat cukup tinggi dari triwulan sebelumnya adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran, dan Sektor Pertambangan masing-masing naik sebesar 41,84 persen, dan 34,96 persen.

Gambar 7.3 Realisasi PMA Menurut Sektor (juta US\$), Triwulan I-II 2023



Wilayah Incaran Para Investor Asing

Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang paling diminati oleh investor asing, walaupun kontribusinya dari tahun ke tahun semakin menurun. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh pemerintah di luar Pulau Jawa semoga mampu membawa investor asing merasa nyaman berinvestasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dijamah secara maksimal. Pada saat pandemi Covid-19 luar P.Jawa menjadi perhatian investor asing, karena dipicu oleh P.Jawa yang menjadi episentrum penularan Covid-19. Investasi asing mulai mengalami penurunan kontribusinya di P.Jawa, dimana investasi asing yang terserap di Pulau Jawa hanya sebesar 47,09 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 13,50 miliar.

Pulau yang menyerap investasi asing di tahun 2021 dan mengalami penurunan adalah Pulau Sumatera yang mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 5,37 miliar (20,08 persen) mengalami penurunan sekitar 13,25 persen. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan mengalami penurunan sebesar 0,15 persen (US\$ 1,62 miliar). Sedangkan pulau lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian realisasi investasi 2022 meningkat dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 48,52 persen, dengan total investasi asing mencapai US\$ 45,60 miliar. Kontribusi PMA ini tertinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya

yang menunjukkan bahwa investor asing masih percaya pada kebijakan pemerintah serta stabilitas ekonomi dan politik di tengah-tengah mulai menghangatnya kondisi perpolitikan. Capaian investasi ini banyak ditunjang oleh aktivitas hilirisasi tambang dan industri petrokimia yang banyak dalam tahap konstruksi.

Tabel 7.4. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Pulau (juta US\$), 2020-2022

Pulau	2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	6 665	6 188,8	3 138	5 368,6	3 255	6 917,2
		(24,27)		(20,08)		(17,42)
Jawa	39 529	13 499,3	18 160	14 075,2	21 235	19 299,2
		(52,93)		(52,64)		(48,60)
Bali dan Nusa Tenggara	6 263	676,6	3 884	775,2	5 785	1 227,4
		(2,65)		(2,90)		(3,09)
Kalimantan	2 328	1 624,2	1 165	1 621,8	1 306	3 198,6
		(6,37)		(6,07)		(8,05)
Sulawesi	1 393	3 513,4	669	4 897,5	793	9 069,2
		(13,78)		(18,32)		(22,84)
Maluku dan Papua	548	3 164,0	255	4 354,8	307	5 893,2
		(12,41)		(16,29)		(14,84)
Jumlah	56 178	25 502,3	27 016	26 738,2	32 681	45 605,0
		100,00		100,00		100,00

Sumber: Indikator Ekonomi

Sebaran investasi yang terjadi perpulau menunjukkan bahwa aliran investasi asing di tahun 2022 banyak mengalir ke luar P.Jawa. Semua pulau menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun lalu. P. Sulawesi mampu menyerap investasi asing sebanyak US\$ 9,07 miliar lebih banyak dibanding P. Sumatera yang hanya sebesar US\$ 6,92 miliar.

Banyak faktor yang bisa didapatkan pastinya bagi para investor asing yang melakukan investasi di Indonesia. Akan tetapi, bagi investor asing harus tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang mereka jalani dan lakukan selama melakukan investasi di Indonesia. Sebagai tuan rumah yang dilakukan Indonesia agar investor asing tetap menanamkan modalnya di Indonesia adalah menyediakan fasilitas fiskal kepada pelaku usaha yang akan

melakukan investasi, menyediakan instrument investasi yang lebih beragam, memperbaiki regulasi dan birokrasi yang lebih efektif, serta membuat aturan yang lebih fleksibel.

Memasuki tahun 2023, investasi tetap akan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun secara global diprediksi melambat. Sebaran realisasi investasi di Luar Pulau Jawa pada triwulan I 2023 masih terus mendominasi dengan kontribusi sebesar US\$ 6,44 miliar atau 53,87 persen dari total capaian realisasi investasi asing. Adapun untuk realisasi investasi asing di P. Jawa tertinggi masih dipegang oleh provinsi Jawa Barat dengan US\$ 1,90 miliar, diikuti oleh Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Banten.

Khusus untuk capaian realisasi PMA di triwulan II 2023 menurut lokasi tercatat luar P.Jawa 52,25 dan sisanya hanya 47,75 persen adalah P.Jawa. Investasi asing di luar P.Jawa tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencatatkan sebagai lokasi dengan realisasi PMA tertinggi yaitu sebesar US\$1,90 miliar dan kemudian diikuti oleh Maluku Utara sebesar US\$ 1,00 miliar.

Gambar 7.4 Realisasi PMA Menurut Pulau (juta US\$), Triwulan I-II 2023



Meskipun kondisi perekonomian nasional sempat mengalami kontraksi akibat pandemi Covid- 19, kita perlu berbangga karena investasi tahun 2020 bisa tercapai dan melebihi target. Di saat semua negara-negara di dunia mengalami hal yang sama, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan tentunya salah satunya di bidang investasi. Tapi pada kenyataan, kinerja investasi Indonesia masih tetap bisa tumbuh. Ini merupakan suatu strategi kerja yang baik dari BKPM bagi investasi dimana Indonesia masih dipercaya, baik oleh penanam modal di dalam negeri maupun penanam modal dari luar negeri.

Negara yang masih mendominasi investasi di Indonesia di tahun 2020 adalah Singapura, karena memang Singapura menjadi hubungan financial sector dan juga hubungan Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan Asia.

Investasi Singapura yang masuk ke Indonesia mencapai US\$ 9,78 miliar, diikuti oleh negara Tiongkok dan Hongkong masing-masing investasi yang masuk mencapai US\$ 4,84 miliar dan US\$ 3,54 miliar. Kemudian ada Negara Jepang dan Korea Selatan, dimana dari tahun ke tahun nilai investasi dari ke dua negara tersebut makin meningkat investasinya dan masuk lima besar PMA di Indonesia.

Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari adanya UU Cipta Kerja akan menjadi sebuah poin bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan investasi. Dengan UU Cipta Kerja BKPM bisa mengedepankan mana saja sektor-sektor investasi yang menjadi kewenangan BKPM. Salah satunya adalah melalui Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha.

Pada tahun 2021, realisasi investasi asing yang masuk sepanjang tahun 2021 masih di dominasi oleh negara-negara di Asia. Walaupun nilai investasi yang masuk ke Indonesia dari negara Singapura, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mengalami penurunan kecuali negara Hongkong. Investasi dari Negara Hongkong yang masuk ke Indonesia di tahun 2021 mencapai US\$ 4,61 miliar mengalami kenaikan sekitar 30,36 persen. Namun walaupun mengalami penurunan nilai investasi dari negara-negara yang berada di Benua Asia, total investasi dari seluruh negara di Benua Asia mencapai US\$ 23,36 miliar atau sekitar 75,12 persen dari total PMA yang masuk ke Indonesia. Investasi yang berasal dari negara-negara di Benua Eropa mengalami kenaikan di tahun 2021. Kenaikan yang sangat signifikan adalah investasi yang masuk dari negara Amerika Serikat di tahun 2021 mencapai 238,43 persen dibanding investasi di tahun 2020 dengan nilai mencapai US\$ 2,54 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia lebih terintegrasi dengan pasar modal negara-negara utama di Asia seperti Singapura, Tiongkok dan Jepang dibanding dengan pasar di Benua Amerika dan Benua Eropa. Maka yang terjadi di tahun 2022 yaitu perang Rusia dan Ukraina tidak memberikan pengaruh negatif pada kinerja BKPM. Investasi asing yang masuk ke Indonesia semakin meningkat di tahun 2022, terutama dari negara-negara di Benua Asia. Negara tetangga Singapura masih menjadi negara yang berinvestasi sangat besar di Indonesia yaitu mencapai US\$ 13,28 miliar atau naik sekitar 41,44 persen dari tahun lalu. Nilai investasi dari negara Tiongkok ke Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali hingga mencapai 160,28 persen menjadi US\$ 8,23 miliar. Investor yang masih meramaikan pasar Indonesia adalah yang berasal dari Negara Hongkong dan Jepang masing-masing mengalami peningkatan 19,63 persen (US\$ 5,51 miliar) dan 57,42 persen (US\$ 3,56 miliar). Amerika Serikat sebagai negara adidaya menggeser posisi Korea Selatan menjadi negara ke lima terbesar yang melakukan investasi di Indonesia yaitu dengan nilai investasi mencapai US\$ 3,03 miliar.

**Tabel 7.5 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
Menurut Negara Asal (juta US\$), 2020-2022**

Negara	2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMERIKA/AMERICA	3 590	1 566,1	1 591	3 880,1	2 082	4 810,5
U.S.A.	1 471	749,7	824	2 537,2	1 036	3 026,2
Amerika Lainnya / Rest Of America	2 119	816,4	767	1342,9	1 046,0	1 784,3
EROPA/EUROPE	9 275	2 232,5	5 096	3 453,0	6 739	2 901,9
Belanda / Netherlands	2 537	1 422,4	1 243	1 761,6	1 451	1 220,2
Inggris / United Kingdom	1 386	192,8	705	322,9	908	628,3
Swiss / Switzerland	554	130,9	281	599,8	292	133,8
Perancis/France	1 079	25,1	709	145,8	1 160	252,9
Jerman / Germany	1 008	143,6	515	182,3	631	195,5
Eropa Lainnya / Rest of Europe	2 711	317,7	1 643	440,5	2 297	471,2
A S I A	41 310	24 297,4	19 295	23 358,7	22 322	36 859,8
Singapura / Singapore	15 088	9 779,1	6 934	9 390,1	7 960	13 281,1
Jepang / Japan	8 817	2 588,0	3 623	2 263,2	4 220	3 562,8
Tiongkok / China	3 027	4 842,4	1 806	3 160,4	2 117	8 226,0
Korea Selatan / South Korea	5 468	1 841,9	2 511	1 640,2	2 907	2 297,8
Hongkong	2 789	3 535,9	1 418	4 609,3	1 616	5 514,2
Asia Lainnya / Rest of Asia	6 121	1710,0	3 003	2295,5	3 502	3 977,9
AUSTRALIA	1 908	390,1	1 014	236,3	1 228	673,6
Australia	1 562	348,6	839	195,2	982	524,4
Australia Lainnya / Rest of Australia	346	41,6	175	41,1	246	149,2
AFRIKA/AFRICA	643	180,2	275	165,0	310	359,1
Nigeria	10	0,1	3	0,7	11	0,4
Afrika Lainnya / Rest Of Africa	633	180,1	272	164,3	299	358,7
J U M L A H / T O T A L	56 726	28 666,3	27 271	31 093,1	32 681	45 605,0

Sumber: Indikator Ekonomi

Prediksi tahun 2023 akan terjadi resesi dunia, dan perlambatan ekonomi global, namun BKPM tetap optimis akan pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh realisasi investasi pada triwulan I 2023 yang mencapai US\$ 11,96 miliar. Melihat pertumbuhan investasi di triwulan I 2023 yang mencapai 16,6 persen dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Investasi diharapkan masih mampu memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan

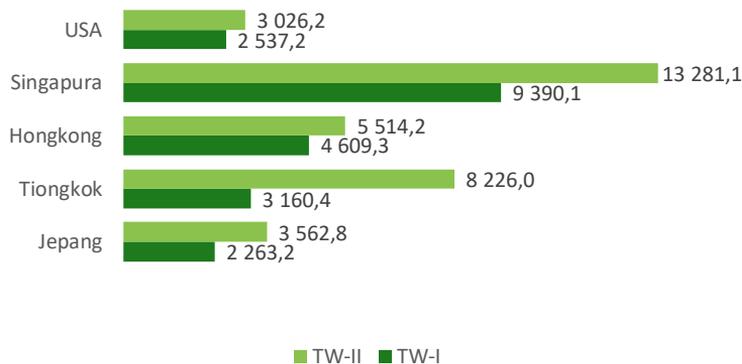
ekonomi. Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada triwulan I 2023 berdasarkan asal negara, realisasi investasi masih didominasi oleh Singapura sebesar US\$ 9,39 miliar; disusul oleh Hong Kong sebesar US\$ 4,61 miliar; kemudian Tiongkok US\$ 3,16 miliar; USA sebesar US\$ 2,54 miliar; dan Jepang sebesar US\$ 2,26 miliar.

Kegiatan investasi di Indonesia masih terus berjalan, bahkan Indonesia masih menjadi incaran investor asing. Investasi asing yang masuk ke Indonesia di triwulan II tahun 2023 masih didominasi negara-negara di Benua Asia. Negara Singapura masih menjadi yang tertinggi dan investasi dari investor Singapura yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan dibanding triwulan I 2023. Pada triwulan II 2023 peningkatan investasi dari Negara Singapura sebesar 41,44 persen yaitu sebesar 13,28 miliar. Sementara itu, peningkatan investasi asing terbesar berasal dari negara Tiongkok, yaitu menjadi US\$ 8,23 miliar pada triwulan II 2023, atau meningkat sebesar 106,28 persen (qtq). Investasi asing yang berasal dari Jepang, Hongkong, dan Amerika Serikat juga mengalami peningkatan (qtq), masing-masing sebesar 57,42 persen, 19,63 persen, dan 19,27 persen.

Pemerintah terus berupaya agar target investasi di tahun 2023 dapat tercapai walaupun kondisi global mengancam, kebijakan yang coba dilakukan adalah memperbaiki ekosistem investasi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait perizinan. Perizinan harus sejalan dengan prinsip Environment, Social Governance (ESG), serta pentingnya peningkatan kapasitas manajemen proyek infrastruktur.

Dari Gambar 7.5 di bawah, terlihat dalam dua triwulan terakhir, Amerika Serikat masuk ke dalam 5 besar negara asal PMA yang membuktikan adanya diversifikasi sumber negara asal yang tidak hanya terfokus pada negara-negara di Asia. Investasi asing yang masuk ke Indonesia di tahun 2023 sebagian besar didominasi negara-negara yang berasal dari benua Asia, yaitu lebih dari 70 persen dari total PMA yang masuk.

Gambar 7.5 Realisasi PMA Menurut Negara Asal (juta US\$), Triwulan I-II 2023



Perdagangan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Bursa efek adalah tempat bertemunya antara investor dan perusahaan atau pemerintah pihak yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara keduanya. Produk-produk yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga yang mempunyai nilai jual antara lain, saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Pasar modal atau bursa efek merupakan sumber utama dari permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Di zaman serba digital ini BEI sudah memberikan keuntungan bagi para investor untuk bertransaksi lebih efisien dari segi kecepatan dan biaya transaksi.

Keberadaan bursa efek atau pasar modal sangat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli, baik investor maupun perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun).

Kondisi pandemi yang tidak menentu menyebabkan para investor membangun spekulasi terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, berita terkait Covid-19 juga ikut andil dalam memengaruhi pergerakan pasar saat itu. Respons pemerintah terhadap situasi pandemi juga turut memengaruhi kondisi pasar modal bagaimana perekonomian akan pulih di masa mendatang. Pandemi Covid-19 telah memicu terjadinya krisis di seluruh dunia. Tak hanya krisis kesehatan, tapi merembet ke krisis sosial hingga ekonomi, tak terkecuali di sektor keuangan. Otoritas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan berat. Salah satu yang terjadi dalam perdagangan saham adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Awal tahun 2020 hingga 20 Maret 2020 dalam waktu hanya tiga bulan saja, IHSG terjun bebas dari level 6.300 menjadi 3.900, begitu pula volume transaksi juga merosot.

Kepanikan yang terjadi di pasar modal Indonesia tidak berlangsung lama terbukti mampu bertahan di tengah badai pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020, menjelang akhir 2021, pasar modal Indonesia telah pulih dari dampak pandemi. Terbukti pasar modal Indonesia telah kembali mencatatkan rekor-rekor pertumbuhan baru baik dari segi perdagangan, pertumbuhan perusahaan tercatat mengalami peningkatan serta jumlah investor juga meningkat. Perlahan ekonomi Indonesia mulai bangkit setelah pandemi melanda walaupun belum seutuhnya Indonesia terbebas dari wabah Covid-19.

Kegiatan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terlihat arus modal asing kembali masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut membuat IHSG yang terjadi di lantai bursa tahun 2021 ditutup di level 6.581. Terjadi kenaikan mencapai 10,07 persen di banding tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2022 terjadi kondisi ketegangan antara Rusia-Ukraina yang berdampak pada kondisi pasar modal global yang kurang kondusif, namun kondisi pasar modal Indonesia masih mampu menarik modal asing kembali masuk diikuti perbaikan disektor riil mulai terlihat didukung dengan perbaikan sektor keuangan. Mendorong IHSG meningkat di penghujung tahun 2022 berada di level 6.851 hanya mampu tumbuh 4,10 persen, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Sementara itu, Bank Dunia memprediksi tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global, beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh beberapa bank central berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Kondisi ini dicermati dengan kehati-hatian, sepanjang semester I-2023, kinerja



“Bank Dunia memprediksi tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global, beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh beberapa bank central berbagai negara”

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau kurang memuaskan, di mana IHSG dibulan Januari 2023 berada di level 6.839. IHSG sampai bulan Maret 2023 berfluktuasi bahkan sempat turun ke level 6.805 atau turun 0,56 persen. Kinerja IHSG di bulan April 2023 sempat bergairah naik ke level 6.916.

Di sisi lain, IHSG mencatatkan penurunan paling dalam sebesar 4,09 persen terjadi pada perdagangan di bulan Mei 2023 yang hanya berada di level 6.633. Pada perdagangan di bulan Juni 2023 IHSG mampu mencapai penguatan 0,44 persen.

Memasuki tahun 2023 disaat pemerintah mulai mencabut PPKM setiap bulannya. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2022 sangat bergairah membuat IHSG berada di level 6631. IHSG di bulan Februari – April 2022 terus mengalami kenaikan setiap bulannya, Namun di Bulan Mei 2022 IHSG terkoreksi atau mengalami penurunan menjadi 7149 dibanding bulan April IHSG tercatat sebesar 7229.

Sementara itu, para investor juga harus siap dengan risiko atau kondisi seperti yang terjadi saat pandemi di tahun 2020 semua sektor terkena imbasnya tak terkecuali pasar modal, dimana jumlah saham yang diperdagangkan terjadi penurunan sekitar 22,73 persen menjadi 2,75 triliun lembar saham dengan

nilai transaksi hanya mencapai Rp 2.228,80 triliun atau turun sebesar 0,10 persen. Hal ini mencerminkan sebagian besar perilaku investor cenderung wait and see, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Tahun 2021 perdagangan saham dilantai bursa BEI kembali bergairah sampai akhir tahun jumlah saham yang diperdagangkan meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2020 yaitu mencapai 5,10 triliun lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 3.302,93 triliun.

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2022 masih dihadapkan oleh berbagai tantangan global, kinerja BEI masih mampu dalam menjaga aktivitas pasar dan tetap dapat membukukan sejumlah pencapaian dan berhasil ditutup dengan performa yang positif, baik dari sisi supply maupun demand. Kinerja positif pasar modal menunjukkan jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 5,89 triliun lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp 3.617,90 triliun, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan global. Jumlah saham dan nilai transaksi pada tahun tersebut menjadi capaian yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Berbagai capaian perdagangan Bursa Efek Indonesia tersebut menjadi pijakan positif bagi pelaku pasar untuk menatap optimis perekonomian di tahun 2023. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia setiap bulannya di tahun 2023 tercatat, pada bulan Januari 2023 jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 384,62 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 216,20 triliun. Perdagangan saham yang diperdagangkan di bulan Februari – April 2023 terus mengalami penurunan begitu pula dengan nilai transaksinya juga terus menurun. Pada Bulan Mei 2023 jumlah saham yang diperdagangkan mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya mencapai 451,60 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 234,59 triliun. Situasi ekonomi global dan pelambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang Indonesia turut mempengaruhi perdagangan saham, dimana pada Bulan Juni 2023 jumlah saham yang diperdagangkan kembali mengalami penurunan hanya mencapai 312,81 miliar lembar saham dengan nilai transaksi hanya mencapai Rp 163,92 triliun.

Kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada 2023, banyak perusahaan akan go publik, termasuk sektor UMKM yang naik kelas, serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi. Di lain pihak, regulator dan pengawas pasar modal, baik OJK maupun BEI, agar lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor, sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap pasar modal Indonesia.

Kinerja Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengalami perbaikan seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional

dari dampak pandemi Covid-19. Jumlah perusahaan yang mencetak laba pun meningkat. Dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik, kinerja emiten telah mengalami peningkatan. Sebagai informasi BEI mencatat jumlah emiten di tahun 2019 sebanyak 804 emiten.

OJK berharap peningkatan kinerja emiten bisa terus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, pasar modal Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 jumlah emiten bertambah menjadi 849 perusahaan. Sepanjang tahun 2021 jumlah emiten tercatat mencapai 902 perusahaan. Sementara itu pada tahun 2022 jumlah emiten terus naik mencapai 967 emiten.

Ini membuktikan semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan diharapkan kebutuhan pendanaan industri menjadi terpenuhi dan semakin banyak pelaku usaha yang dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan adanya peningkatan jumlah emiten yang mencari bantuan modal usaha di bursa efek, sepanjang Januari-Juni 2023. Pada Januari 2023, jumlah emiten di BEI tercatat sebanyak 976 perusahaan, selang sebulan pada Februari 2023, jumlahnya menjadi 986 perusahaan. Setiap bulan jumlah emiten terus bertambah sampai dengan bulan Mei 2023 jumlah emiten di BEI sudah menembus angka 1000 emiten tepatnya 1001 emiten dan sebulan kemudian jumlah emiten bertambah lagi sebanyak 7 perusahaan menjadi 1.008 emiten.

Secara umum, perkembangan jumlah emiten mengalami peningkatan yang sangat baik dalam lima tahun terakhir. Kedepan, BEI akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan layanan. Hal ini perlu dukungan pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SRO di pasar modal. Pengembangan layanan juga mencakup tiga hal yaitu dari sisi suplai atau emiten, produk, dan peningkatan investor. Saat ini kapasitas jaringan perlu untuk mengantisipasi penambahan jumlah investor dan transaksi yang ada kedepannya. Rencananya pembaharuan platform perdagangan dan pengawasan yang akan dilakukan di tahun 2024.

Bertambahnya jumlah emiten diikuti dengan emisi saham yang dikeluarkan oleh para emiten yang terus meningkat setiap tahunnya, termasuk nilai emisinya juga terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 6.291,28 triliun lembar dengan nilai mencapai Rp 1.026 triliun. Emisi saham di tahun 2022 mencapai 7.061,66 triliun lembar dengan nilai emisi mencapai Rp 1.396 triliun.

Sementara itu disaat pemerintah sudah menghapus PPKM dan menyatakan pandemi Covid-19 menjadi endemi membuat kinerja pasar Saham di BEI semakin bergairah. Emisi saham yang diperjual belikan menunjukkan peningkatan setiap bulannya. Pada Januari 2023 sebanyak 7.185,97 triliun

lembar saham yang dikeluarkan dengan nilai mencapai Rp 1.409 triliun. Dua bulan kemudian yaitu di Bulan Maret 2023 jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 7.213,50 triliun lembar saham dengan nilai emisi mencapai Rp 1.424 triliun. Sejalan dengan meningkatnya volume jumlah emisi saham yang diperdagangkan maka nilai emisinya juga meningkat. Sampai dengan semester I 2023 jumlah emisi saham yang diperdagangkan mencapai 7.425,60 triliun lembar dengan nilai emisi Rp 1.476 triliun.

Tabel 7.6 Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, 2017-2023

Periode	Jumlah saham yang diperdagangkan (miliar lembar)	Nilai transaksi (miliar rupiah)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Jumlah Emiten	Emisi saham (miliar lembar)	Nilai emisi (triliun rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	2844,85	1809592	6.356	688	611290	907
2018	2536,28	2040086	6.195	745	4651479	959
2019	3562,37	2230919	6.300	804	4832407	1003
2020	2752,47	2228798	5.979	849	6291282	1026
2021	5096,45	3302932	6.581	902	6721396	1285
2022	5885,86	3617896	6851	967	7061658	1396
2023						
Januari	384,62	216 200	6 839	976	7185 966	1 409
Februari	379,83	196 432	6 843	986	7209 117	1 421
Maret	363,78	214 133	6 805	989	7213 497	1 424
April	218,53	154 178	6 916	998	7252 625	1 447
Mei	451,60	234 591	6 633	1 001	7375 915	1 459
Juni	312,81	163 919	6 662	1 008	7425 600	1 476

Sumber : kolom 2-4 <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/laporan-statistik/statistik>
Kolom 5-7 <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Pages/SEKI-JUNI-2023.aspx>

Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia

Perdagangan saham di Indonesia tidak terlepas dari peran investor asing, terlihat dari peran investor asing dalam pasar modal semakin signifikan yang diindikasikan dengan transaksi pemodal asing yang terbilang cukup aktif. Indonesia masih menjadi tujuan para investor asing untuk menanamkan modalnya. Faktor utama yang menjadi salah satu daya tarik investor asing karena kondisi tingkat keamanan di Indonesia yang cukup aman untuk saat

ini. Investasi asing dapat berperan positif maupun negatif bagi kinerja pasar modal domestik. Peran investor asing di pasar saham Indonesia masih penting terutama dalam menggerakkan IHSG. Pasalnya, pola investasi investor asing yang biasanya buy and hold dinilai akan lebih menyeimbangkan transaksi aktif di pasar saham beriringan dengan tren trading investor lokal.

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tidak terlepas dari peran investor asing, pandemi Covid-19 di tahun 2020 tidak memengaruhi investor asing. Dimana investor asing membeli saham mencapai 375,17 miliar lembar saham dengan nilai beli mencapai Rp 677,32 triliun. Namun ada juga investor asing yang menjual sahamnya yaitu sebanyak 432,90 miliar lembar dengan nilai jual mencapai Rp 725,13 triliun.

Sepanjang 2021, para investor asing untuk membeli saham di pasar modal Indonesia menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 521,72 miliar lembar dengan nilai mencapai Rp 850,81 triliun. Namun banyak juga investor asing yang menjual sahamnya yaitu mencapai 567,60 miliar lembar dengan nilai jual hanya mencapai Rp 812,83 triliun.

Memasuki tahun 2022, kondisi di dalam negeri terjadi pemulihan ekonomi berjalan baik selain itu juga diuntungkan dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina membuat terjadinya kenaikan ekspor Indonesia sejak awal tahun, membuat neraca dagang Indonesia surplus, cadangan devisa serta kebijakan pemerintah yang cukup proaktif dalam memanfaatkan momentum, membuat pemulihan ekonomi Indonesia sudah berjalan dengan baik. Pasar bursa Indonesia sangat bergairah pada 2022 volume saham yang dibeli oleh pihak asing sebanyak 794,39 miliar lembar dengan nilai mencapai Rp 1.219,67 triliun, sedangkan volume saham yang dijual oleh pihak asing mencapai 850,28 miliar lembar dengan nilai sebesar Rp 1.144,55 triliun.

Hal-hal yang harus diwaspadai di tahun 2023 adalah kondisi ekonomi global masih mengalami ketidakpastian. Bahkan, tantangan ekonomi di beberapa negara digambarkan sangat menakutkan dimana beberapa negara mengalami inflasi yang melonjak, akibat kenaikan harga energi hingga kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara. Selain itu juga yang harus diwaspadai adalah terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global dan perubahan iklim dimana semua ini sangat memengaruhi pasokan bahan makanan yang berpotensi berimbas pada perekonomian. Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional.

Aktivitas pasar modal Indonesia di tahun 2023 masih berjalan baik dibanding pasar bursa negara-negara lain. Perdagangan saham yang dibeli oleh pihak asing di Bulan Januari 2023 mencapai 66,87 miliar lembar dengan nilai beli mencapai Rp 75,36 triliun. Saham yang dijual oleh pihak asing di

Bulan Januari 2023 mencapai 63,54 miliar lembar saham dengan nilai jual hanya mencapai Rp 78,58 triliun.

Tabel 7.7 Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, 2018-2023

Periode	Volume (juta lembar)		Nilai (Miliar Rupiah)	
	Beli	Jual	Beli	Jual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	297 835	327 492	688 492	672 323
2019	329 565	441 427	642 946	682 816
2020	375 165	432 902	677 316	725 129
2021	521 724	567 600	850 807	812 833
2022	794 389	850 283	1219 674	1144 547
2023				
Januari	66 873	63 537	75 361	78 575
Februari	67 113	73 624	72 742	67 033
Maret	98 514	93 242	88 773	84 650
April	41 959	47 221	58 201	45 906
Mei	171 844	134 816	100 418	98 747
Juni	71 607	75 608	61 355	65 732
Juli	59 119	58 905	69 811	67 095

Sumber: <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/laporan-statistik/statistik>

Pihak asing yang melakukan transaksi beli saham meningkat setiap bulannya hingga bulan Maret 2023 mencapai 98,51 miliar lembar dengan nilai mencapai Rp 88,77 triliun. Begitu pula dengan saham yang di jual oleh pihak asing juga mengalami peningkatan setiap bulannya hingga Maret 2023 jumlah saham yang di jual oleh pihak asing mencapai 93,24 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 84,65 triliun.

Pembelian dan perdagangan saham oleh pihak asing di bulan April 2023 terjadi penurunan. Harga beli dan jual saham di bulan tersebut juga menurun. Akan tetapi, trading saham meningkat cukup tajam pada Mei 2023. Saham yang dibeli oleh pihak asing mencapai 171,84 miliar lembar saham dengan nilai Rp 100,42 triliun. Sementara itu, saham yang dijual oleh pihak asing mencapai 134,82 miliar lembar saham dengan nilai Rp 98,75 triliun.

Namun, pada Juni-Juli 2023, volume saham yang dibeli dan dijual oleh pihak asing mengalami penurunan setiap bulannya. Kendati demikian, nilai transaksi pada Juli 2023, mengalami peningkatan baik untuk saham yang dibeli maupun dijual, dibandingkan bulan sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan porsi kepemilikan aset pasar modal Indonesia lebih didominasi oleh investor domestik, kondisi ini bisa mengurangi risiko eksternal. Selain itu juga mayoritas investor pasar modal Indonesia didominasi investor dengan kategori muda. Kategori ini memiliki literasi keuangan dan digital yang relatif tinggi sehingga lebih cepat menyerap informasi baru di pasar modal.

<https://www.bps.go.id>

PARIWISATA

8

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA (juta kunjungan)



Indikator pemulihan dari pandemi Covid-19 di tahun 2022 terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya, mencapai **5,89 juta kunjungan**.

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA MENURUT KEBANGSAAN, 2022 (ribu kunjungan)



Pada tahun 2022, kunjungan wisman bekebangsaan Malaysia ke Indonesia mencapai **1,21 juta kunjungan**

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

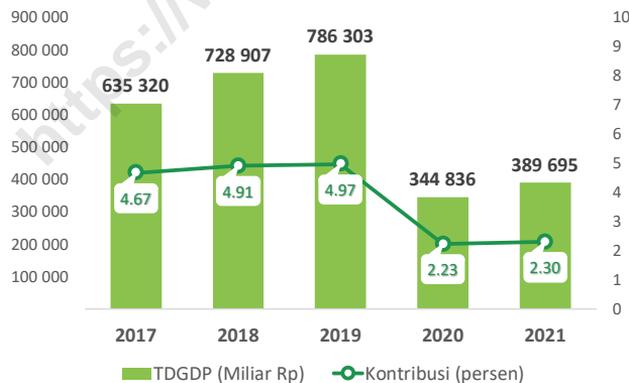
“Sektor Pariwisata di Indonesia mulai bangkit setelah pandemi Covid-19, meskipun masih lebih rendah apabila dibandingkan periode sebelum pandemi”

<https://www.bps.go.id>

Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam dan budaya menjadi salah satu daya tarik wisatawan, baik dari mancanegara maupun domestik. Pengembangan potensi pariwisata sangat berarti untuk penciptaan lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar, khususnya pada sektor akomodasi dan makan minum, jasa transportasi, dan industri lainnya. Selain itu, sektor pariwisata juga berperan sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan devisa negara melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional.

Salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional adalah nilai Produk Domestik Bruto Langsung Sektor Pariwisata atau *Tourism Direct Gross Domestic Product* (TDGDP). TDGDP Indonesia tahun 2021 senilai Rp 389,69 triliun. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 2,30 persen terhadap PDB secara total. Turunnya kontribusi pariwisata sejak 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menekan pariwisata di seluruh dunia. Sebelum pandemi Covid-19, kontribusi pariwisata hampir mencapai 5 persen terhadap perekonomian nasional. Di tahun 2022 dan 2023 kontribusinya diperkirakan akan meningkat dilihat dari sektor yang terkait pariwisata yang terus tumbuh, meskipun diprediksi belum mencapai kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 8.1 *Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP)* dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional, 2017-2021



Sumber: *Tourism Satellite Account (TSA) Indonesia 2017-2021*, Badan Pusat Statistik

Hasil *Tourism Satellite Account (TSA)* dapat menjelaskan bahwa bertahannya sektor pariwisata di tahun 2021 disumbang oleh wisatawan domestik, di tengah masih ditutupnya batas antar negara yang membuat wisatawan mancanegara menurun. Sepanjang 2021, penerimaan devisa sektor pariwisata hanya mencapai US\$ 0,54 miliar menjadi salah satu indikator rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara di tengah pandemi Covid-19. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang menjadi tahun pertama pandemi. Penerimaan devisa sektor pariwisata pada tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 3,31 miliar.

Namun demikian, seiring dengan terkendalinya pandemi di tahun 2022 yang berdampak pada kembali normalnya penerbangan internasional dan sinyal pemulihan ekonomi dunia, penerimaan devisa sektor pariwisata Indonesia hingga Bulan November 2022 telah tercatat mencapai US\$ 4,26 miliar. Angka tersebut melampaui hingga 2,5 kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar US\$ 1,71 miliar. Di tahun 2023, Kemenparekraf optimis bahwa pariwisata akan terus tumbuh dan menargetkan penerimaan devisa pariwisata mencapai 2,07 hingga US\$ 5,95 miliar. (*ekonomi.bisnis.com*, 25 Januari 2023). Angka tersebut ditargetkan masih di bawah kondisi sebelum pandemi dan masih jauh apabila dibandingkan target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, yaitu sektor pariwisata ditargetkan menyumbang devisa hingga US\$ 30 miliar pada tahun 2024.

Gambar 8.2 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (miliar US\$), 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Daya saing pariwisata Indonesia di kancah global cukup menjanjikan. Pada tahun 2022, hasil *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan bahwa Indonesia peringkat ke-32 dari 117 negara di dunia. Capaian tersebut meningkat 12 peringkat dibandingkan sebelumnya. Sebagai salah satu upaya penguatan pariwisata Indonesia, Kemenparekraf pada akhir tahun 2022 membangun Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) yang diturunkan dari konsep TTDI dan disesuaikan dengan kondisi nasional. Tujuan dari IPKN antara lain untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan. IPKN diukur pada level provinsi, dengan hasil tiga provinsi terbaik adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Hasil tersebut menunjukkan komitmen, inovasi, dan kolaborasi yang kuat dalam pengembangan potensi pariwisata di provinsi tersebut. (*AntaraneWS*, 2022 dan *Kemenparekraf*, 2022).

Setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, sektor pariwisata kembali bangkit dan tumbuh pesat di tahun 2022. Bisa dikatakan, tahun 2022 menjadi tahun pemulihan sektor pariwisata. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kedua sektor yang menjadi penopang utama pariwisata. Sepanjang tahun 2022, sektor Transportasi dan Pergudangan (H)

serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) tumbuh signifikan, masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen dan 13,81 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut dua sektor dengan pertumbuhan tertinggi dibanding sektor lainnya.

Gambar 8.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-o-y), 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi di sektor Transportasi dan Pergudangan (H) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) tumbuh positif di sepanjang kuartal 2022. Pertumbuhan tertinggi keduanya terjadi pada kuartal ketiga 2022 yang masing-masing mencapai 25,80 persen dan 17,83 persen. Pelonggaran kebijakan yang disampaikan oleh presiden mengenai tidak wajibnya syarat tes PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri serta diperbolehkannya melepas masker ketika beraktivitas di luar ruangan pada pertengahan Mei 2022 diduga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kedua sektor tersebut di kuartal 3 tahun 2022.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Meningkat Selama Tahun 2022

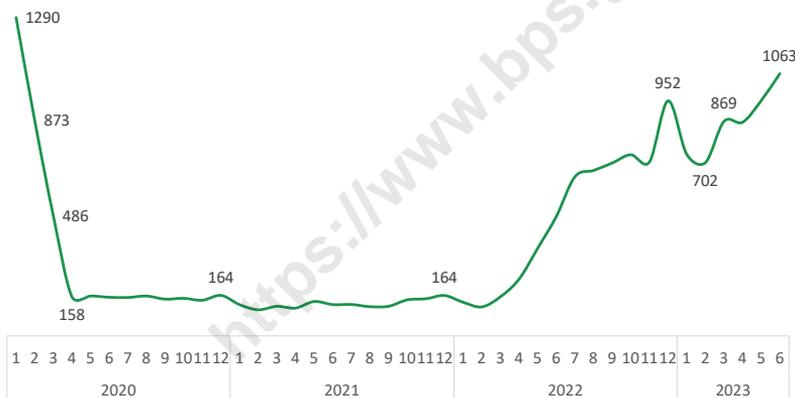
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, jumlah kunjungan tercatat hingga 5,89 juta kunjungan atau melewati target awal sebesar 3,6 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah nilainya stagnan pada kisaran 100 ribu kunjungan hampir dua tahun dimulai sejak April 2020, pada Bulan April 2022 jumlah kunjungan meningkat

“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2022 mencapai 5,89 juta kunjungan, meningkat hingga hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya”

menjadi 230 ribu kunjungan (Gambar 8.4). Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Bulan Desember sejumlah 952 ribu kunjungan. Meskipun capaian tersebut belum mencapai capaian sebelum pandemi Covid-19, capaian tersebut menjadi bukti dari momentum bangkitnya pariwisata Indonesia.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan seiring dengan terkendalinya penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pelonggaran pembatasan sosial, termasuk pelonggaran persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pesaratan tes PCR dan antigen tidak lagi diwajibkan bagi pelaku perjalanan yang telah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap. Aturan ini juga sekaligus mendorong cakupan vaksinasi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga memperbolehkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tanpa mengenakan masker (*Nasional.tempo.co*, 2022).

Gambar 8.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (ribu kunjungan), 2020-2023



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

Memasuki tahun 2023, kunjungan pariwisata di Indonesia masih terus tumbuh. Kemenparekraf menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 sebesar 7,4 juta kunjungan. Target tersebut optimis akan tercapai apabila melihat sinyal positif capaian pada Semester I 2023 yang telah tercatat 5,19 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Angka tersebut juga naik signifikan dibandingkan Semester I 2022, yang mencatatkan hanya sebesar 1,48 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya antara lain dengan menyelenggarakan acara berkelas internasional, seperti *sport tourism*, pengembangan desa wisata, hingga promosi paket wisata. Pemerintah juga menyasar wisatawan yang berkualitas dengan lama tinggal yang lebih panjang dan pengeluaran yang lebih banyak. Dengan demikian, kunjungan wisatawan nusantara akan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat.

Pariwisata Bali masih menjadi destinasi utama dari wisatawan mancanegara. Setelah di tahun 2021 dapat dikatakan hampir tidak ada turis asing yang datang di Pintu Udara Ngurah Rai Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu masuk tersebut mencapai 2,15 juta kunjungan. Hal tersebut juga berarti bahwa 36,58 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia masih memilih Bali sebagai destinasi kunjungannya. Akan tetapi, jumlah kunjungan tersebut masih belum sepenuhnya normal apabila dibandingkan jumlah kunjungan sebelum pandemi Covid-19 yang secara rata-rata mencapai 5,97 juta kunjungan pada tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 8.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama (kunjungan), 2020-2023

Tahun	Pintu Masuk				Jumlah
	Pintu Udara Soekarno-Hatta (Jakarta)	Pintu Udara Ngurah Rai (Bali)	Pintu Laut (Batam)	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	435 139	1 059 198	295 336	2 263 250	4 052 923
2021	119 063	43	2 582	1 435 842	1 557 530
2022	934 661	2 154 045	562 920	2 237 405	5 889 031
Januari	14 073	0	240	121 985	136 298
Februari	15 406	1 293	329	100 481	117 509
Maret	23 320	14 617	995	119 697	158 629
April	36 061	58 315	8 136	127 564	230 076
Mei	57 844	115 553	16 741	164 782	354 920
Juni	85 587	181 545	39 649	177 102	483 883
Juli	119 179	246 442	56 610	222 890	645 121
Agustus	121 427	276 627	59 750	212 705	670 509
September	111 033	291 115	77 981	220 477	700 606
Oktober	112 527	305 152	77 752	238 797	734 228
November	113 729	287 025	80 216	223 813	704 783
Desember	124 475	376 361	144 521	307 112	952 469
2023					
Januari	115 590	330 037	94 247	196 073	735 947
Februari	125 209	317 109	73 661	185 952	701 931
Maret	140 859	366 956	97 040	264 388	869 243
April	99 289	410 281	88 776	267 464	865 810
Mei	158 550	439 454	76 577	279 132	953 713
Juni	161 114	478 127	133 616	289 932	1 062 789

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

Pintu Udara Soekarno-Hatta Jakarta dan Pintu Laut Batam menjadi pintu masuk utama setelah Pintu Udara Ngurah Rai Bali. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan yang masuk melalui Pintu Udara Soekarno-Hatta Jakarta tercatat sejumlah 934,66 ribu kunjungan atau 15,87 persen dari total kunjungan dan jumlah wisatawan yang masuk melalui Pintu Laut Batam sejumlah 562,92 ribu kunjungan atau 9,56 persen dari total kunjungan. Sisanya, sejumlah 2,24 juta kunjungan atau 37,99 persen melalui pintu masuk lainnya.

Jumlah kunjungan tertinggi di seluruh pintu masuk utama tercatat pada Bulan Desember 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitu kunjungan pariwisata mencapai puncaknya pada libur natal dan tahun baru. Selanjutnya, kunjungan wisatawan mancanegara di kuartal pertama 2023 meningkat pesat dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan melalui pintu masuk Pintu Udara Ngurah Rai Bali telah tercatat 1,01 juta kunjungan, Pintu Udara Soekarno-Hatta Jakarta sejumlah 382,15 ribu kunjungan, dan Pintu Laut Batam sejumlah 585,86 ribu kunjungan.

Tabel 8.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan (kunjungan), 2020-2022

Negara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Malaysia	980 118	480 723	1 212 574
Singapura	280 492	18 704	736 797
Jepang	92 228	5 952	73 913
Korea Selatan	75 562	9 497	122 221
Taiwan	35 680	1 398	25 750
Tiongkok	239 768	54 713	169 378
Australia	256 291	3 196	655 370
Amerika Serikat	91 782	21 962	188 764
Jerman	46 361	3 429	128 634
Belanda	53 495	12 229	115 052
Inggris	69 997	5 177	170 881
Lainnya	1 831 149	940 550	2 289 697
Jumlah	4 052 923	1 557 530	5 889 031

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

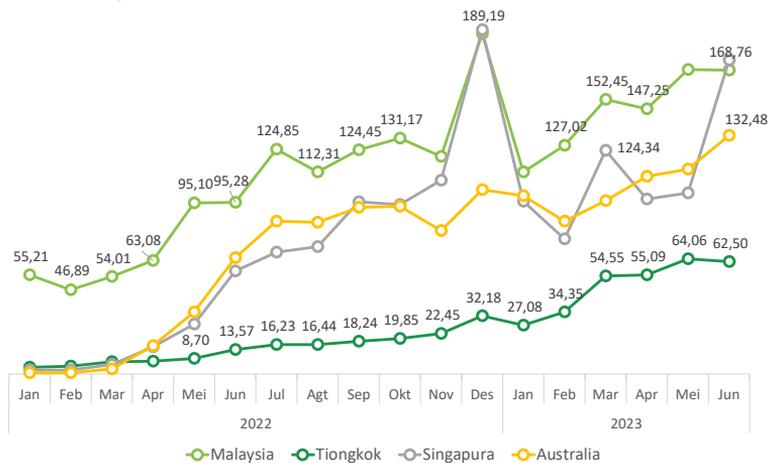
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2022 tercatat dari berbagai kebangsaan. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia didominasi oleh kebangsaan Malaysia, Singapura, dan Australia. Jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia sepanjang tahun 2022 mencapai 1,21 juta kunjungan atau 20,59 persen dari total kunjungan. Angka tersebut meningkat hingga 1,5 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Sedangkan,

jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan Singapura dan Australia sejumlah 736,80 ribu kunjungan dan 655,37 ribu kunjungan dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,51 persen dan 11,13 persen dari total kunjungan. Tidak hanya menarik turis dari negara sekitar Indonesia, wisatawan mancanegara yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Amerika Serikat tercatat sejumlah 188,76 ribu kunjungan. Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Inggris mencapai 170,88 ribu kunjungan.

“Wisatawan mancanegara 2022 didominasi kebangsaan Malaysia dan Singapura”

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara yang berkebangsaan Tiongkok di tahun 2022 mencapai 169,38 ribu kunjungan. Sebagai salah satu mitra dagang Indonesia dan juga sebagai negara dengan penduduk terbanyak, sebelum pandemi Covid-19 Tiongkok biasanya menyumbang wisatawan mancanegara terbanyak setelah Malaysia. Misalkan pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia didominasi oleh Malaysia (2,98 juta kunjungan) dan Tiongkok (2,07 juta kunjungan). Menilik tren tersebut, kunjungan wisatawan berkebangsaan Tiongkok ke Indonesia belum sepenuhnya meningkat di tahun 2022. Hal tersebut juga dipengaruhi masih adanya pembatasan perjalanan oleh pemerintah Tiongkok (*Cnbcindonesia.com, 2020 dan Kompas.com, 2022*)

Gambar 8.5 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Beberapa Kebangsaan (ribu kunjungan), 2022-2023



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

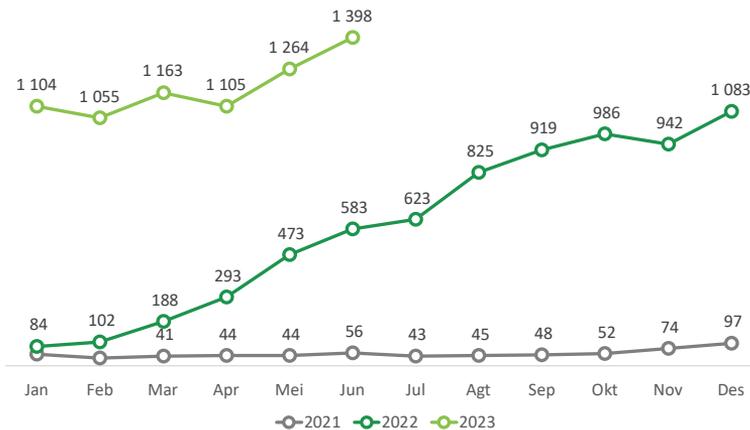
Apabila dilihat perkembangan antar bulan di tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Malaysia, Singapura, dan

Australia mulai meningkat cukup tinggi dari Bulan Mei 2022. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pelonggaran syarat perjalanan baik untuk pelaku perjalanan domestik dan internasional yang tidak lagi wajib melakukan tes PCR. Hingga akhir tahun, tren jumlah wisatawan dari tiga kebangsaan tersebut cenderung meningkat. Puncak jumlah kunjungan terjadi pada Bulan Desember 2022, dengan jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan Singapura 191,23 ribu kunjungan, Malaysia 189,19 ribu kunjungan, dan 102,36 ribu kunjungan. Memasuki tahun 2023, perkembangan wisatawan dari tiga kebangsaan tersebut menurun tetapi lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Penumpang Transportasi Udara Meningkat di Akhir Tahun 2022

Sejalan dengan perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang menunjukkan tren positif selama tahun 2022, perkembangan transportasi udara juga menunjukkan hal yang serupa. Jumlah penumpang yang berangkat pada penerbangan internasional terus mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2022 (Gambar 8.6). Pada Januari 2022, jumlahnya hanya mencapai 84 ribu orang dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun menjadi 1,08 juta orang. Tren positif tersebut terus berlanjut memasuki tahun 2023. Pada Bulan Januari 2023, jumlah penumpang yang berangkat pada penerbangan internasional tercatat sebanyak 1,10 juta orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Gambar 8.6 Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Internasional (ribu orang), 2021-2023



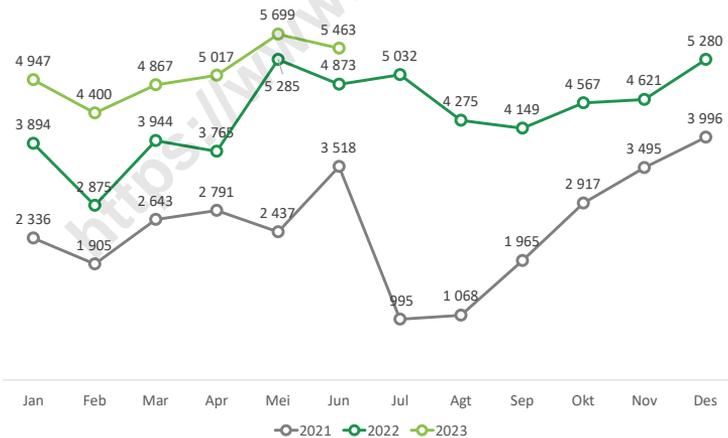
Sumber: Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik

Sementara itu, penerbangan domestik yang lebih dahulu pulih dari pandemi Covid-19 juga mengalami peningkatan di tahun 2022. Peningkatan

jumlah keberangkatan pada penerbangan domestik terlihat cukup signifikan pada Bulan Mei 2022 hingga 5,28 juta orang, bertepatan dengan dicabutnya persyaratan tes PCR bagi pelaku perjalanan. Selain itu, pada awal periode tersebut juga bertepatan dengan libur hari raya idul fitri dan empat hari cuti bersama sehingga mendorong lebih banyak pelaku perjalanan untuk mudik ke kampung halaman. Pada Bulan Desember 2022 juga kembali terjadi peningkatan jumlah penumpang berangkat pada penerbangan domestik hingga 5,28 juta orang karena bertepatan dengan hari natal dan libur tahun baru.

Meningkatnya minat masyarakat untuk kembali melakukan perjalanan terutama dengan transportasi udara dikonfirmasi dengan data Angkasa Pura Airports yang telah melayani 52,29 juta penumpang di 15 bandara yang dikelola selama tahun 2022. Angka tersebut meningkat tajam hingga 84 persen apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya (*ap1.co.id*, 11 Januari 2023). Pada Januari 2023, jumlah penumpang berangkat pada penerbangan domestik telah tercatat sebanyak 4,95 juta orang. Kondisi tersebut meningkat hingga 27,04 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Gambar 8.7 Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik (ribu orang), 2021-2023



Sumber: Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik

Tren Okupansi Hotel Meningkat

Akomodasi atau penginapan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan ketika seseorang melakukan perjalanan wisata. Statistik perkembangan akomodasi menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat pertumbuhan pariwisata di suatu wilayah. Secara umum, jumlah akomodasi berbintang di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah akomodasi hotel bintang mencapai 3,76 ribu atau meningkat 6,87 persen dibanding tahun 2021. Sejalan dengan peningkatan jumlah akomodasi

hotel bintang, jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang juga mengalami peningkatan di tahun 2022. Pada tahun 2022 secara nasional tercatat sebanyak 358,83 ribu kamar dengan total tempat tidur yang tersedia sebanyak 539,99 ribu tempat tidur.

Tabel 8.3 Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Provinsi, 2021-2022

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	26	34	1 927	1 990	3 107	3 394
Sumatera Utara	145	150	12 251	12 523	18 192	19 270
Sumatera Barat	86	47	5 225	3 399	8 052	5 227
Riau	93	94	8 527	8 851	12 304	12 714
Jambi	37	35	2 644	2 651	3 987	3 876
Sumatera Selatan	77	80	6 618	6 868	9 112	10 106
Bengkulu	17	17	1 053	1 053	1 582	1 624
Lampung	28	28	2 858	2 676	4 138	4 110
Kep. Bangka Belitung	51	50	3 346	3 423	5 030	5 174
Kepulauan Riau	101	129	11 784	13 476	16 263	18 674
DKI. Jakarta	384	402	52 543	53 950	68 868	71 674
Jawa Barat	521	552	50 053	52 518	77 539	82 191
Jawa Tengah	333	339	27 348	28 144	42 558	51 632
DI. Yogyakarta	168	176	16 293	16 564	25 777	27 877
Jawa Timur	283	333	30 119	33 185	43 042	50 017
Banten	126	137	12 398	12 668	18 627	18 620
B a l i	403	434	46 302	47 751	63 194	67 836
Nusa Tenggara Barat	63	79	4 997	6 151	7 562	9 079
Nusa Tenggara Timur	34	38	2 628	2 843	4 088	4 955
Kalimantan Barat	48	50	4 936	4 846	6 982	7 108
Kalimantan Tengah	20	25	1 673	1 931	2 340	2 867
Kalimantan Selatan	60	60	4 782	4 643	6 836	7 456
Kalimantan Timur	70	73	7 554	7 599	10 486	11 176
Kalimantan Utara	7	8	411	468	593	667
Sulawesi Utara	50	51	4 903	4 394	7 092	6 150
Sulawesi Tengah	13	13	993	1 073	1 428	1 661
Sulawesi Selatan	147	172	11 887	13 102	17 641	19 775
Sulawesi Tenggara	25	28	1 819	1 853	2 789	2 908
Gorontalo	7	7	590	592	926	802
Sulawesi Barat	3	5	109	214	148	310

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maluku	22	23	1 272	1 387	1 780	1 884
Maluku Utara	11	11	664	676	999	1 088
Papua Barat	19	19	1 362	1 333	2 037	2 182
Papua	43	64	3 193	4 038	4 573	5 905
Indonesia	3 521	3 763	345 062	358 833	499 672	539 989

Sumber: Statistik Indonesia 2023, Badan Pusat Statistik

Jumlah hotel bintang di Indonesia paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2022, terdapat 552 akomodasi hotel bintang di provinsi tersebut dengan total 52,52 ribu kamar dan 82,19 ribu tempat tidur. Sedangkan provinsi dengan jumlah hotel terbanyak lainnya adalah Provinsi Bali dan DKI Jakarta. Terdapat akomodasi hotel bintang sebanyak 434 akomodasi di Provinsi Bali dan 402 di DKI Jakarta.

Peningkatan jumlah akomodasi hotel bintang hampir terjadi di seluruh provinsi, kecuali Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan akomodasi hotel bintang cukup signifikan dari 86 di tahun 2021 menjadi 47 akomodasi di tahun 2022. Angka tersebut turun hingga 45,35 persen. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan angka statistik lain yaitu jumlah akomodasi lainnya di Sumatera Barat justru mengalami peningkatan dari 756 akomodasi menjadi 916 di tahun 2022. Akomodasi lainnya ini mencakup hotel melati dan jasa akomodasi lainnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya pergeseran klasifikasi akomodasi di Sumatera Barat, yang sebelumnya didominasi oleh hotel bintang 1 dan bintang 2. Sedangkan untuk jumlah kamar dan tempat tidur pada hotel bintang di Sumatera Barat juga otomatis mengalami penurunan di tahun 2022, masing-masing sejumlah 3,40 ribu kamar dengan total tempat tidur sebanyak 5,23 ribu.

Tabel 8.4 Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (persen), 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	43,58	43,18	27,38	29,85	32,52
Sumatera Utara	56,87	48,86	30,70	37,65	44,52
Sumatera Barat	56,18	56,00	35,34	42,13	48,48
Riau	48,71	48,69	32,38	39,57	41,62
Jambi	43,44	45,49	34,40	38,33	48,79
Sumatera Selatan	58,88	53,99	40,75	48,83	53,61
Bengkulu	58,91	64,06	39,40	38,61	40,24
Lampung	59,55	60,31	44,04	43,59	55,67
Kep. Bangka Belitung	40,02	36,07	23,32	23,11	33,70

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Riau	57,33	52,31	27,05	25,54	40,92
DKI Jakarta	66,65	59,71	41,22	45,16	53,57
Jawa Barat	58,76	54,47	36,22	39,58	51,11
Jawa Tengah	45,49	47,46	29,31	31,98	45,00
DI Yogyakarta	57,24	58,91	35,96	40,26	57,30
Jawa Timur	55,82	57,20	36,09	40,98	52,78
Banten	54,11	51,57	34,27	41,24	51,30
Bali	64,72	61,13	23,85	13,08	36,09
Nusa Tenggara Barat	43,85	42,23	27,94	33,36	34,37
Nusa Tenggara Timur	56,62	52,17	30,80	34,57	39,83
Kalimantan Barat	53,34	47,74	32,13	41,03	49,84
Kalimantan Tengah	59,59	56,71	38,77	43,55	51,99
Kalimantan Selatan	54,99	50,72	38,54	41,63	50,26
Kalimantan Timur	51,34	57,70	40,60	51,23	62,00
Kalimantan Utara	43,01	46,10	34,63	45,65	47,44
Sulawesi Utara	67,51	64,40	36,65	42,46	42,74
Sulawesi Tengah	47,26	50,13	36,94	40,36	49,88
Sulawesi Selatan	50,75	51,03	38,38	38,06	48,85
Sulawesi Tenggara	48,31	41,34	30,17	37,84	40,13
Gorontalo	46,90	49,74	32,25	48,84	43,50
Sulawesi Barat	46,67	49,91	31,50	25,94	29,34
Maluku	39,21	38,10	34,37	39,27	33,73
Maluku Utara	46,13	50,44	31,63	43,30	46,15
Papua Barat	54,20	51,16	38,24	46,28	48,12
Papua	53,28	50,34	31,01	45,38	37,40
Indonesia	58,75	54,81	33,79	36,26	47,80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan berhasil terkendalinya pandemi Covid-19, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau tingkat okupansi pada hotel bintang meningkat di tahun 2022. Tingginya tingkat okupansi mengindikasikan

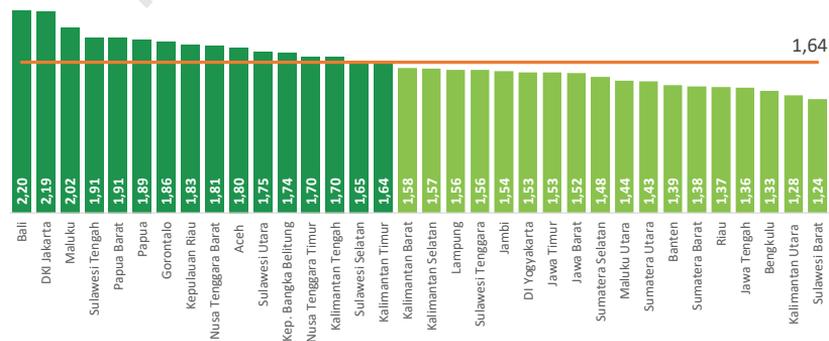
“Tingkat okupansi hotel bintang meningkat menjadi 47,80 persen secara nasional. Peningkatan tertinggi di Provinsi Bali dipengaruhi oleh diselenggarakannya KTT G20 Bali 2022”

semakin tingginya minat pengunjung untuk menginap di akomodasi hotel suatu wilayah. Pada tahun 2022, tingkat okupansi secara keseluruhan sebanyak 47,80 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dua tahun terakhir ketika masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, tingkat okupansi 2022 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang merupakan masa sebelum pandemi.

Peningkatan okupansi pada hotel bintang terjadi hampir di seluruh provinsi pada tahun 2022, kecuali Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Papua. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan peningkatan okupansi tertinggi dibanding provinsi lain, yaitu mencapai 23,01 persen poin dibanding tahun 2021. Peningkatan okupansi di Provinsi Bali didorong oleh adanya acara internasional Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada akhir tahun 2022 yang menyebabkan meningkatnya permintaan pada akomodasi dan juga sektor lainnya.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan tingkat okupansi pada hotel bintang paling tinggi di tahun 2022. Tingkat okupansinya mencapai 62,00 persen. Angka tersebut meningkat 10,77 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut juga membuat okupansi pada hotel bintang di Provinsi Kalimantan Timur paling tinggi dalam lima tahun terakhir, termasuk dibandingkan tahun 2019 masa sebelum pandemi Covid-19 yang tingkat okupansinya sebesar 57,70 persen. Tingginya angka tersebut merupakan salah satu dampak adanya aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyebabkan okupansi hotel di sekitar pembangunan meningkat (*idntimes.com*, 2022).

Gambar 8.8 Rata-Rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara rata-rata, lama menginap tamu pada hotel bintang di Indonesia tahun 2022 selama 1,64 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya tamu di hotel bintang di Indonesia menginap selama satu sampai dua hari. Tamu asing menginap lebih lama yaitu 2,80 hari dibandingkan tamu Indonesia 1,58 hari. Rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Bali paling tinggi dibandingkan provinsi lain, yaitu 2,20 hari. Tingginya rata-rata lama

menginap tamu di Provinsi Bali disumbang oleh tamu asing yang secara rata-rata menginap selama 2,65 hari. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat selama 1,24 hari.

Secara umum, sektor pariwisata Indonesia tahun 2022 mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya ketika masih pandemi Covid-19. Selain kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang meningkat hingga hampir 3 kali dibanding tahun sebelumnya, peningkatan yang terjadi di transportasi udara dan akomodasi menjadi indikator perbaikan sektor pariwisata. Kondisi-kondisi tersebut tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa tahun 2022 menjadi momentum bangkitnya sektor pariwisata Indonesia.

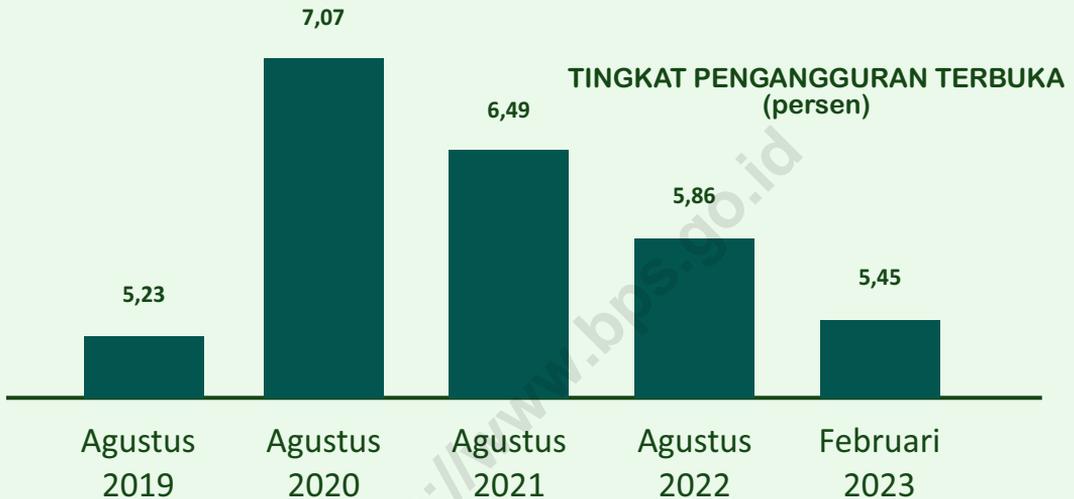
Kebangkitan pariwisata Indonesia tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional KTT G20 di Provinsi Bali pada Bulan November 2022. Acara tersebut berhasil menarik pengunjung mancanegara baik yang berkepentingan dalam acara maupun tidak, untuk kembali mengunjungi Bali. Setelah terpuruk di masa pandemi Covid-19, transportasi udara menuju Bali, akomodasi perhotelan, dan sekaligus pariwisata Bali mengalami perbaikan. Banyak pihak juga menilai, acara tersebut membuat Bali lebih disorot oleh media internasional dan diharapkan mampu menarik minat lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Secara umum, acara KTT G20 yang digelar di Bali dinilai memberikan dampak positif, baik bagi pariwisata di Bali, pelaku usaha kreatif, maupun bagi perekonomian nasional.

Memasuki tahun 2023 dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, pariwisata Indonesia diharapkan menguat dan dapat pulih seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19. Momentum kebangkitan di tahun 2022 perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kemenparekraf juga terus mengembangkan destinasi wisata dengan berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan berkualitas. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan potensi desa wisata di Indonesia. Belajar dari keberhasilan di tahun 2022, pemerintah terus mempromosikan Indonesia untuk menjadi destinasi *Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE) untuk acara berskala internasional. Salah satu acara besar yang akan diselenggarakan adalah KTT ke-42 ASEAN 2023 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETENAGAKERJAAN

9

PENGANGGURAN



LAPANGAN USAHA UTAMA PENYERAP TENAGA KERJA PADA AGUSTUS 2022 (persen)

Pertanian



Perdagangan & Reparasi



Industri Pengolahan



Akomodasi & Makan Minum



Konstruksi



“ Sektor Pertanian masih menjadi **kontributor utama** dalam menyerap tenaga kerja ,”





“Meskipun beberapa indikator ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang sangat baik, dampak pandemi belum sepenuhnya hilang”



<https://www.kemendagri.go.id>

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Membaik Pasca Pandemi

Sejak tahun 2019, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan nasional. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai katalisator dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi dunia, pembangunan sumber daya manusia menjadi isu penting dalam pembangunan nasional untuk dapat memenangkan persaingan global. Terserapnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam dunia kerja juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah melakukan berbagai strategi nasional yang responsif dan adaptif guna menjaga kondisi perekonomian Indonesia melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program dan kebijakan yang tepat sasaran, Indonesia berhasil keluar dari resesi dan setelahnya kondisi perekonomian Indonesia semakin kuat dan solid. Hal ini dibuktikan melalui berbagai indikator makro seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, serta tingkat inflasi yang terjaga.

Pada Agustus tahun 2022, tercatat sebanyak 135,3 juta tenaga kerja mampu diserap oleh dunia kerja. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini jauh lebih baik karena terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,25 juta jiwa, dimana pada kondisi yang sama peningkatan penduduk usia 15 tahun keatas hanya sebesar 2,71 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang cukup impresif selama periode pasca pandemi Covid-19. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, peningkatan penduduk yang bekerja ini terjadi pada penduduk laki-laki sebesar 4,15 persen.

Indikator lain yang menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pada Agustus 2022, jumlah penduduk menganggur di Indonesia sebanyak 8,42 juta orang. Angka ini turun sebesar 0,68 juta orang juga dibandingkan pada periode tahun sebelumnya. Penurunan jumlah pengangguran tertinggi terdapat pada penduduk laki-laki, yaitu turun sebesar 9,12 persen. Hal ini sejalan dengan menguatnya perekonomian pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen.

Meskipun beberapa indikator ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang sangat baik, dampak pandemi belum sepenuhnya hilang. Masih terdapat penduduk usia kerja yang terdampak pandemi. Berdasarkan hasil sakernas, masih terdapat sekitar 3,48 juta orang yang berkurang jam kerjanya jika dibandingkan sebelum pandemi (BRS, 7 Nov 2022). Selain itu, masalah lain adalah adanya kesenjangan antar jenis kelamin pada penduduk usia kerja. Pada Agustus 2022, tercatat sebesar 61,06 persen angkatan kerja adalah penduduk laki-laki, selain itu penduduk laki-laki yang bekerja lebih mendominasi dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 61,02 persen. Untuk itu, pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan perlu mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk dapat mengambil peran

dalam dunia kerja. Peran aktif perempuan dalam dunia kerja diharapkan dapat menurunkan kesenjangan gender serta dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 9.1 Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019 (Agustus)	L	79 357 851	4 385 795	83 743 646	16 846 705
	P	49 397 420	2 718 629	52 116 049	48 478 614
	L+P	128 755 271	7 104 424	135 859 695	65 325 319
2020 (Agustus)	L	77 755 026	6 268 364	84 023 390	17 933 872
	P	50 699 158	3 499 390	54 198 548	47 816 650
	L+P	128 454 184	9 767 754	138 221 938	65 750 522
2021 (Agustus)	L	79 263 314	5 731 458	84 994 772	18 313 469
	P	51 787 209	3 370 594	55 157 803	48 242 255
	L+P	131 050 523	9 102 052	140 152 575	66 555 724
2022 (Agustus)	L	82 553 960	5 208 623	87 762 583	16 873 668
	P	52 742 753	3 217 308	55 960 061	48 824 071
	L+P	135 296 713	8 425 931	143 722 644	65 697 739
2023 (Februari)	L	84 217 527	5 212 101	89 429 628	17 060 582
	P	54 414 984	2 777 174	57 192 158	47 906 504
	L+P	138 632 511	7 989 275	146 621 786	64 967 086

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Kondisi ketenagakerjaan nasional juga dapat dilihat dari beberapa indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara umum, ketiga indikator ini menunjukkan kondisi perbaikan yang impresif pasca pandemi Covid-19.

Pada Agustus tahun 2022, TPAK nasional tercatat sebesar 68,63 persen. Angka ini lebih tinggi 0,83 poin dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan pada indikator ini mengindikasikan adanya peningkatan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang terjadi pada penduduk usia kerja. Hal ini berdampak positif terhadap perekonomian, karena tenaga kerja sebagai faktor utama dalam kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil produksi yang berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi bagi suatu usaha. Pada Februari tahun 2023, TPAK tercatat kembali naik menjadi 69,30 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki dan perempuan memiliki arah yang berbeda. TPAK laki-laki sempat mengalami tren penurunan hingga Agustus 2021, namun kemudian naik kembali pada periode agustus

2022 menjadi 83,87 persen. Sedangkan TPAK perempuan justru memiliki tren peningkatan setiap tahunnya. Pada agustus 2022, TPAK perempuan tercatat sebesar 53,41 persen.

Tabel 9.2 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023

Jenis Kelamin	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Agustus)	2022 (Agustus)	2023 (Februari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK					
Laki-laki	83,25	82,41	82,27	83,87	83,98
Perempuan	51,81	53,13	53,34	53,41	54,42
Total	67,53	67,77	67,80	68,63	69,30
TPT					
Laki-laki	5,24	7,46	6,74	5,93	5,83
Perempuan	5,22	6,46	6,11	5,75	4,86
Total	5,23	7,07	6,49	5,86	5,45
TKK					
Laki-laki	94,76	92,54	93,26	94,07	94,17
Perempuan	94,78	93,54	93,89	94,25	95,14
Total	94,77	92,93	93,51	94,14	94,55

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Indikator berikutnya adalah TPT. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk pengangguran terhadap jumlah angkatan kerjanya. Indikator ini juga menunjukkan kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Pada agustus 2022, TPT nasional tercatat sebesar 5,86 persen. Penurunan angka ini sejalan dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pasca pandemi Covid-19. Meskipun TPT terus mengalami penurunan, kondisi ini nyatanya masih belum lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Angka TPT pada periode Agustus 2022 tercatat 0,63 poin lebih tinggi dibandingkan kondisi pada Agustus 2019.

Kondisi yang sama terjadi antara TPT laki-laki dan TPT perempuan. TPT pada keduanya sempat mengalami kenaikan yang cukup besar pada Agustus 2020, namun terus mengalami penurunan hingga Agustus 2022. Namun demikian, pada periode Agustus 2022, penurunan TPT yang cukup besar terjadi pada penduduk laki-laki. Pada periode ini, TPT laki-laki tercatat sebesar 5,93 persen atau turun sebesar 0,81 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan TPT perempuan tercatat sebesar 5,75 persen pada Agustus 2022 dan hanya turun sebesar 0,36 pon dibandingkan periode Agustus 2021. Kedua TPT ini belum menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kondisi pada periode sebelum pandemi Covid-19.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Indikator ini menggambarkan peluang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Pada agustus 2022, TKK nasional tercatat sebesar 94,14 persen, artinya dalam 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat 94 hingga 95 orang penduduk yang bekerja. Jika dilihat perkembangan setiap tahunnya, indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun sempat mengalami penurunan pada awal pandemi Covid-19, TKK nasional tercatat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang terus diupayakan. Namun demikian, kondisi TKK pada agustus 2022 ternyata masih belum lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kondisi TKK laki-laki dan TKK perempuan tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Kedua indikator ini terus menunjukkan perbaikan setiap tahunnya namun masih belum lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Pada agustus 2022, TKK laki-laki tercatat sebesar 94,07 persen dan masih lebih rendah 0,69 poin dibandingkan kondisi Agustus 2019. Begitu juga dengan TKK perempuan, pada Agustus 2022 tercatat sebesar 94,25 persen dan masih lebih rendah 0,53 poin dibandingkan kondisi pada Agustus 2019.

Tabel 9.3 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019-2023

Daerah Tempat Tinggal	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Agustus)	2022 (Agustus)	2023 (Februari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK					
Perkotaan	66,06	65,91	66,15	66,65	66,97
Perdesaan	69,42	70,20	70,03	71,38	72,38
Total	67,53	67,77	67,80	68,63	69,30
TPT					
Perkotaan	6,29	8,98	8,32	7,74	7,11
Perdesaan	3,92	4,71	4,17	3,43	3,42
Total	5,23	7,07	6,49	5,86	5,45
TKK					
Perkotaan	93,71	91,02	91,68	92,26	92,89
Perdesaan	96,08	95,29	95,83	96,57	96,58
Total	94,77	92,93	93,51	94,14	94,55

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Ketiga indikator ketenagakerjaan ini juga dapat dilakukan analisis menurut daerah tempat tinggal, yaitu perkotaan dan perdesaan. TPAK di

perdesaan justru memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perkotaan. Pada agustus 2022, kenaikan TPAK tertinggi terjadi pada wilayah perdesaan. TPAK perdesaan tercatat sebesar 71,38 persen atau meningkat sebesar 1,35 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi, peningkatan TPAK perdesaan juga lebih baik dibandingkan perkotaan. TPAK perdesaan pada Agustus 2022 tercatat lebih tinggi 1,96 poin dibandingkan kondisi pada Agustus 2019, sedangkan TPAK perkotaan pada periode yang sama hanya meningkat 0,59 poin.

Pada indikator TPT, kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan cukup jauh berbeda. TPT di perkotaan hampir mencapai 2 kali lipat dari TPT di wilayah perdesaan. Pada Agustus 2022, TPT perkotaan tercatat sebesar 7,74 persen sedangkan TPT perdesaan sebesar 3,43 persen. Fenomena ini terjadi jika tingkat urbanisasi lebih besar dibandingkan lapangan pekerjaan baru yang tersedia sehingga menyebabkan surplus tenaga kerja di perkotaan. Surplus tenaga kerja ini menyebabkan tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Todaro dan Smith, 2012).

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Hal ini berarti, penduduk angkatan kerja di perdesaan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan penduduk angkatan kerja di perkotaan. Pada agustus 2022, TKK perdesaan mencapai 96,57 persen sedangkan TKK di wilayah perkotaan tercatat sebesar 92,26 persen. Jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi, TKK di wilayah perdesaan juga sudah lebih baik yaitu 0,49 poin lebih tinggi dibanding kondisi pada Agustus 2019. Sedangkan TKK perkotaan masih lebih rendah dibanding kondisi sebelum pandemi, yaitu lebih rendah 1,45 poin dibanding Agustus 2019.

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi

Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik masyarakat dan kondisi geografis yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan aktivitas ekonomi dan kebiasaan hidup masyarakat yang berada di wilayah tertentu menjadi berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan kondisi geografis ini tentunya memiliki karakteristik ketenagakerjaan yang berbeda antar wilayah. Sebagai contohnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung bekerja pada perusahaan berbasis industri manufaktur, jasa keuangan, maupun perdagangan, sedangkan masyarakat perdesaan bergantung pada aktivitas pertanian.

Pada Agustus 2022 terdapat 18 Provinsi dengan TPAK diatas rata-rata nasional. TPAK tertinggi terdapat pada provinsi Papua, yaitu sebesar 77,75 persen. Sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara dengan TPAK sebesar 63,08 persen. Kondisi TPAK saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Perbaikan kondisi TPAK saat ini sejalan dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Namun

demikian, masih terdapat 11 provinsi dengan TPAK yang masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

Hal yang sama juga terjadi pada indikator TKK. Pada Agustus 2022, TKK provinsi di seluruh Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan nilai rata-rata TKK nasional sebesar 94,14 persen, terdapat 25 provinsi dengan TKK di atas angka nasional. TKK tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 97,66 persen, sedangkan yang terendah terdapat di provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 91,69 persen. Meskipun seluruh provinsi telah menunjukkan pemulihan yang sangat baik, beberapa provinsi di Indonesia

Tabel 9.4 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2019-2023

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	63,13	65,10	63,78	63,50	65,12	93,83	93,41	93,70	93,83	94,25	6,17	6,59	6,30	6,17	5,75
Sumatera Utara	70,37	68,67	69,10	69,53	70,60	94,61	93,09	93,67	93,84	94,76	5,39	6,91	6,33	6,16	5,24
Sumatera Barat	67,88	69,01	67,72	69,30	69,96	94,62	93,12	93,48	93,72	94,10	5,38	6,88	6,52	6,28	5,90
Riau	64,94	65,24	65,03	63,86	65,18	94,24	93,68	95,58	95,63	95,75	5,76	6,32	4,42	4,37	4,25
Jambi	65,79	67,79	67,17	67,84	67,88	95,94	94,87	94,91	95,41	95,50	4,06	5,13	5,09	4,59	4,50
Sumatera Selatan	67,67	68,65	68,77	69,31	69,73	95,47	94,49	95,02	95,37	95,47	4,53	5,51	4,98	4,63	4,53
Bengkulu	70,09	71,73	69,75	69,81	72,72	96,74	95,93	96,35	96,41	96,79	3,26	4,07	3,65	3,59	3,21
Lampung	69,06	70,16	69,35	70,06	72,07	95,97	95,33	95,31	95,48	95,82	4,03	4,67	4,69	4,52	4,18
Kep. Bangka Belitung	67,10	66,89	65,88	67,38	70,33	96,42	94,75	94,97	95,23	96,11	3,58	5,25	5,03	4,77	3,89
Kepulauan Riau	64,69	66,28	68,27	68,94	67,29	92,50	89,66	90,09	91,77	92,39	7,50	10,34	9,91	8,23	7,61
DKI Jakarta	63,90	63,81	62,63	63,08	63,07	93,46	89,05	91,50	92,82	92,43	6,54	10,95	8,50	7,18	7,57
Jawa Barat	64,99	64,53	64,95	66,15	66,75	91,96	89,54	90,18	91,69	92,11	8,04	10,46	9,82	8,31	7,89
Jawa Tengah	68,85	69,43	69,58	70,84	72,33	95,56	93,52	94,05	94,43	94,76	4,44	6,48	5,95	5,57	5,24
D.I. Yogyakarta	72,72	71,12	73,52	72,60	73,43	96,82	95,43	95,44	95,94	96,42	3,18	4,57	4,56	4,06	3,58
Jawa Timur	69,61	70,33	70,00	71,23	71,50	96,18	94,16	94,26	94,51	95,67	3,82	5,84	5,74	5,49	4,33
Banten	63,83	64,48	63,79	64,72	65,94	91,89	89,36	91,02	91,91	92,03	8,11	10,64	8,98	8,09	7,97
Bali	73,77	74,32	73,54	76,86	77,19	98,43	94,37	94,63	95,20	96,27	1,57	5,63	5,37	4,80	3,73
Nusa Tenggara Barat	69,47	70,45	70,57	70,93	71,16	96,72	95,78	96,99	97,11	96,27	3,28	4,22	3,01	2,89	3,73
Nusa Tenggara Timur	70,34	73,11	73,78	75,23	74,51	96,86	95,72	96,23	96,46	96,90	3,14	4,28	3,77	3,54	3,10
Kalimantan Barat	68,51	68,83	68,45	68,97	68,45	95,65	94,19	94,18	94,89	95,48	4,35	5,81	5,82	5,11	4,52
Kalimantan Tengah	69,29	68,40	68,67	67,23	68,76	95,96	95,42	95,47	95,74	96,16	4,04	4,58	4,53	4,26	3,84
Kalimantan Selatan	68,77	69,33	69,26	67,55	69,53	95,82	95,26	95,05	95,26	96,05	4,18	4,74	4,95	4,74	3,95

Kalimantan Timur	65,96	65,50	65,49	64,73	65,66	94,06	93,13	93,17	94,29	93,63	5,94	6,87	6,83	5,71	6,37
Kalimantan Utara	65,59	66,51	66,24	67,62	67,03	95,51	95,03	95,42	95,67	95,90	4,49	4,97	4,58	4,33	4,10
Sulawesi Utara	63,94	63,42	62,15	63,08	63,31	93,99	92,63	92,94	93,39	93,81	6,01	7,37	7,06	6,61	6,19
Sulawesi Tengah	67,80	69,44	68,73	69,99	70,19	96,89	96,23	96,25	97,00	96,51	3,11	3,77	3,75	3,00	3,49
Sulawesi Selatan	63,80	63,40	64,73	66,18	64,37	95,38	93,69	94,28	95,49	94,74	4,62	6,31	5,72	4,51	5,26
Sulawesi Tenggara	69,11	69,83	70,09	68,82	67,55	96,48	95,42	96,08	96,64	96,34	3,52	4,58	3,92	3,36	3,66
Gorontalo	67,38	66,46	65,94	68,91	70,59	96,24	95,72	96,99	97,42	96,93	3,76	4,28	3,01	2,58	3,07
Sulawesi Barat	69,89	70,19	70,27	73,00	67,62	97,02	96,68	96,87	97,66	96,96	2,98	3,32	3,13	2,34	3,04
Maluku	63,97	65,07	65,75	65,46	63,82	93,31	92,43	93,07	93,12	93,92	6,69	7,57	6,93	6,88	6,08
Maluku Utara	65,05	64,28	64,70	64,88	66,52	95,19	94,85	95,29	96,02	95,40	4,81	5,15	4,71	3,98	4,60
Papua Barat	67,71	69,55	70,34	68,55	69,36	93,57	93,20	94,16	94,63	94,47	6,43	6,80	5,84	5,37	5,53
Papua	76,93	72,16	78,29	77,75	76,79	96,49	95,72	96,67	97,17	96,51	3,51	4,28	3,33	2,83	3,49
Indonesia	67,53	67,77	67,80	68,63	69,30	94,77	92,93	93,51	94,14	94,55	5,23	7,07	6,49	5,86	5,45

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

tercatat belum pulih secara maksimal. Pada Agustus 2022, masih terdapat 20 provinsi dengan nilai TKK lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan solid juga berdampak pada TPT di seluruh provinsi di Indonesia. Pada Agustus 2022, TPT di seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan terdalam terjadi di provinsi Kepulauan Riau, TPT di provinsi ini tercatat sebesar 9,91 persen pada Agustus 2021, dan turun menjadi 8,23 persen pada Agustus 2022. Pada periode Agustus 2022, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi, yaitu sebesar 8,31 persen. Sedangkan TPT terendah terdapat di provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 2,34 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, per Agustus 2022 masih terdapat 21 provinsi yang belum pulih secara maksimal.

Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang perekonomiannya paling terdampak pandemi, pada tabel 9.4 dapat dilihat bahwa pada kondisi sebelum pandemi (Agustus 2019) TPT di provinsi Bali tercatat sebesar 1,57 persen, sedangkan pada Agustus 2022 nilainya menjadi 4,80 persen. Meskipun sudah berangsur membaik, pemulihan ekonomi di Provinsi ini masih belum maksimal. Pandemi Covid-19 yang melanda provinsi ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan pariwisata seperti akomodasi perhotelan, transportasi, dan perdagangan. Melihat kondisi perekonomian global yang tidak menentu dan berdampak pada aktivitas pariwisata di Provinsi Bali Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra dengan merumuskan kebijakan yang adaptif dan tepat pada aktivitas ekonomi atau

usaha yang paling terdampak agar kondisi pengangguran di provinsi ini dapat terus membaik.

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan nasional. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang memadai dan kompetitif agar dapat bersaing pada dunia usaha. Kualitas tenaga kerja yang kompeten tersebut perlu dibangun melalui pendidikan yang baik. Pekerja dengan tingkat kualitas pendidikan yang tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih yang dapat digunakan dalam dunia usaha. Untuk itu, kualitas pendidikan menjadi faktor penting bagi tenaga kerja untuk dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Hingga saat ini, kualitas pendidikan dari tenaga kerja di Indonesia cenderung masih rendah. Pada beberapa tahun terakhir, tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia masih di dominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah. Pada Agustus 2022, tercatat terdapat 38,80 persen tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan diploma ke atas hanya sebesar 12,32 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini menyebabkan sulitnya tenaga kerja untuk bersaing di dunia global.

Selain rendahnya tingkat pendidikan, salah satu permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat pendidikan dengan dunia kerja. Tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tertentu semestinya bekerja pada dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya, dengan begitu diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 9.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2019-2023

Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD ke bawah	39,83	38,89	37,69	38,80	39,76
SMP	17,85	18,27	17,76	17,54	18,24
SMA	29,95	30,51	31,73	31,34	30,49
Diploma I/II/III	2,69	2,70	2,64	2,45	2,20
Universitas	9,69	9,63	10,18	9,87	9,31

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya yang cermat dan terukur perlu dilakukan agar rencana mulia peningkatan kualitas SDM melalui program pembangunan nasional dapat tercapai. Pelaksanaan

pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga ahli dalam mengajar perlu terus dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas SDM yang baik.

Tenaga Kerja Sektor Pertanian Masih Mendominasi

Sebagai negara agraris, sistem perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor pertanian. Merujuk pada nilai Produk Domestik Bruto, pada tahun 2022 sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia yaitu sebesar 12,40 persen dari total PDB Nasional dan menjadi sektor terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor pertanian hingga saat ini juga masuk dalam kategori leading sector dan termasuk salah satu dalam sektor usaha yang tidak mengalami kontraksi selama masa pandemi Covid-19.

Pada tabel 9.6, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada Agustus 2022, sektor ini mampu menyerap 28,61 persen tenaga kerja di Indonesia. Pada awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), terdapat terdapat kenaikan yang cukup besar pada tenaga kerja di sektor pertanian. Kenaikan pada sektor ini mencapai 2,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya shifting tenaga kerja ke sektor pertanian pada masa awal pandemi Covid-19.

Sektor perdagangan juga menjadi sektor terbesar kedua dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada Agustus 2022, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 19,36 persen dan turun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, kontribusi sektor ini dalam menyerap tenaga kerja cenderung lebih besar. Besarnya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini disebabkan karena sektor ini cukup mudah dalam menyerap tenaga kerja serta berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti toko kelontong, minimarket, supermarket dan swalayan.

Sektor berikutnya yang cukup dominan dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan. Pada Agustus 2022, sektor industri pengolahan mampu menyerap 14,17 persen tenaga kerja. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,27 persen. Sepanjang tahun 2022, sektor Industri Kecil Menengah (IKM) tercatat berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang. Kontribusi sektor ini juga tercatat sebesar 21,37 persen dari total output industri pengolahan (Kementerian Perindustrian, 2023). Sebagai salah satu sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk dapat terus meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Pada dasarnya, kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nilai tambah dari produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Keuntungan ini didistribusikan kepada seluruh tenaga kerja dalam

bentuk upah. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Singkatnya, upah adalah kompensasi atau balas jasa yang diterima oleh pekerja baik berupa uang maupun barang.

Tabel 9.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2019-2023

Lapangan Pekerjaan Utama	2019	2020	2021	2022	2023
	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,53	29,76	28,33	28,61	29,35
B.Pertambangan dan Penggalian	1,11	1,05	1,10	1,13	1,22
C.Industri Pengolahan	14,91	13,61	14,27	14,17	13,58
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,24	0,22	0,23	0,26
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,39	0,38	0,43	0,38	0,41
F.Konstruksi	6,74	6,28	6,33	6,27	6,21
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,77	19,23	19,64	19,36	18,93
H.Transportasi dan Pergudangan	4,39	4,35	4,15	4,29	4,21
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,65	6,65	7,01	7,10	7,32
J.Informasi dan Komunikasi	0,72	0,73	0,76	0,75	0,86
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	1,38	1,21	1,22	1,20	1,15
L.Real Estate	0,31	0,31	0,27	0,33	0,34
M,N.Jasa Perusahaan	1,51	1,40	1,54	1,65	1,48
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,56	3,70	3,60	3,40
P.Jasa Pendidikan	4,98	4,69	4,95	4,81	4,86
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,56	1,68	1,65	1,79
R,S,T,U.Jasa lainnya	4,94	4,99	4,41	4,46	4,62

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Upah Minimum

Pemberian upah terhadap tenaga kerja perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan dan dapat mendorong produktivitas dalam kegiatan usaha. Penetapan upah minimum juga bertujuan untuk memberikan pelindung bagi tenaga kerja agar perusahaan tidak memberikan upah lebih rendah dari yang telah ditetapkan. Upah minimum dirumuskan dengan mempertimbangkan

aspek biaya kebutuhan dasar minimum di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan sebesar Rp 2,92 juta. Angka ini meningkat 7,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya pertumbuhan UMP ini mengindikasikan adanya penguatan ekonomi yang impresif dimana kegiatan usaha berangsur membaik setelah pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di awal tahun 2020.

Tabel 9.7 Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen), 2014-2023

Tahun	Rata-rata UMP	Pertumbuhan Rata-rata UMP (%)
(1)	(2)	(3)
2014	1584,39	22,17
2015	1790,34	13,00
2016r	1967,57	9,90
2017r	2074,15	5,42
2018	2268,87	9,39
2019	2455,66	8,23
2020	2672,37	8,82
2021	2687,72	0,57
2022	2725,50	1,41
2023	2923,31	7,26

Catatan : r Angka revisi
 Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan RI (diolah)
<https://satudata.kemnaker.go.id/data>

Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata UMP tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan kenaikan mencapai 22,17 persen. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021 dengan kenaikan hanya mencapai 0,57 persen. Rendahnya pertumbuhan rata-rata UMP pada tahun 2021 disebabkan karena situasi ekonomi yang memburuk yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Pada saat itu, Pemerintah menerbitkan surat edaran untuk mengatur penetapan upah minimum pada masa pandemi Covid-19. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk dapat melindungi pekerja maupun perusahaan agar dapat bertahan pada situasi sulit di masa pandemi.

Meskipun memiliki batas minimum upah yang telah ditetapkan oleh masing-masing wilayah, namun ternyata masih ada pekerja yang memiliki upah dibawah rata-rata UMP. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti jenis pekerjaan maupun jumlah jam kerja. Seperti contohnya, pekerja paruh waktu tentu memiliki jumlah bayaran yang berbeda dengan pekerja penuh waktu. Selain itu, pekerjaan dengan tingkat keahlian tertentu tentunya memiliki upah yang berbeda dengan pekerjaan lainnya.

Berdasarkan tabel 9.8 dapat dilihat bahwa pekerja di daerah perkotaan cenderung memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja di perdesaan. Pada Agustus 2022 terdapat 66,47 persen pekerja yang menerima upah lebih dari Rp 2 juta, sedangkan di wilayah perdesaan hanya sebesar 45,01 persen. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak pusat perekonomian dibandingkan wilayah perdesaan.

Tabel 9.8 Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2019-2023

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata-rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	> 2 000 000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2019 (Agt)					
Perkotaan	13,52	10,75	13,75	61,99	3 006 230
Perdesaan	27,10	15,59	16,53	40,78	1 962 576
Total	18,35	12,48	14,74	54,43	2 634 525
Tahun 2020 (Agt)					
Perkotaan	16,52	11,74	13,73	58,01	2 797 912
Perdesaan	30,78	15,21	15,95	38,06	1 841 889
Total	21,66	13,00	14,53	50,80	2 452 818
Tahun 2021 (Agt)					
Perkotaan	16,12	11,98	13,72	58,19	2 763 749
Perdesaan	29,32	15,44	15,83	39,40	1 860 717
Total	20,80	13,21	14,46	51,53	2 443 727
Tahun 2022 (Agt)					
Perkotaan	11,82	9,47	12,24	66,47	3 174 642
Perdesaan	24,20	14,94	15,85	45,01	1 978 012
Total	15,96	11,30	13,45	59,29	2 774 057
Tahun 2023 (Feb)					
Perkotaan	12,96	10,33	12,60	64,11	3 040 475
Perdesaan	23,97	14,94	15,85	45,24	1 985 275
Total	16,84	11,96	13,74	57,46	2 668 887

Catatan: Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian

Sumber: Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS (diolah)

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Agustus 2022 rata-rata upah yang diterima oleh pekerja jauh lebih besar. Rata-rata upah yang diterima pekerja naik sebesar 14,87 persen menjadi Rp 2,77 juta. Jumlah ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun ini dampaknya juga turut dirasakan oleh masyarakat. Perlahan namun pasti, rata-rata upah yang diterima oleh pekerja meningkat sejalan dengan penguatan ekonomi nasional

yang tentunya akan berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja dengan jenis kelamin laki-laki cenderung menerima upah lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Dalam 5 tahun terakhir, persentase pekerja laki-laki yang menerima upah lebih dari Rp 2 juta berkisar antara 56 hingga 65 persen. Sedangkan pekerja perempuan hanya berkisar antara 40 hingga 45 persen. Adanya disparitas antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan turut berdampak pada upah yang diterima oleh pekerja. Pekerja laki-laki dianggap memiliki peran yang lebih besar dalam menafkahi keluarga dibandingkan perempuan. Selain itu, pekerja laki-laki masih lebih banyak memegang jabatan strategis dalam suatu institusi. Permasalahan ini merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang penting untuk diurai agar pekerja perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih besar sehingga dapat lebih berperan dalam perekonomian nasional.

Tabel 9.9 Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2019-2023

Jenis Kelamin	Upah (Rp)				Rata-rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	> 2 000 000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2019 (Agt)					
Laki-laki	12,17	11,91	15,77	60,15	2.835.977
Perempuan	30,86	13,62	12,66	42,87	2.227.119
Total	18,35	12,48	14,74	54,43	2.634.525
Tahun 2020 (Agt)					
Laki-laki	15,62	12,73	15,65	56,00	2.620.832
Perempuan	33,93	13,54	12,26	40,26	2.111.992
Total	21,66	13,00	14,53	50,80	2.452.818
Tahun 2021 (Agt)					
Laki-laki	14,84	12,94	15,66	56,56	2.599.801
Perempuan	32,75	13,74	12,07	41,44	2.130.899
Total	20,80	13,21	14,46	51,53	2.443.727
Tahun 2022 (Agt)					
Laki-laki	9,89	10,14	14,07	65,89	2.979.139
Perempuan	28,50	13,69	12,16	45,65	2.350.551
Total	15,96	11,30	13,45	59,29	2.774.057
Tahun 2023 (Feb)					
Laki-laki	10,33	10,37	14,59	64,71	2.898.810
Perempuan	29,97	15,15	12,03	42,85	2.205.117
Total	16,84	11,96	13,74	57,46	2.668.887

Catatan: Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian

Sumber: Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS (diolah)

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada Agustus 2022 juga terjadi shifting pada pekerja dengan upah rendah ke upah tinggi. Pada tabel 9.9, pekerja dengan upah dibawah Rp 1 juta mencapai 15,96 persen di Tahun 2022. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan periode Agustus 2021. Kemudian, persentase pekerja dengan upah diatas Rp 2 juta juga meningkat pada Agustus 2022. Shifting ini mengindikasikan iklim usaha di Tahun 2022 jauh lebih baik dan menunjukkan pemulihan ekonomi yang sangat baik pasca pandemi Covid-19.

Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam mencapai pembangunan nasional yang kuat dan progresif, negara memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu tolak ukur kualitas SDM adalah tingkat produktivitas tenaga kerja. Produktivitas secara umum merupakan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output berupa barang dan jasa yang memiliki nilai jual secara ekonomi. Tenaga kerja yang produktif tentunya akan menghasilkan output yang lebih besar, hal ini tentunya akan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri.

Hingga saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia terbilang cukup rendah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO) pada tahun 2020, produktivitas Indonesia berada di posisi tujuh di bawah Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pekerja di Indonesia dan keterbatasan skill yang dimiliki, sehingga akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing (Rinaldi, 2023).

Berdasarkan tabel 9.10, pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah mulai memiliki dampak yang positif. Produktivitas nasional perlahan meningkat seiring dengan penguatan ekonomi nasional. Pada tahun 2022 nilai produktivitas nasional mencapai Rp 141,52 juta per tenaga kerja, angka ini cukup tinggi dengan pertumbuhan mencapai 9,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9.10 Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2020-2022

Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	70,50	78,34	88,41
Sumatera Utara	118,56	122,22	132,71
Sumatera Barat	93,70	98,05	106,16
Riau	240,69	266,44	312,91
Jambi	117,93	132,85	153,70
Sumatera Selatan	111,11	118,11	137,91

Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Bengkulu	71,04	77,91	86,86
Lampung	82,48	86,64	94,38
Kep. Bangka Belitung	107,90	122,55	130,35
Kepulauan Riau	249,95	253,47	267,17
DKI Jakarta	593,93	614,80	653,62
Jawa Barat	96,06	98,80	103,31
Jawa Tengah	76,82	79,61	84,88
DI Yogyakarta	64,96	67,04	73,93
Jawa Timur	109,71	116,68	126,35
Banten	112,73	116,86	125,79
Bali	92,52	90,29	94,06
Nusa Tenggara Barat	51,87	52,73	57,74
Nusa Tenggara Timur	39,06	39,48	40,72
Kalimantan Barat	87,03	93,18	100,02
Kalimantan Tengah	115,46	126,00	148,72
Kalimantan Selatan	86,00	93,81	120,09
Kalimantan Timur	359,02	404,91	527,40
Kalimantan Utara	303,91	327,28	391,88
Sulawesi Utara	116,52	126,57	135,37
Sulawesi Tengah	130,21	162,21	204,00
Sulawesi Selatan	125,80	131,04	139,00
Sulawesi Tenggara	100,92	105,09	118,84
Gorontalo	73,40	75,81	77,45
Sulawesi Barat	69,04	73,65	73,88
Maluku	59,64	60,75	66,38
Maluku Utara	76,56	92,28	121,21
Papua Barat	181,97	175,90	187,19
Papua	117,74	124,74	135,68
Indonesia	122,72	129,34	141,52

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional dan PDB, BPS (diolah)

Pada tahun 2022, seluruh provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada provinsi Maluku Utara dengan pertumbuhan mencapai 31,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. kemudian disusul oleh provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan pertumbuhan mencapai 30,25 persen dan 28,02 persen. Sedangkan yang terendah terdapat pada provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,15 persen, 2,16 persen, dan 0,31 persen.

Tabel 9.11 Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2020-2022

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55,34	60,72	62,76
B. Pertambangan dan Penggalian	734,74	1055,58	1564,15
C. Industri Pengolahan	175,49	174,75	187,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	592,13	667,96	657,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,03	21,37	24,53
F. Konstruksi	204,88	213,62	225,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	80,72	85,48	96,08
H. Transportasi dan Pergudangan	123,31	132,19	169,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,12	44,91	49,13
J. Informasi dan Komunikasi	745,72	750,15	805,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	446,79	460,75	497,62
L. Real Estate	1152,71	1315,40	1085,12
M,N. Jasa Perusahaan	163,77	149,27	152,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	128,22	121,00	124,10
P. Jasa Pendidikan	91,44	85,90	87,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,46	103,41	105,71
R,S,T,U. Jasa lainnya	47,21	54,07	58,70

Sumber :Survei Angkatan Kerja Nasional dan PDB, BPS (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, produktivitas tertinggi terdapat di lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai produktivitas mencapai Rp 1.564,15 juta per tenaga kerja di Tahun 2022. Setelah itu disusul oleh real estate dengan nilai produktivitas sebesar Rp 1.085,12 juta per tenaga kerja serta lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar Rp 805,48 juta per tenaga kerja. Produktivitas terendah terdapat pada kategori lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan nilai hanya sebesar Rp 24,53 juta per tenaga kerja.

Pada tahun 2022, hampir seluruh lapangan usaha mengalami kenaikan produktivitas, kenaikan tertinggi terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan kenaikan mencapai 48,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat ternyata turut berdampak pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kenaikan mencapai 28,16 persen.

Meskipun pada tahun 2022 perekonomian nasional sudah mulai menunjukkan pemulihan yang sangat baik, namun ternyata masih terdapat 2 lapangan usaha yang nilai produktivitasnya justru berkontraksi, yaitu lapangan

usaha real estate dan pengadaan listrik dan gas. Kedua lapangan usaha ini berkontraksi sebesar 1,51 persen dan 17,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor Informal Masih Mendominasi Struktur Tenaga Kerja

Tabel 9.12 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2019-2023

Jenis Kelamin	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Tahun 2019 (Agt)		
Laki-laki	37 445 385	41 912 466
Perempuan	19 358 922	30 038 498
Total	56 804 307	71 950 964
Tahun 2020 (Agt)		
Laki-laki	33 206 582	44 548 444
Perempuan	17 565 267	33 133 891
Total	50 771 849	77 682 335
Tahun 2021 (Agt)		
Laki-laki	34 395 107	44 868 207
Perempuan	18 746 971	33 040 238
Total	53 142 078	77 908 445
Tahun 2022 (Agt)		
Laki-laki	36 297 376	46 256 584
Perempuan	18 759 206	33 983 547
Total	55 056 582	80 240 131
Tahun 2023 (Feb)		
Laki-laki	36 433 769	47 783 758
Perempuan	18 855 143	35 559 841
Total	55 288 912	83 343 599

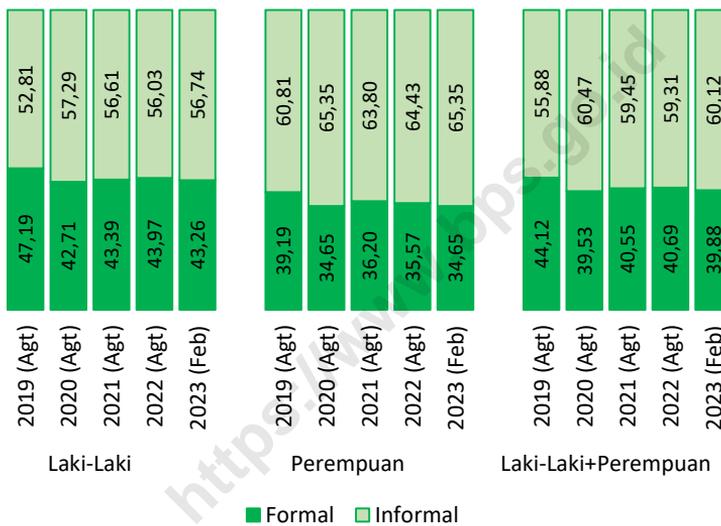
Catatan: Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS (diolah)

Berdasarkan jenisnya, tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja formal dan informal. Tenaga kerja informal adalah tenaga kerja yang tidak berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perseorangan atau hanya berdasarkan kesepakatan. Saat ini, tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja informal. Tingginya tenaga kerja informal disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang memaksa pekerja untuk bekerja secara informal. Peningkatan kapasitas pendidikan akan turut menurunkan informalitas tenaga kerja dan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas (Neelkanth, 2022).

Pada Agustus 2022, jumlah pekerja Informal di Indonesia mencapai 80,24 juta orang. Angka ini naik 2,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pekerja formal hanya sebesar 55,06 juta orang. Jumlah pekerja informal juga naik kembali pada periode Februari 2023, dengan total pekerja informal sebesar 83,34 juta orang dan pekerja formal sebesar 55,29 juta orang. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, pada Agustus 2022 jumlah pekerja informal perempuan dapat dikatakan cukup tinggi. Jumlah ini mencapai 33,04 juta orang dan hampir 75 persen dari jumlah pekerja informal laki-laki. Sedangkan jumlah pekerja formal perempuan hanya sebesar 18,75 juta orang.

Gambar 9.1 Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS (diolah)

Menurut komposisinya, jumlah pekerja informal masih mendominasi selama 4 tahun terakhir. Pada agustus 2022, jumlah pekerja informal mencapai 59,31 persen dari total pekerja. Pada periode ini juga dapat dilihat bahwa terjadi shifting pada pekerja formal ke informal di tahun 2020. Pandemi yang terjadi pada tahun tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan memaksa untuk menutup aktivitas usaha. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, akibatnya para pekerja mencari pekerjaan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama proses pemulihan ekonomi dominasi pekerja informal pun turut berkurang secara perlahan. Namun demikian, komposisi pekerja informal masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 (Agustus 2019).

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pekerja informal pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada agustus 2022, komposisi pekerja informal perempuan mencapai 64,43 persen. Sedangkan pekerja

informal laki-laki hanya sebesar 56,03 persen. Pekerja informal perempuan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 0,63 poin pada agustus 2022. Sedangkan pekerja informal laki-laki di periode yang sama mengalami penurunan sebesar 0,58 poin.

Untuk dapat mengurai masalah ketenagakerjaan di Indonesia, diperlukan kebijakan yang responsif, adaptif, dan tepat sasaran agar berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia seperti pengangguran, disparitas antar jenis kelamin, dan produktivitas dapat terselesaikan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembangunan manusia juga perlu didukung oleh seluruh pihak agar sumber daya manusia di Indonesia memiliki kemampuan dan jiwa kompetitif yang dapat bersaing di dunia global. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi dan skill yang mumpuni menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2013. Asian Development Outlook April 2023. ADB: Philippines
- Angkasa Pura. 11 Januari 2023. Meroket 84%, Angkasa Pura Airports Layani 52 Juta Penumpang Sepanjang 2022. Diakses pada 4 Juli 2023, dari <https://ap1.co.id/id/information/news/detail/meroket-84-angkasa-pura-airports-layani-52-juta-penumpang-sepanjang-2022>
- Antaraneews.com. 19 Desember 2022. Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional 2022. Diakses pada 5 Juni 2023, dari <https://www.antaraneews.com/infografik/3311562/indeks-pembangunan-kepariwisataan-nasional-2022>
- Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik. 2023. Analisis Ketersediaan Pangan Neraca Bahan Makanan Indonesia 2020-2022. Jakarta: Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Pangan Nasional. 2022. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Tourism Satellite Account Indonesia 2017-2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bandung.go.id. 3 April 2023. Mantap! BPS: Maret 2023, Kota Bandung Deflasi 1,50 Persen. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.bandung.go.id/news/read/7844/mantap-bps-maret-2023-kota-bandung-deflasi-1-50-persen>
- Bank Indonesia. 2023. Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2023. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – Juni 2023. Jakarta: BI.
- Bi.go.id. 17 Maret 2023. Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2023. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Maret-2023.aspx>
- Bi.go.id. 2 Januari 2023. Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran pada 2023. Diakses pada 6 Juli 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx
- Bi.go.id. 23 November 2022. Uang Beredar Tumbuh Meningkatkan Pada Oktober 2022. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2431922.aspx
- Bi.go.id. 6 Februari 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat. Diakses pada 1 Mei 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_252823.aspx
- Bi.go.id. 9 Mei 2022. Inflasi April 2022 tetap Terkendali. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news->

release/Pages/sp_2411922.aspx

Bi.go.id. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/default.aspx>

Bi.go.id. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/infrastruktur/default.aspx>

Bi.go.id. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>

Bi.go.id. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

Bicara131.bi.go.id. BI-FAST (Overview dan Skema Harga). Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01115/en-us>

Bpkp.go.id. 26 Januari 2023. BPKP Kalsel: Bupati Kotabaru Harus Bangun Kerja Sama Internal dan Eksternal Kendalikan Inflasi. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/40324/0/BPKP-KALSEL-BUPATI-KOTABARU-HARUS-BANGUN-KERJA-SAMA-INTERNAL-DAN-EKSTERNAL-KENDALIKAN-INFLASI.bpkp>

BPS. 2021. Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. 2022. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2022. Jakarta: BPS

BPS. 2022. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2022. Jakarta: BPS

BPS. 2022. Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. 2023. Indikator Ekonomi Desember 2022. Jakarta: BPS.

BPS. 2023. Indikator Ekonomi Juni 2023. Jakarta: BPS.

BPS. 2023. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023. Jakarta: BPS

BPS. 2023. Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2023. Jakarta: BPS

BPS. 5 Mei 2023. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023, Diakses pada 13 Juli 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>

BPS. 6 Februari 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2022. Diakses pada 22 Mei 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>

BPS. 7 November 2022. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022. Diakses pada 10 Juli 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar->

- Bps.go.id. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017 - sekarang (Kunjungan). Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/16/1150/3/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2017---sekarang.html>
- Bps.go.id. Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (Persen). Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab5>
- BRS BPS. 2 Januari 2023. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Baubau Desember 2022. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://baubaukota.bps.go.id/pressrelease/2023/01/02/165/perkembangan-indeks-harga-konsumen-inflasi-kota-baubau-desember-2022.html>
- CNBC Indonesia. 2 Januari 2023. Nasib Sektor Properti di Era Suku Bunga Tinggi & Resesi Dunia. Diakses pada 8 Mei 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221229111511-128-401106/nasib-sektor-properti-di-era-suku-bunga-tinggi-resesi-dunia>
- CNBC Indonesia. 25 Januari 2023. Urgensi Mendongkrak Produktivitas Pekerja Indonesia. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230125175531-14-408241/urgensi-mendongkrak-produktivitas-pekerja-indonesia>
- Cnbcindonesia.com. 15 September 2022. Jokowi Berhasil, Harga Minyak Goreng Turung Terus Jadi Segini. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220915013047-4-372179/jokowi-berhasil-harga-minyak-goreng-turun-terus-jadi-segini>
- Cnbcindonesia.com. 3 Februari 2020. Turis Asing di 2019 Capai 16 Juta, Malaysia & China Terbanyak. Diakses pada 4 Juli 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200203121719-4-134730/turis-asing-di-2019-capai-16-juta-malaysia-china-terbanyak>
- Cnbcindonesia.com. 3 Januari 2023. Sri Mulyani Ungkap Penyebab Rupiah Anjlok Sepanjang 2022. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103142641-4-402423/sri-mulyani-ungkap-penyebab-rupiah-anjlok-sepanjang-2022>
- Cnbcindonesia.com. 3 Januari 2023. Sri Mulyani Ungkap Penyebab Rupiah Anjlok Sepanjang 2022. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103142641-4-402423/sri-mulyani-ungkap-penyebab-rupiah-anjlok-sepanjang-2022>
- Detik Finance. 4 November 2022. 70% Tenaga Kerja RI Adalah Pekerja Informal, Ini Biang Keroknya. Diakses pada 21 Juli 2023, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6388103/70-tenaga-kerja-ri-adalah-pekerja-informal-ini-biang-keroknya>
- Djpb.kemenkeu.go.id. 15 November 2022. Bantalan Sosial Tahan Laju Inflasi Pasca-Kenaikan BBM di Kabupaten Kotabaru. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4002->

bantalan-sosial-tahan-laju-inflasi-pasca-kenaikan-bbm-di-kabupaten-kotabaru.html.

Dpr.go.id. 5 November 2020. Indonesia Resmi Resesi, Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat. Diakses pada 1 Agustus 2023, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30577/t/Indonesia+Resmi+Resesi%2C+Pemulihan+Ekonomi+Harus+Dipercepat>

Ekon.go.id. 1 Agustus 2022. Permintaan Domestik yang Solid dan Geliat Sektor Riil Jadi Penopang Berlanjutnya Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4402/permintaan-domestik-yang-solid-dan-geliat-sektor-riil-jadi-penopang-berlanjutnya-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional>

Ekon.go.id. 4 Mei 2023. Inflasi Ramadan dan Idulfitri 2023 Terjaga Stabil dan Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5110/inflasi-ramadan-dan-idulfitri-2023-terjaga-stabil-dan-lebih-rendah-dibanding-tahun-lalu>

Ekonomi.bisnis.com. 25 Januari 2023. Lampau Target, Sandiaga: Devisa Pariwisata 2022 Capai US\$4,26 Miliar. Diakses pada 5 Juni 2023, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230125/12/1621574/lampau-target-sandiaga-devisa-pariwisata-2022-capai-us426-miliar>

Ekonomi.republika.co.id. 2 Januari 2023. Ekonom: Kenaikan Cukai Rokok Picu Inflasi 2023. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnv1ai502/ekonom-kenaikan-cukai-rokok-picu-inflasi-2023>

Finansial.bisnis.com. 2 Februari 2022. Yuhu! Tarif Transfer BI-Fast Turut Andil Tekan Inflasi Januari 2022. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220202/11/1495758/yuhu-tarif-transfer-bi-fast-turut-andil-tekan-inflasi-januari-2022>

Gajimu.com. Kebijakan Pengupahan di Indonesia. Diakses pada 17 Juli 2023, dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1>

Gajimu.com. Kerja dan Upah. Diakses pada 19 Juli 2023, dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036,minimum%20dilakukan%20oleh%20dewan%20pengupahan.>

Idntimes.com. 1 Agustus 2022. Pembangunan IKN Bikin Okupansi Hotel di Kaltim Melonjak. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/pembangunan-ikn-bikin-okupansi-hotel-di-kaltim-melonjak?Page=all>

IDX. 2023. IDX Yearly Statistics 2022. Jakarta: IDX.

IMF. 2023. World Economic Outlook: A Rocky Recovery. Washington, DC. April

Infopublik.id. 1 Maret 2023. Februari 2023 Kota Ternate Alami Inflasi 1,85 Persen. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/717323/februari-2023-kota-ternate-alami-inflasi-1-85-persen>

- Kemenkeu.go.id. 14 April 2023. IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Perlambatan Global dan Eskalasi Risiko. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/IMF-proyeksikan-ekonomi-Indonesia-tetap-solid>
- Kemenkeu.go.id. Informasi Publik Resesi. Diakses pada 1 Juni 2023, dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-resesi>
- Kemenkeu.go.id. Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur>
- Kemenparekraf. 13 November 2022. Siaran Pers: Menparekraf: Pariwisata Berkelanjutan Jadi Tren Baru Pengembangan Sektor Parekraf Indonesia. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-pariwisata-berkelanjutan-jadi-tren-baru-pengembangan-sektor-parekraf-indonesia>
- Kemenparekraf. 15 Desember 2022. Siaran Pers: Menparekraf: IPKN Jadi Indikator Penguatan Sektor Pariwisata Indonesia. Diakses pada 5 Juni 2023, dari <https://kemenparekraf.go.id/apresiasi-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/siaran-pers-menparekraf-ipkn-jadi-indikator-penguatan-sektor-pariwisata-indonesia>
- Kemenparekraf. 15 Februari 2023. Siaran Pers: Menparekraf: Pencapaian Target Parekraf 2023 Perlu Ditopang dengan Deregulasi. Diakses pada 5 Juni 2023, dari <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-pencapaian-target-parekraf-2023-perlu-ditopang-dengan-deregulasi>
- Kementerian Keuangan. 2022. Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Diakses pada 28 Maret 2023, dari <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>.
- Kementerian Keuangan. 2022. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023. Diakses pada 11 Juli 2023, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478331_kem_ppkf_2023.pdf.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 14 Oktober 2021. Meski di Tengah Pandemi, Target Investasi Tahun 2020 Tercapai. Diakses 1 Agustus 2023, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35050/meski-di-tengah-pandemi-target-investasi-tahun-2020-tercapai/0/berita>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 11 Januari 2023. Presiden Targetkan Investasi Tahun 2023 Capai Rp1.400 Triliun. Diakses 1 Agustus 2023, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46834/presiden-targetkan-investasi-tahun-2023-capai-rp1400-triliun/0/berita#:~:text=Menteri%20Koordinator%20Bidang%20Perekonomian%20Airlangga,dapat%20mencapai%20Rp1.400%20triliun>

- Kementerian Perhubungan. 8 Agustus 2022. Sektor Transportasi Tumbuh 21,27% : Menhub Minta Semua Pihak Jaga Momentum Pertumbuhan Positif. Diakses pada 28 April 2023, dari <https://dephub.go.id/post/read/sektor-transportasi-tumbuh-21,27-menhub-minta-semua-pihak-jaga-momentum-pertumbuhan-positif>
- Kementerian Pertanian. 2022. Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2022. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2022. Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2022. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Sekretariat Negara. 25 Juni 2019. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul. Diakses pada 6 Juni 2023, dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul
- Kementerian Tenaga Kerja. 3 Januari 2023. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023. Diakses pada 21 Juli 2023, dari <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/942>
- Kementerian Keuangan. 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (audited). Diakses pada 14 April 2023, dari https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021_.pdf.
- Kementerian Keuangan. 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (audited). Diakses pada 17 Juli 2023, dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/dca93798-033d-4d61-9a4f-bf112fd834ab/LKPP_2022.pdf?ext=.pdf.
- Kemeparekraf. 8 Juni 2023. Destinasi MICE Internasional yang Ada di Indonesia. Diakses pada 5 Juli 2023, dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/destinasi-mice-internasional-yang-ada-di-indonesia>
- Keuangan.kontan.co.id. 30 Januari 2023. Bunga Acuan Naik, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Melandai pada Desember 2022. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bunga-acuan-naik-transaksi-pasar-uang-antar-bank-melandai-pada-desember-2022>
- Kompas. 6 Februari 2023. 2022, Perekonomian RI Tumbuh 5,31 Persen. Diakses pada 10 Mei 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/06/sepanjang-2022-perekonomian-ri-tumbuh-531-persen>
- Kompas.com. 30 Desember 2022. Warga China Ramai-ramai Beli Tiket Pesawat ke Luar Negeri Usai Perbatasan Dibuka, ke Mana Perginya? Diakses pada 4 Juli 2023, dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/12/30/102900870/warga-china-ramai-ramai-beli-tiket-pesawat-ke-luar-negeri-usai-perbatasan?Page=all>
- Kompas.id. 1 Januari 2023. Nilai Tukar Rupiah 2022 Melemah 9,31 Persen. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/01/nilai-tukar-rupiah-2022-melemah-931-persen>
- Kompas.id. 27 April 2023. Proses Dedolarisasi Sedang Berlangsung.

Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/24/proses-dedolarisasi-sedang-berlangsung>

Kompas.id. 6 Juni 2023. Dedolarisasi dan Deglobalisasi. Diakses pada 24 Agustus 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/05/dedolarisasi-dan-deglobalisasi>

Kompas.id. 7 Januari 2022. Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Bakal Diubah Jadi Rp 14.000 Per Liter. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/07/harga-eceran-tertinggi-minyak-goreng-bakal-diubah-jadi-rp-14-000-per-liter>

Kontan.co.id. 14 Agustus 2017. Catatan BPS, konsumsi leisure tumbuh 6,3%. Diakses pada 10 Mei 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/catatan-bps-konsumsi-leisure-tumbuh-63>

Kontan.co.id. 29 Januari 2020. Melebihi target, realisasi investasi sepanjang 2019 capai Rp 809,6 triliun. Diakses 1 Agustus 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-target-realisasi-investasi-sepanjang-2019-capai-rp-8096-triliun#:~:text=Nah%2C%20untuk%20tahun%20ini%2C%20BKPM,44%25%20dari%20realisasi%20investasi%202019>

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Market.bisnis.com. 31 Maret 2022. Rangkuman Data Perkembangan Harga Emas & Harga Minyak Selama Maret 2022. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://market.bisnis.com/read/20220331/235/1517232/rangkuman-data-perkembangan-harga-emas-harga-minyak-selama-maret-2022>

Mc.kotabarakab.go.id. 25 Januari 2023. Rem Inflasi di Kabupaten Kotabaru TPID Kal-Sel Laksanakan Koordinasi. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <http://mc.kotabarakab.go.id/rem-inflasi-di-kabupaten-kotabaru-tpid-kal-sel-laksanakan-koordinasi/>

Mediakuangan.kemenkeu.go.id. 2 Mei 2023. Prospek Cerah Perekonomian Indonesia 2023. Diakses pada 10 Juli 2023, dari <https://mediakuangan.kemenkeu.go.id/article/show/prospek-cerah-perekonomian-indonesia-2023>

Muttaqin, H. 24 Februari 2020. Mengapa Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan Tinggi? Diakses pada 14 Juli 2023, dari <https://iesp.ulm.ac.id/mengapa-tingkat-pengangguran-terbuka-di-perkotaan-tinggi/>

Nasional.kontan.co.id. 1 September 2022. Ini Penyebab Deflasi di Bulan Agustus 2022. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-deflasi-di-bulan-agustus-2022>

Nasional.kontan.co.id. 2 Desember 2022. Ini Biang Kerok Harga Beras Melejit Menurut BPS. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-biang-kerok-harga-beras-melejit-menurut-bps>

Nasional.kontan.co.id. 31 Mei 2023. Ekonom Ini Proyeksi Target Sasaran Inflasi di Tahun 2023 Lebih Cepat Terealisasi. Diakses pada 10 Juli 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-ini-proyeksi-target-sasaran-inflasi-di-tahun-2023-lebih-cepat-teralisasi>

- Nasional.tempo.co. 17 Mei 2022. Jokowi Hapus Kewajiban Tes PCR bagi Pelaku Perjalanan Dalam dan Luar Negeri. Diakses pada 5 Juni 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1592473/jokowi-hapus-kewajiban-tes-pcr-bagi-pelaku-perjalanan-dalam-dan-luar-negeri>
- Radartarakan.jawapos.com. 5 Januari 2023. Angkutan Udara Penyumbang Inflasi Terbesar. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/05/01/2023/angkutan-udara-penyumbang-inflasi-terbesar/>
- Rakyatkaltara.prokal.co. 9 November 2022. Inflasi di Tanjung Selor Tinggi, BBM dan Akses Jalan Sangat Berpengaruh. Diakses pada 6 Juli 2023, dari <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/27849-inflasi-di-tanjung-selor-tinggi-bbm-dan-akses-jalan-sangat-berpengaruh.html>
- Republika. 6 Januari 2023. Kemenperin Catat Industri Kecil Menengah Serap 12,39 Juta Pekerja pada 2022. Diakses pada 17 Juli 2023, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ro2fba502/kemenperin-catat-industri-kecil-menengah-serap-1239-juta-pekerja-pada-2022>
- Rri.go.id. 24 Januari 2023. Harga Beras Naik, Dinas Perdagangan Baubau Pastikan Tidak Ada Penimbunan. Diakses pada 6 Juli 2023, dari https://www.rri.go.id/daerah/144108/harga-beras-naik-dinas-perdagangan-baubau-pastikan-tidak-ada-penimbunan?utm_source=tags&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- Tempo.co. 13 Februari 2023. Sektor Transportasi dan Pergudangan 2022 Tumbuh 19,87 Persen, Tahun Ini Bisa Lebih Tinggi? Diakses pada 22 Mei 2023, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1690697/sektor-transportasi-dan-pergudangan-2022-tumbuh-1987-persen-tahun-ini-bisa-lebih-tinggi#.Y-mjdxsk0ee>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. 2022. Diakses pada 06 Maret 2023, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e7951df7-813f-4903-a945-8a2a79d16fcc/UU28TAHUN2022.pdf>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Email: bpsHQ@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963

